

E-ISSN 2540-9182

P-ISSN 2086-3357

# KOMUNITAS

JURNAL PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)

Volume 13 | Nomor 1 | Juni 2022

**E-ISSN 2540-9182**

**P-ISSN 2086-3357**

# **KOMUNITAS**

## **Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**

---

**Pelindung** : Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag

**Penanggung Jawab** : Dr. Muhamad Saleh, M.A

**Ketua Penyunting** : Zaenudin Amrulloh, M.A

**Mitra Bestari** : Prof. Dr. Suprapto, M.Ag (UIN Mataram)

Dr. Muchammadun, M.PS (UIN Mataram)

Dr. Visa Salviana DS, M.Si (UMM)

Dr. Nina Mariani Noor, M.Si (UIN Sunan Kalijaga)

Ahmad Izudin, M.Si (UIN Sunan Kalijaga)

Annisa Rizqa Alamri (Universitas Tanjungpura)

**Dewan Penyunting** : Novia Suhastini, M.Si

Riska Mutiah, M.Si

Siti Aminah, M.Si

Erwin Padli, M.Hum

Erlan Muliadi, M.Pd

Iqbal Bafadal, M.Si

**Lay-Outer** : Kamarudin, S.E

**Sekretariat** : Ahmad Khatibul Ummam, S.Pd

Nurhidayati Desiani, S.Kom

### **Alamat**

Jurusian Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram

Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru, Mataram NTB 83125

**E-ISSN 2540-9182**

**P-ISSN 2086-3357**

# **KOMUNITAS**

**Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**

---

## **DAFTAR ISI**

### **TRANLITERASI**

**STRATEGI PENGUATAN LITERASI DIGITAL BERBASIS KOMUNITAS DALAM  
PENGAWASAN PILKADA DI KALIMANTAN BARAT**

Rahmaniah, dkk ~ 1

**HARMONI KOMUNIKASI LINTAS AGAMA BERBASIS EKONOMI DAN RITUAL:  
STUDI FENOMENOLOGI PADA KOMUNITAS MUSLIM DAN HINDU DI DESA  
LINGSAR, KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Kadri ~ 18

**KERUKUNAN DAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM  
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOISAL**

Derry Ahmad Rizal & Ahmad Kharis ~ 34

**EKSISTENSI MAHASISWA MELALUI PEMBERDAYAAN BIDANG KEAGAMAAN DI  
NAGARI SIMANAU**

Irwandi & Romi Maimori ~ 53

**ANALISIS DESKRIPTIF DESA WISATA RELIGI MLANGI BERBASIS KOMPONEN  
3A (ATRAKSI, AKSESIBILITAS, AMENITAS) PARIWISATA**

Shofi'unnafi ~ 69

**PETUNJUK PENULISAN**

## TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dat	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ț	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ț	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ءـ	Hamzah	’	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

## **Strategi Penguatan Literasi Digital Berbasis Komunitas dalam Pengawasan PILKADA di Kalimantan Barat**

**Syarifah Ema Rahmaniah<sup>1</sup>, Jumadi<sup>2</sup>, Annisa Rizqa Alamri<sup>3\*</sup>**

<sup>1</sup> FISIP Universitas Tanjungpura; syf.ema@fisip.untan.ac.id

<sup>2</sup> FISIP Universitas Tanjungpura; jum\_untan@yahoo.co.id

<sup>3</sup> FISIP Universitas Tanjungpura; daffiannisa@gmail.com\*

\* Correspondence: daffiannisa@gmail.com\*

**Abstract:** The strategy for preventing election violations should be carried out through community-based capacity bulding for anticipated and responded early. Prevention of violations can be used by increasing coordination and institutional cooperation by seeking synergies and also collaborative roles among stakeholders. This study aims to conduct a critical study of the conventional communication sovereignty model and attempt to reconstruct the importance of the community-based communication sovereignty model, related to the importance of the community media with effort to build communication sovereignty in participatory election. This research uses descriptive qualitative. Data were obtained through indepth interviews, observation and literature study. Then the data analized with rationally based on certain logical. The result of this research found, 1) Monitoring Participatory election means public awareness and participation by monitoring the implementation of the election. 2) Conducting a study on election issues will help to prevent the violations. 3) Submitting information on alleged election violations.

**Abstrak:** Strategi pencegahan pelanggaran pemilu seharusnya dilakukan melalui penguatan kapasitas masyarakat berbasis komunitas sehingga dapat diantipasi dan direspon sejak dini. Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan dengan mengupayakan sinergi dan juga kolaborasi peran antar para *stakeholders*. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian kritis terhadap model kedaulatan komunikasi konvensional dan berupaya merekonstruksi pentingnya model kedaulatan komunikasi berbasis komunitas, terkait pentingnya peran media komunitas dalam upaya membangun kedaulatan komunikasi dalam pengawasan pemilu yang partisipatif. *Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara rasional berdasarkan pola logika berfikir tertentu. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa* 1) Pengawasan pemilu yang partisipatif bermakna kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dengan cara melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilu. 2) Melakukan kajian terhadap persoalan ke-Pemilu-an akan ikut mencegah terjadinya pelanggaran. 3) Menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu.

**KATA KUNCI:** Literasi Digital; Pengawasan Pilkada; Pelanggaran Pemilu

## 1. Pendahuluan

Data Bawaslu Kalimantan Barat memperlihatkan dimana pada Tahun 2020 terdapat pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah. Pada Kabupaten Melawi terdapat dua kasus, yakni kasus netralitas Aparatur Sipil Negara dan juga kampanye ASN, kemudian di Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat satu temuan yakni panitia pengawas desa/kelurahan (PPDK) yang mengalami pengancaman. Selanjutnya, di Kabupaten Sambas terdapat empat laporan pelanggaran yaitu, dugaan penyalahgunaan wewenang, dugaan politisasi bantuan dan juga dugaan netralitas ASN. Pada Kabupaten Ketapang terdapat dua laporan dan satu temuan pelanggaran, yaitu kampanye yang melanggar protokol kesehatan, khususnya di era pandemic covid-19 dan pencatutan dukungan untuk calon perseorangan. Pelanggaran selanjutnya terdapat di Kabupaten Sekadau dimana, dua laporan kasus netralitas ASN dan juga dugaan penyimpangan fasilitas negara. Terakhir, pelanggaran terjadi di Kabupaten Sintang dengan empat temuan pelanggaran dugaan kampanye yang terjadi di tempat ibadah dan netralitas kepala desa, hingga dugaan reses untuk kampanye<sup>1</sup>

Dari data pelanggaran pemilihan kepala daerah Kalimantan Barat Tahun 2020 memperlihatkan masih tingginya angka pelanggaran pemilu, baik pelanggaran berupa temuan langsung oleh bawaslu, maupun pelanggaran yang kemudian dilaporkan oleh masyarakat setempat. Dari data tersebut juga menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat sangat kecil dibandingkan dengan data pelanggaran yang ditemukan oleh panwaslu. Hal ini membuktikan masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengawasan pemilu. Tingginya angka pelanggaran pemilu terjadi karena:

1. Rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
2. Rendahnya kerjasama dan koordinasi antar stake holder terkait pengawasan pemilu yang partisipatif
3. Sosialisasi model indeks potensi kerawanan pelanggaran oleh Bawaslu belum tepat saran

---

<sup>1</sup> <https://kalbar.bawaslu.go.id/2020/11/11/rekap-duggan-pelanggaran-per-11-november-2020>

4. Pengaturan pelanggaran administrasi sangat lemah karena diatur terlalu umum, tidak diatur jenis pelanggaran administrasi serta jenis sanksinya, serta bagaimana proses penyelesaiannya.

Mengingat dalam pengawasan pemilu ada dua strategi penting yang perlu diupayakan yaitu strategi pencegahan (*preventif*) dan strategi penindakan (*repressive*) yang telah dijelaskan dalam pasal 73 ayat (2) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Maka strategi pencegahan yang seharusnya dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran adalah dengan cara melakukan pemetaan kawasan yang dapat berpotensi untuk terjadinya pelanggaran pemilu, sehingga dapat diantipasi dan direspon sejak dini. Pencegahan *integrative* dipandang sebagai upaya pemetaan awal untuk mengidentifikasi potensi awal terjadinya pelanggaran. Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan dengan mengupayakan sinergi dan juga kolaborasi peran antar para *stakeholders*. Hal ini diupayakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, membuka ruang partisipasi keterbukaan informasi, transformasi dan akuntabilitas pelaksanaan pemilu, sosialisasi regulasi, pengawasan langsung serta rekomendasi peraturan dan keterlibatan masyarakat.

Beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam pencegahan pelanggaran pemilu adalah:

1. Pemetaan daerah yang rawan yang sering terjadi pelanggaran;
2. Identifikasi fokus pencegahan berdasarkan pemetaan daerah rawan dan berpotensi untuk terjadinya pelanggaran;
3. Plan desain pencenggahan pelanggaran;
4. Evaluasi reflektif terhadap efektivitas pencegahan<sup>2</sup>

Prinsip kedua adalah kegiatan penindakan pelanggaran dengan melakukan investigasi atau kajian dari setiap temuan yang terjadi di dalam pelanggaran serta, memberikan rekomendasi langkah yang harus diambil jika kemudian disimpulkan telah terjadi pelanggaran. Namun kedua strategi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa melibatkan partisipasi public (masyarakat) yang luas dari berbagai kalangan. Fungsi

---

<sup>2</sup> Badan Pengawas Pemilu RI. *Modul bimbingan teknis panwaslu kab/kota.* (Jakarta: 2012)

pengawasan pemilu baik itu bersifat pencegahan dan penindakan menjadi lebih taktis dan strategis pun memiliki dampak luas jika melibatkan partisipasi masyarakat terutama media komunitas. Mengingat peran media komunitas yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat terutama daerah-dearah yang jauh dan sulit terjangkau. Media komunitas juga mampu menjadi alat kontrol penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu itu sendiri karena media komunitas memiliki akses dan fleksibilitas terhadap setiap stakeholders pemilu.

Media komunitas juga memiliki jangkauan kepada kelompok-kelompok komunitas yang memiliki ikatan kebersamaan dan hubungan emosional yang kuat atau yang lebih dikenal dengan media ormas. Ormas sebagai infrastruktur sosial mampu menjadi inspirasi, motivasi dan penggerak elemen masyarakat sehingga mampu menjadi mitra yang handal sebagai pemantau pemilu.

Melalui ormas inilah partisipasi publik diharapkan akan dapat semakin meningkat baik dalam penyelenggaran maupun dalam pengawasan pemilu. Terdapat lima hal yang dapat dilakukan oleh media komunitas dalam pengawasan partisipatif, baik dalam konteks pencegahan maupun penindakan. Pertama, membangun kerjasama dan juga jejaring dengan penyelenggara pemilu untuk dapat lebih memahami regulasi terkait pemilu, karena regulasi pemilu cenderung mengalami perubahan. Kedua, menjadi elemen pendukung relawan pengawas pemilu. Salah satu program Bawaslu dalam pileg Tahun 2014 adalah gerakan sejuta relawan maka media komunitas dapat menopang keberhasilan dan keberlanjutan gerakan sejuta relawan ini. Ketiga, menjadi elemen pemantau pemilu. Keempat, menjadi pelapor atas terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Kelima, melakukan kajian-kajian terkait kasus atau permasalahan kepemiluan<sup>3</sup>.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, hal ini berdasarkan pada kasus atau permasalahan yang diangkat yaitu tentang apa dan bagaimana objek tersebut terbentuk. Data dalam penelitian ini diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber<sup>4</sup>. Metode penelitian tersebut dilakukan untuk menggambarkan masalah. Data yang digunakan sebagai sumber dasar hasil analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, dokumentasi dan juga

<sup>3</sup> Sarwono, B, *Teknis Media Massa dan Ormas dalam Pengawasan Partisipatif Guna Mendukung*

*Pengawasan Pemilu dalam Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*. (Yogjakarta: Bawaslu, 2014)

<sup>4</sup> Nawawi Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019).

observasi. Data yang kemudian diperoleh diolah dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan<sup>5</sup>. Setelah data diperoleh maka dilakukan pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

### Konsep dan Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik dipandang sebagai penyebaran informasi yang penting secara menyeluruh di dalam masyarakat dari satu bagian sistem politik ke sistem politik yang lain.<sup>6</sup> Dengan demikian komunikasi politik dapat diartikan sebagai setiap jenis penyampaian pesan terkait informasi sistem politik dari suatu sumber ke penerima pesan baik berupa lambang/simbol, lisan hingga tulisan maupun berupa isyarat yang dapat memberikan pengaruh terhadap struktur kekuasaan yang ada.

Adapun fungsi komunikasi politik adalah:

1. Membagikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga politik baik itu lembaga pemerintahan maupun masyarakat
2. Melakukan diseminasi terkait kebijakan, program dan tujuan lembaga politik pemerintah dan masyarakat
3. Memberi dorongan kepada politisi, birokrat dan pendukung partai
4. Menjadi forum yang dapat menampung dan mentransformasikan saran dari masyarakat sehingga menjadi bahan pembahasan dalam opini publik
5. Melatih masyarakat melalui informasi, sosialisasi tentang tata cara pemilihan umum dan penggunaan hak suara mereka dalam pemilu
6. Sebagai hiburan masyarakat dalam “pesta demokrasi” dengan menyuguhkan penampilan dari para juru kampanye, artis-artis, komentator dan pengamat politik yang memiliki kapasitas.
7. Mempererat penyatuan dan meningkatkan rasa nasionalisme dengan tujuan menghindari perpecahan berupa aksi spratis yang mengancam persatuan nasional.

---

<sup>5</sup> Creswell W. John. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)

<sup>6</sup> Rush, Michael dan Althoff, Philip, *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997)

8. Membuat tatanan struktur kekuasaan melalui informasi dengan cara mendapatkan support dari masyarakat luas terhadap aksi reformasi dan demokrasi
9. Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita,,agenda *setting* maupun komentar politik
10. Menjadi pengamat politik yang aktif dan kritis untuk menciptakan pemerintahan yang baik, ideal, transparan dan akuntabel<sup>7</sup>

Dengan demikian fungsi komunikasi politik tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat luas yang tidak hanya berperan sebagai sasaran atau komunikan, namun juga sebagai pelaku aktif atau komunikator dalam komunikasi politik. Masyarakat dan media komunitas tidak dapat terpisahkan sebagai aktor utama yang mendorong meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dari berbagai kajian dalam komunikasi politik terdapat beberapa model komunikasi politik seperti model Garbner, model Laswell, Model Westly dan Maclean, model Jacobson dan model Newcomb. Namun dalam tulisan ini, penulis tertarik untuk menggunakan model Laswell, dikarenakan model ini cukup operasional untuk membangun model kedaulatan komunikasi politik dalam pengawasan pemilu yang partisipatif.

Model komunikasi klasik dari Lasswell ini menunjukkan bahwa pihak pengirim pesan (komunikator) memiliki suatu keinginan untuk mempengaruhi pihak penerima (komunikasi). Oleh karena itu komunikasi harus dipandang sebagai upaya yang bersifat persuasive untuk menyampaikan pesan sehingga berimplikasi baik positif ataupun *negative*, diterima atau ditolak. Lasswell lebih banyak menekankan pada pentingnya bentuk dan cara penyampaian pesan agar dapat memberikan implikasi positif<sup>8</sup>.

Adapun saluran komunikasi politik yang dapat digunakan oleh para pelaku politik adalah:

1. Komunikasi Massa, yaitu komunikasi yang digunakan oleh massa atau orang ramai baik berupa cetak, elektronik audio dan visual
2. Komunikasi tatap muka seperti rapat terbuka dan konfrensi press
3. Komunikasi interpersonal yaitu tatap muka antara satu personal ke personal yang lain

---

<sup>7</sup> Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*. (Jakarta: Persada, 2009)

<sup>8</sup> *Ibid.*

#### 4. Komunikasi organisasi

##### **Model Kedaulatan Komunikasi Untuk Pengawasan Pemilu Yang Partisipatif**

Untuk merealisasikan pengawasan partisipatif agar tepat sasaran maka perlu diperhatikan lebih lanjut keterkaitan antara komunikasi dengan demokratisasi di Indonesia. Akses terhadap media komunikasi publik saat ini menjadi polemik yaitu semakin maraknya privatisasi dalam bidang komunikasi publik. Privatisasi terhadap lembaga komunikasi ini telah membuktikan semakin terdistorsinya institusi komunikasi sebagai *public sphere*<sup>9</sup>. Meskipun demikian media komunikasi baik cetak, elektronik maupun visual tetap harus bebas dari campur tangan negara meskipun media komunikasi telah menjadi pertukaran nilai menjadi institusi ekonomi bahkan menjadi sumber pendapatan elit-elit parpol tertentu.

Dengan demikian media diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai sumber informasi yang netral dari pengaruh negara. Artinya negara harus memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memperoleh akses pada setiap saluran komunikasi publik sebagai sarana. Publik juga harus mendapatkan pemahaman terhadap realitas sosial yang berkembang terutama yang dapat mengartikulasikan beragam kepentingan warga negara. Media komunikasi tidak hanya berfungsi melaporkan kejadian-kejadian, tetapi juga berfungsi menjadikan rakyat untuk didengar (*being heard*) dan menjadi institusi pengawas negara (*watch dog*).

Pers harus melaporkan setiap penyelewengan dan pelanggaran yang dilakukan penguasa sebagai bagian dari usaha lembaga komunikasi untuk menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan informasi atas apa yang telah dilakukan oleh penguasa. Dengan keterbukaan informasi kepada publik ini maka proses penilaian integritas kerja Negara berlangsung sehingga publik dapat melakukan refleksi dan evaluasi serta mempertimbangkan kembali kelayakan pemerintah (negara) untuk dipilih kembali pada periode berikutnya.

Pada tingkat organisasi, terdapat indikasi bahwa organisasi media cenderung memilih pasar sebagai basis kekuatan ekonomi jangka panjang sehingga mengabaikan anggota masyarakat sebagai warga negara yang juga berhak memperoleh informasi yang memadai sebagai perwujudan kewarganegaraan mereka.

---

<sup>9</sup> Entman, R, *Democracy without Citizen: Media and the Decay of American Politics*. (New York: Oxford University Press, 1989)

Masyarakat dalam hal ini hanya dilihat sebagai konsumen informasi. Sementara itu pada tingkat isi media (informasi) privatisasi sangat mungkin menghasilkan liputan media yang antara lain bercirikan rendahnya ragam budaya dan ideologis yang ditampilkan lembaga-lembaga komunikasi publik. Media komunikasi telah melahirkan ledakan informasi sebagai alat propaganda baik bagi perusahaan-perusahaan besar maupun propaganda pemerintah<sup>10</sup>.

Komunikasi dalam demokrasi sering dikaitkan dengan peran dan ruang warganegara dalam merealisasikan hak-hak kewarganegaraannya yang terdiri dari tiga dimensi kewarganegaraan yaitu sipil, politik dan sosial<sup>11</sup>. Hak-hak sipil yang dimaksud adalah independensi untuk berpendapat, kebebasan berfikir dan memeluk keyakinan, independensi untuk beraksi dan berhubungan serta independensi untuk memilih pilihannya sendiri. Sementara itu hak-hak politik terkait adanya jaminan dan ruang bagi publik untuk ikut serta dalam penggunaan kekuatan politik dan duduk di institusi negara serta menetukan anggota-anggota dewan perwakilan. Mengenai hak sosial yang berhubungan dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan tanggungan kehidupan dan kesejahteraan tidak hanya bagi dirinya sebagai pekerja namun juga jaminan bagi keluarganya yang umumnya wujudkan melalui pelembagaan negara kesejahteraan (*welfare state*)

Tiga bentuk hubungan antara komunikasi dan kewarganegaraan yang dipandang Murdock dan Golding, yaitu:

1. Seseorang yang memiliki akses terhadap informasi, nasehat-nasehat dan uraian sehingga memudahkan mereka untuk mengetahui hak-hak mereka dan memberikan jalan kepada mereka untuk mencapai hak mereka secara keseluruhan.
2. Seseorang tersebut memiliki jangkuan atau cakupan informasi yang paling luas, mempunyai akses terhadap eksplansi dan diskusi di berbagai bidang yang melibatkan pilihan masyarakat dan mereka harus bisa memanfaatkan fasilitas komunikasi untuk memberikan kritik, memobilisasi oposisi dan memberikan alternative kegiatan.

---

<sup>10</sup> Habermas,J. *The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society.* (Cambridge: Polity Press, 1989).

<sup>11</sup> Murdock,G & Golding,P. *Information Poverty and Political Inequality: Citizenship in the Age of Privatized Communication.* (Journal of Communication, 1989, Vol.39 (3), 180-195)

3. Mereka juga diharapkan untuk mampu memahami kapasitas mereka dan suara mereka dalam berbagai perwakilan yang diberikan dalam bidang komunikasi penting dan mampu menyumbang pada ekspansi perwakilan tersebut<sup>12</sup>.

Berdasarkan hubungan tersebut, sistem informasi dan komunikasi harus mempunyai dua karakteristik pokok, yang pertama pada tingkat penerapan wajib merekomendasikan keberagaman dan menyediakan *feed back* dan partisipasi bagi masyarakat luas. Kedua, pada tahap penggunaan harus dapat menjamin akses terhadap lembaga komunikasi, hal tersebut tidak termasuk dari pendapatan, tempat tinggal serta atribut sosial ekonomi seseorang.

Dengan demikian untuk mengkontruksi kedaulatan komunikasi sebagai suatu konsep, maka kedaulatan komunikasi bermakna terpenuhnya akses komunikasi baik itu ditataran rumah tangga sampai kepada tataran nasional baik itu komunikasi verbal atau non verbal. Komunikasi bukanlah komoditas tapi bagian dari hak asasi manusia sehingga masalah produksi dan distribusi komunikasi adalah persoalan keberlanjutan hidup.

Kedaulatan berarti adanya akses terhadap komunikasi bagi semua orang di satu negara termasuk hak untuk menghasilkan dan mengelola komunikasi. Gagasan kedaulatan komunikasi menegaskan hak masyarakat atas otonominya dalam memutuskan apa yang hendak mereka produksi dan konsumsi terkait komunikasi. Karena itu komunikasi berbasis komunitas menjadi penting untuk direvitalisasi seperti media komunitas untuk menghasilkan sistem komunikasi yang peka terhadap kepentingan komunitas dan kelestarian kearifan lokal sehingga rakyat memiliki pilihan dan kemandirian membangun sistem komunikasi yang ramah dan peka dengan isu-isu lokal.

Adapun kedaulatan komunikasi sebagai sistem harus menekankan pada hak otonom warga untuk mengembangkan sistem komunikasinya dan menolak gagasan komunikasi dari luar atau darimana saja yang justu akan melunturkan identitas nasional atau nilai-nilai ke Indonesiaan. Kedaulatan komunikasi hadir justru untuk memastikan keamanan nasional baik itu keamanan sosial dan keamanan masyarakat dengan cara memperkuat identitas nasional dan memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Kedaulatan

---

<sup>12</sup> *Ibid*(9)

komunikasi ini hanya dapat direalisasikan apabila media komunikasi baik itu media cetak, elektronik dan visual mampu mempertahankan netralitas dan independensinya dan mendapatkan payung hukum atau regulasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap penyiaran publik.

Kedaulatan komunikasi menjadi isu dan model yang penting untuk diaplikasikan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan dan pengawasan pemilu yang partisipatif. Penyelenggaraan pemilu yang partisipatif ini tidak hanya menjadikan rakyat menjadi pemilih yang rasional, kritis dan partisipatif namun rakyat juga peduli untuk menjaga dan mengawal terwujudnya pemilu yang berintegritas. Selama ini dari *channel* komunikasi yang ada lebih banyak dimainkan oleh swasta dan pemerintah namun sayangnya hal ini tidak lepas dari kepentingan dan alat sekelompok orang yang merupakan artikulasi kepentingan partai tertentu. Independensi dan netralitas media akhirnyanya tidak dapat dipertahankan. Keputusan dan informasi yang disampaikanpun sarat dengan kepentingan dan keberpihakan kelomok tertentu.

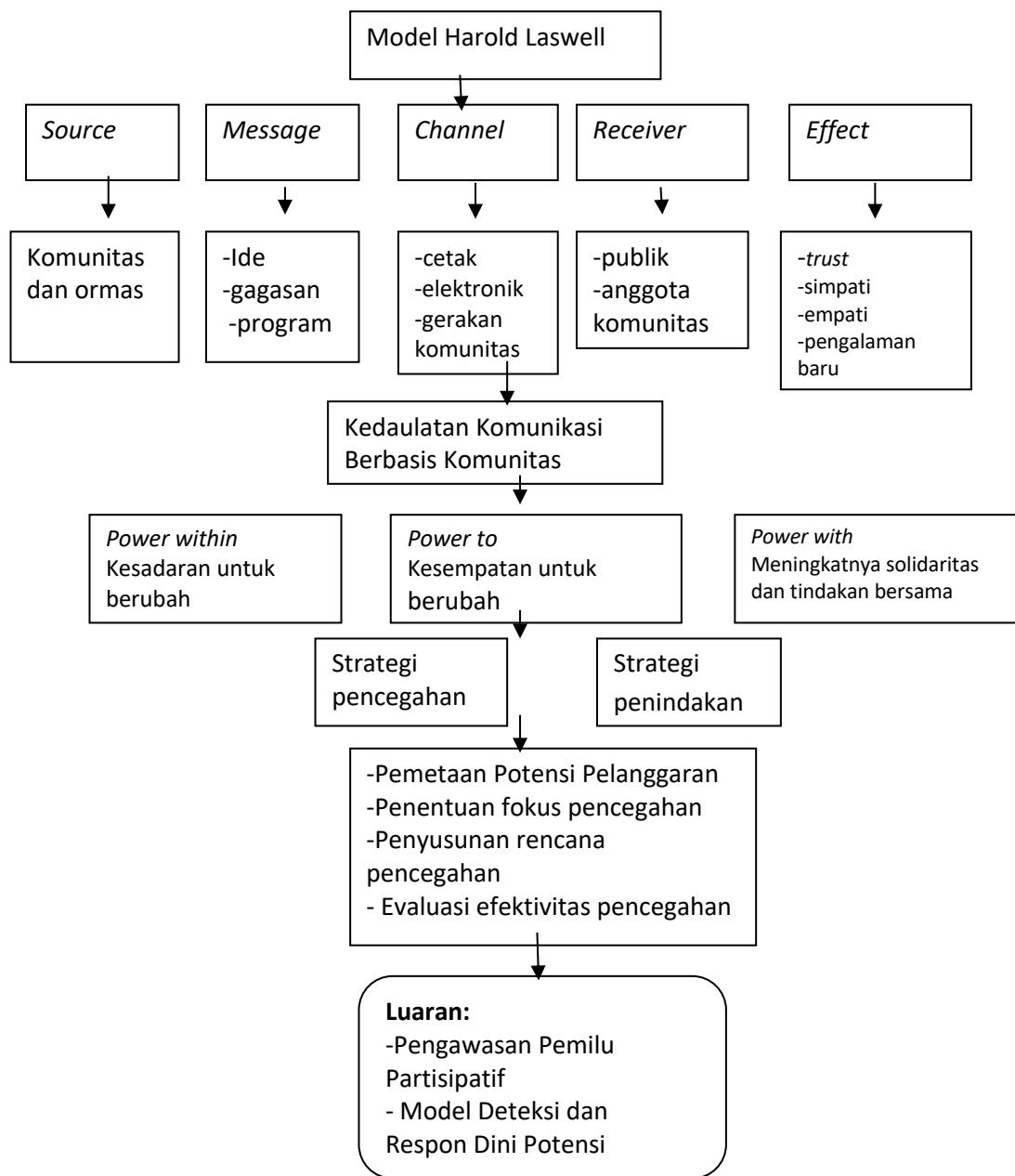
Organisasi masyarakat adalah infrastruktur sosial yang terdekat dan kredibel dengan masyarakat di akar rumput, yang berperan sebagai inspirator, motivator dan juga motor untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Organisasi masyarakat yang satu sisi juga berperan sebagai pranata lokal adalah wujud nyata dari kearifan lokal ini menjadi penting untuk terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai aktor penting dalam upaya mewujudkan kedaulatan komunikasi berbasis komunitas

Oleh karena itu penulis berupaya untuk mendesain model kedaulatan komunikasi berbasis komunitas dengan menggunakan teori Harold Laswell sebagai alat analisisnya dengan mengkombinasikan beberapa pendekatan lainnya seperti pendekatan *community development* berbasis *power within* (meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah), *power to* (meningkatkan kemampuan individu untuk berubah dan memperoleh akses) dan *power with* (meningkatnya solidaritas dan tindakan bersama menghadapi hambatan sumber kekuasaan)<sup>13</sup>. Sebagaimana yang penulis gambarkan dalam diagram 1 pada halaman selanjutnya:

---

<sup>13</sup> Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2005)

**Diagram 1**  
**Model Kedaualatan Komunikasi Berbasis Komunitas**  
**dalam Pengawasan Pemilu**



Sumber: Olahan Penulis dari Berbagai Sumber, 2022.

## 2. Peran Masyarakat Adat Dalam Pengawasan Partisipatif

Kearifan lokal dapat dipahami diartikan ide-ide yang bersifat bijaksana, bernilai baik, sarat dengan kearifan, terkandung dan diikuti oleh masyarakatnya<sup>14</sup>. Fungsi dan keberadaan kearifan lokal sebagai jati diri suatu budaya bangsa sehingga bangsa tersebut mampu mengakomodasi serta beradaptasi terhadap kebudayaan asing yang datang dan menyesuaikan karakter dan kemampuannya sendiri<sup>15</sup>. Faktor budaya daerah memiliki potensi sebagai *local genius* karena telah terbukti kemampuannya menetap sampai sekarang dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dapat bertahan terhadap budaya luar
2. Memiliki kemampuan untuk menampung unsur-unsur budaya dari luar
3. Memiliki kemampuan untuk menggabungkan budaya luar dengan budaya asli setempat
4. Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan
5. Mampu memberi orientasi pada perkembangan budaya<sup>16</sup>.

Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat dan aturan-aturan khusus. Oleh karena itu kearifan lokal memiliki berbagai fungsi seperti:

1. Konservasi hutan
2. Pengembangan sumber daya manusia
3. Pengembangan dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan
4. Sebagai petunjuk, kepercayaan, sastra dan larangan
5. Bermakna sosial seperti upacara kerabat/integrasi komunal
6. Berpengaruh ke bidang sosial misalnya pada upacara daur pertanian
7. Berguna kepada etika dan moral
8. Penyucian roh leluhur
9. Bermakna politik<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Rahadiansyah, Trubus & A. Prayitno, *Transformasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Bangsa: Dialektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Lokal Genius*. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2011)

<sup>15</sup> Mariane, Irene, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid* (13)

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai instrumen pengetahuan dan praktik (aktivitas) pada suatu komunitas, baik yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat lainnya- untuk menyelesaikan secara baik, benar dan bagus persoalan dan/atau kesulitan yang dihadapi.

Terkait media komunitas adalah wujud nyata dari pendekatan pembangunan politik berbasis komunitas yang menekankan pada perangkat pengetahuan dan aktivitas suatu komunitas merespon isu-isu politik salah satunya adalah penyelengraan pemilu dan pengawasan yang partisipatif. Salah satu keunikan dari media komunitas ini adalah merupakan bagian dari artikulasi kepentingan komunitas dari akar rumput dan sebagai simbol kekuatan komunitas melakukan upaya-upaya untuk memberikan pengaruh terhadap perubahan sistem politik dan pemilu yang lebih berkeadilan dan peka perdamaian. Dengan demikian semakin jelas fungsi kearifan lokal tidak hanya memiliki fungsi sosial dan ekonomi namun juga memiliki fungsi politik yang taktis dan strategis.

Secara umum hasil penelitian ini menjelaskan bahwa suasana keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kalimantan Barat tahun 2020 cukup kondusif, meskipun ada beberapa kasus kecil yang terjadi yang cukup meresahkan dan menimbulkan rasa takut masyarakat untuk menggunakan hak politiknya. Seperti berita bohong seputar penanganan COVID-19, berita bohong tentang keterlibatan Gubernur dan berita bohong berbasis sentimen agama dan etnis. Secara umum ketersediaan sarana dan prasarana pendukung demi kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2020 di Kalimantan Barat sudah cukup baik. Meskipun masih ada kendala terkait penyediaan alat pelindung diri untuk menerapkan protokol kesehatan di kalangan penyelenggara dan pemilih.

Temuan lain juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat untuk menjaga situasi dan kondisi yang aman dalam setiap tahapan masyarakat dalam upaya edukasi dan pencegahan dini potensi pelanggaran pemilihan kepala daerah juga cukup baik yang ditandai dengan sinergi dan kerjasama antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat terutama kalangan masyarakat adat.

Adapun peran masyarakat adat dalam pemilihan kepala daerah di Kalimantan Barat tahun 2020 dijelaskan berdasarkan gambar 1 tentang deklarasi tokoh adat di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai mitra Bawaslu Kalimantan Barat dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dan pilkada damai.

Gambar 1 Deklarasi Tokoh Adat Mitra Bawaslu



Sumber foto : Riza dkk (2020) Bawaslu Kalbar 2020

Berdasarkan wawancara dengan salah satu komisioner Bawaslu Kalimantan Barat Bapak Faisal Riza, kesamaan visi mendorong Bawaslu menjalin kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra pengawasan. Hal ini ditandai dengan adanya kerjasama bersama masyarakat adat di Kabupaten Kapuas Hulu dalam Program Randau Ruai. Randau Ruai merupakan upaya membumikan semboyan “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu”. Setiap warga diajak dan dirangkul agar menjadi penggerak pengawasan partisipatif Pemilu di Kabupaten Kapuas Hulu, Bumi Uncak Kapuas.

Untuk menghadapi pemilihan kepala daerah di kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020, masyarakat adat dalam hal ini diwakilkan oleh Tokoh Adat menjadi Mitra Bawaslu. Tokoh Adat Mitra Bawaslu yang telah mendeklarasikan diri ini berasal dari 23 kecamatan dengan komitmen untuk menolak politik uang, politisasi SARA, ketidaknetralan aparat pemerintah, polisi maupun militer dan perangkat desa. Selain itu kerjasama ini juga bertujuan untuk mengawal pelaksanaan protokol kesehatan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 pada Pilkada 2020.

Pengawasan ini melibatkan tokoh adat di Kapuas Hulu yang berasal dari sejumlah suku. Ada Melayu, Dayak dengan berbagai subsuku, Tionghoa, Jawa, Sunda, dan etnik lain. Tidak hanya tokoh adat yang menandatangani deklarasi namun terdapat juga camat, komandan koramil, kepala polsek, dan ketua panwascam setempat. Deklarasi terdiri atas dua naskah kesepakatan. Naskah pertama memuat

komitmen bersama mengenai kesediaan mensosialisasikan, mencegah, mengendalikan, dan menerapkan standar protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19. Komitmen lainnya adalah kesiapan menjadi mitra Bawaslu dalam mengawali pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah di kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu deklarasi juga menjunjung tinggi komitmen bersama mewujudkan pemilihan kepala daerah kabupaten Kapuas Hulu yang aman, jujur, adil, bermartabat dan sehat.

Selain itu, masyarakat adat berkomitmen dalam menolak dan melawan politik uang, politisasi SARA, pemilih yang diwakilkan orang lain, ketidaknetralan aparatur pemerintah, Polri, TNI, serta perangkat desa. Naskah kedua memuat kesepakatan untuk menyosialisasikan, mencegah, mengendalikan, dan menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19, bekerjasama dengan tokoh adat di desa dan kecamatan masing-masing. Adapun materi undang-undang yang disosialisasikan adalah Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 69 tentang penyebaran isu SARA. Selanjutnya, mensosialisasikan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 70 dan pasal 71 tentang larangan keterlibatan aparatur sipil negara, TNI, Polri, Kepala desa dan perangkat desa dalam politik praktis. Selain itu, menyosialisasikan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 73 tentang larangan politik uang, dan Undang Undang Nomor 10 tahun 2016, pasal 178a tentang larangan pemilih yang diwakilkan kepada orang lain. Pengawasan partisipatif tersebut termasuk terhadap potensi manipulasi dan rekayasa serta berbagai kecurangan dalam proses pemungutan maupun penghitungan suara pemilihan kepala daerah kabupaten Kapuas Hulu.

Penguatan kearifan lokal Randau Ruai, ini searah dengan peribahasa masyarakat Dayak Kantuk, yakni “Batumkat ka adat basa, bapagai ka pengatur perkara” merupakan cermin dari ketiaatan masyarakat terhadap hukum adat. Adapun makna dari peribahasa itu bahwa setiap orang harus menghormati adat-istiadat dan mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan mereka. Salah satu contoh hukum adat yang diterapkan adalah kasus politik uang. Merespon kasus politik uang beberapa pemuka dan masyarakat adat di Kapuas Hulu telah mempersiapkan rancangan denda adat bagi pelaku politik uang. Ketua Adat Dayak Taman Desa Ariung Mendalam Nicolaus Saen mengatakan pelaku dapat dikenai sanksi senilai Rp75 juta. Adapun menurut Tokoh Adat Desa Nanga Tubuk Yulius Sabang, pelaku politik uang bisa dikenai sanksi senilai Rp15 juta. Bahkan pemberi (dalam politik uang) dapat didenda 50 kali lipat dari nilai uangnya, sedangkan penerima didenda 25 kali lipat dari nilai tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Abang Syarifuddin Punggawa Adat Melayu

Kecamatan Bunut Hilir. Adapun sebagian besar atau 90% hasil denda tersebut disetorkan kepada kas desa. Adapun selebihnya atau masingmasing 5% menjadi hak pelapor dan pengurus adat<sup>18</sup>.

Oleh karena itu kearifan lokal Randau Ruai ini menjadi sebuah cara hidup (*way of life*) budaya dipercayai mempunyai kekuatan alamiah dalam menata kehidupan dan hubungan social suatu masyarakat. Karena itu, pendekatan budaya seringkali dijadikan sebagai satu strategi penyelesaian konflik (Amirrachman, 2007). Kearifan lokal terdiri dari berbagai pengetahuan, pandangan, nilai serta praktik-praktek dari sebuah kelompok baik yang diperoleh dari generasi-generasi sebelumnya didalam komunitas tersebut, maupun yang didapat oleh komunitas tersebut di masa kini, yang tidak berasal dari generasi sebelumnya, tetapi dari berbagai pengalaman di masa kini, terkandung juga dari kontaknya dengan masyarakat atau budaya lain<sup>19</sup>.

Dengan demikian kearifan lokal menjadi perangkat pengetahuan dan aktivitas masyarakat yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya sebagai bagian dari pengalaman berinteraksi satu sama lain dan mengelola lingkungan sebagai upaya menyelesaikan berbagai persoalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

## REFERENSI

### Buku

- Ahimsa-Putra, Heddy. Shri. (2006). *Tradisi/Adat-Istiadat: Pemahaman dan Penerapannya, Materi pembekalan di Direktorat Tradisi*. Jakarta.
- Cangara, Hafied. (2009). *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Persada
- Creswell W. John. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Entman, R. (1989). *Democracy without Citizen: Media and the Decay of American Politics*. New York: Oxford University Press
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge: Polity Press
- Mariane, Irene. (2014). *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Murdock, G & Golding, P. (1989). *Information Poverty and Political Inequality*:

<sup>18</sup> Riza, Faisal dkk, *Hukum Adat Cegah Politik Uang. Seri Pengawasan Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal*. (Pontianak: Bawaslu Kalbar, 2020).

<sup>19</sup> Ahimsa-Putra, Heddy. Shri. *Tradisi/Adat-Istiadat: Pemahaman dan Penerapannya*, (Jakarta: Materi pembekalan di Direktorat Tradisi, 2006)

- Citizenship in the Age of Privatized Communication.* Journal of Communication . Vol.39 (3), 180-195/
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* (2019). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Rahadiansyah, Trubus & A. Prayitno. (2011). *Transformasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Bangsa: Dialektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Lokal Genius.* Jakarta: Universitas Trisakti
- Riza, Faisal dkk. (2020). *Hukum Adat Cegah Politik Uang. Seri Pengawasan Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal.* Pontianak: Bawaslu Kalbar
- Rush, Michael dan Althoff, Philip. (1997). *Pengantar Sosiologi Politik.* Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Sarwono, Bagus. (2014). *Teknis Media Massa dan Ormas dalam Pengawasan Partisipatif Guna Mendukung Pegawasan Pemilu dalam Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan.* Yogjakarta: Bawaslu DIY
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.* Bandung: Refika Aditama

### Internet/Website

Bawaslu, Kalbar. (2021, November 01). Rekap Dugaan Pelanggaran. Kalbar.bawaslu.go.id.  
<https://kalbar.bawaslu.go.id/2020/11/11/rekap-duggan-pelanggaran-per-11->

### Modul

Bawaslu RI. (2012). *Modul Bimbingan Teknis Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.* Jakarta: Bawaslu RI



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

## **HARMONI KOMUNIKASI LINTAS AGAMA BERBASIS EKONOMI DAN RITUAL: STUDI FENOMENOLOGI PADA KOMUNITAS MUSLIM DAN HINDU DI DESA LINGSAR, KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**Kadri<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Mataram; kadri@uinmataram.ac.id

\* Correspondence: kadri@uinmataram.ac.id

**Abstract:** This study aims to reveal the communication that takes place between the Muslim and Hindu communities in Lingsar Village, West Lombok Regency, Indonesia who make use of the Lingsar Park area at the same time and together. Through phenomenological approach, this study has found that the Muslims and Hindus in Lingsar utilize the space available in Lingsar Park together for economic and ritualistic purposes. The two religious communities are able to share the available space as a work place, use the crops from farming for the performance of rituals together and utilize the Lingsar Park retribution money in turn. In a social context they utilize the public facilities in Lingsar Park together without conflict. The Muslim and Hindu communities also utilize the ritualistic facilities available in line with their purpose. The Hindu community pray in Gaduh Temple and at the same time the Muslim community perform cultural and religious rituals in a place that is available in the Kemaliq complex. They also use the same place to perform *Perang Topat* as a united cultural ritual in an atmosphere of joyfulness and spirit of togetherness. The high tolerance of the Muslim and Hindu communities enables them to succeed in sharing the space at Lingsar Park while at the same time making this a pleasant public space.

**Abstrak:** Studi ini bertujuan mengungkap komunikasi antara umat Muslim dan Hindu di Desa Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Indonesia sembari memanfaatkan keberadaan Taman Lingsar sebagai ruang bersama. Lewat pendekatan fenomenologi, studi ini menemukan bahwa umat Muslim dan Hindu di Lingsar memanfaatkan secara bersama ruang yang tersedia di Taman Lingsar untuk kepentingan ekonomi dan ritual. Kedua umat beragama bisa berbagi ruang yang tersedia secara baik sebagai tempat usaha, memanfaatkan hasil perkebunan untuk penyelenggaraan ritual bersama dan mengelola retribusi yang ada di taman Lingsar secara bergantian. Dalam konteks sosial, mereka memanfaatkan fasilitas umum yang ada di Taman Lingsar secara bersamaan tanpa ada konflik. Umat Islam dan Hindu juga memanfaatkan fasilitas ritual yang tersedia sesuai dengan keperuntukannya. Umat Hindu beribadah di Pura Gaduh, dan pada saat bersamaan umat Islam melaksanakan ritual budaya dan agama di salah satu tempat yang tersedia di kompleks Kemaliq Lingsar. Mereka juga menggunakan ruang yang sama untuk menggelar *Perang Topat* sebagai ritual budaya bersama dalam suasana riang gembira di bawah semangat kebersamaan. Toleransi yang tinggi dari umat Islam dan Hindu membuat mereka sukses berbagi ruang di Taman Lingsar, sekaligus menjadikannya sebagai ruang publik yang menyenangkan.

**Kata Kunci:** Harmoni komunikasi, ekonomi dan ritual, Lingsar Lombok, Muslim, Hindu

## 1. Latar Belakang

Menyaksikan fenomena kehidupan plural di Indonesia bukanlah hal yang sulit karena bangsa ini dihuni oleh rakyat yang memiliki agama, suku dan budaya yang berbeda. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menunjukkan bahwa 86,7% penduduk Indonesia beragama Islam, 10,72% beragama Kristen, 1,74% menganut Hindu, 0,77% Buddha, 0,03% Konghucu, dan 0,04% aliran kepercayaan atau agama lainnya. Meskipun wilayah di Indonesia didiami oleh beragama agama, namun tidak banyak ditemukan warga berbeda agama dapat berbagi peran dalam pengelolaan aset bersama, berbagi ruang untuk melaksanakan ritual di kawasan yang sama, dan melaksanakan ritual budaya secara kolaboratif. Fenomena ini antara lain dapat dilihat dalam komunikasi antarumat Islam dan Hindu di kompleks Taman Lingsar, Desa Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemandangan yang toleran seperti ini berlangsung turun temurun dan masih dipertahankan hingga kini dalam kondisi penuh harmoni (Suhadah dkk, 2021).

Taman Lingsar merupakan kompleks seluas 26 Ha yang di dalamnya terdiri dari tempat sembahyang umat Hindu, tempat ritual umat Islam, sumber mata air, danau kecil, kolam ikan, ruang terbuka hijau, perumahan Amangku Lingsar (Muslim) dan Mangku Hindu. Taman Lingsar dibangun pada tahun 1759 saat zaman Raja Anak Agung Gede Ngurah, keturunan Raja Karangasem Bali yang sempat berkuasa di sebagian pulau Lombok pada abad ke-17 silam (Sastrodiwiryo, 1996). Raja Karangasem dikenal sebagai sosok yang toleran dan menghargai budaya serta kearifan lokal masyarakat Sasak. Paling tidak hal ini ditunjukkannya saat ia mempertahankan keberadaan *Kemaliq* sebagai pusat ritual dan tempat yang dikeramatkan oleh umat Muslim Lingsar.

Raja Karangasem juga mengakui keberadaan pemangku adat Lingsar atau yang dikenal oleh etnik Sasak dengan istilah *Amangku*. Amangku Lingsar bertugas sebagai pemimpin ritual budaya Sasak yang berlangsung dalam kompleks Taman Lingsar. Ritual budaya Sasak seperti *Perang Topat* (saling melempar menggunakan ketupat kecil dalam suasana riang gembira) pun dipertahankan oleh kerajaan Karangasem saat berkuasa. Kearifan sang raja untuk membangun kebersamaan lintas agama terlihat dari suasana inklusif di Taman Lingsar hingga saat ini.

Kekuasaan kerajaan Karangasem di wilayah Lombok bagian Barat tidak hanya meninggalkan komunitas etnik Bali yang beragama Hindu di Lingsar tetapi juga mewariskan nilai-nilai yang baik sebagai modal sosial bagi warga Lingsar. Berdasarkan

data Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Lombok Barat tahun 2016, terdapat 4.033 orang umat Hindu dan 73.653 orang warga Muslim yang ada di kecamatan Lingsar. Warga Lingsar yang beragama Islam dan Hindu mempraktekkan sikap inklusif seperti yang dicontohkan oleh raja Karangasem dengan terus menjaga keharmonisan.

Toleransi yang terus ditunjukkan oleh umat Hindu dan Muslim di Lingsar memberi kontribusi terciptanya kehidupan yang damai di wilayah mereka. Oleh karena itu tidak pernah terjadi konflik komunal yang melibatkan umat Hindu dan Muslim di Desa Lingsar. Mereka tidak terpengaruh dengan konflik yang melibatkan umat Hindu dan Muslim pada wilayah lain di Nusa Tenggara Barat, seperti konflik di Kabupaten Sumbawa tahun 2013, di Kota Mataram tahun 2014 dan 2017 (Miftah dkk, 2018). Umat Muslim dan Hindu di Lingsar justru memperlihatkan kebersamaan mereka dalam beraktivitas dan di Taman Lingsar.

Menghadirkan suasana harmoni dan komunikasi efektif saat penggunaan ruang yang sama oleh dua komunitas berbeda agama seperti yang dilakukan oleh umat Islam dan Hindu di Taman Lingsar bukanlah hal yang mudah. Biasanya toleransi antarumat beragama hanya ditunjukkan dengan cara menghargai perbedaan sembari menggunakan ruang masing-masing tanpa saling mengganggu. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh umat Muslim dan Hindu di Desa Lingsar, mereka menggunakan ruang yang sama untuk melaksanakan ritual budaya, berbagi peran dalam mengelola ruang yang sama (Taman Lingsar di Desa Lingsar).

Kebersamaan umat Muslim dan Hindu di Taman Lingsar menunjukkan bahwa perbedaan agama bukan menjadi hambatan dalam menghadirkan kehidupan harmonis. Tidak adanya konflik komunal antara umat Muslim dan Hindu di Lingsar mengindikasikan minimnya stereotip atau prasangka dari mereka ketika menilai kelompok atau agama lain. Effendy (2003) menyebut prasangka sebagai salah satu hambatan terwujudnya komunikasi efektif, dan Liliweri (2003) menilai bahwa ketidakefektifan hubungan (komunikasi) antaretnik antara lain disebabkan oleh adanya stereotip (prasangka).

Perbedaan budaya, etnik, dan agama dari masing-masing anggota komunitas seringkali menjadi faktor penghambat komunikasi efektif bila hal tersebut tidak dikelola dengan baik atau bila siapa pun yang ada di dalamnya tidak saling memahami dan berterima. Konflik sosial yang pernah terjadi di tanah air acap kali dilatari oleh ketidakmampuan pelakunya untuk saling memahami perbedaan di antara mereka, seperti perbedaan agama dan etnik. Perbedaan agama menurut St. John R.P.

Hutabarat (2005) dapat saja menjadi aset atau beban, terletak bagaimana cara mengelola perbedaan itu.

Umat Muslim dan Hindu di Desa Lingsar termasuk dalam kategori komunitas berbeda agama dan etnik yang bisa saling memahami dan berbagi ruang dan peran tanpa konflik (Suhadah, 2022). Bila komunitas Muslim dan Hindu bisa berbagi ruang secara harmonis, lalu bagaimana cara dan strategi mereka dalam berkolaborasi dan memanfaatkan ruang dalam kegiatan ekonomi dan ritual di Taman Lingsar khususnya dan di Desa Lingsar pada umumnya? Riset ini menjawab pertanyaan tersebut dengan mengungkap harmoni komunikasi antara komunitas Muslim dan Hindu di Desa Lingsar saat mereka berkolaborasi dalam aktivitas ekonomi dan kegiatan ritual (terutama ritual budaya).

## 2. Metode

Untuk mengungkap harmoni komunikasi komunitas Muslim dan Hindu dalam bidang ekonomi dan ritual, riset ini menggunakan pendekatan fenomenologi, terutama dalam menggali pemaknaan masing-masing umat beragama (Islam dan Hindu) terhadap interaksi sosial (terutama ekonomi) dan ritual yang mereka lakukan di Taman Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Fenomenologi sebagai tradisi penelitian menurut Collin (Basrowi dan Sukidin, 2002) berusaha mengungkap pemahaman informan terhadap fenomena yang muncul dalam kesadarannya, serta fenomena yang dialami informan dan dianggap sebagai entitis-sesuatu yang ada dalam dunia.

Data dikumpulkan sejak tahun 2019 hingga akhir tahun 2020 lewat pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengamatan difokuskan pada fenomena pemanfaatan Taman Lingsar sebagai ruang bersama antara umat Islam dan Hindu. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pemaknaan masing-masing umat beragama terhadap setiap aktivitas ekonomi dan ritual serta interaksi antarumat beragama yang dilakukan warga Muslim dan Hindu di Desa Lingsar umumnya dan Taman Lingsar khususnya. Sedangkan dokumentasi diperlukan untuk mengiventarisir dokumen terkait dengan fokus penelitian.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan mengikuti tiga tahap analisis data dari Miles dan Huberman (1992) yaitu; reduksi data, penyajian (*display*) data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Semua hasil penelitian telah dikonfirmasi dan mendapat persetujuan informan sehingga tingkat akurasi data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan

### 3. Hasil Penelitian

#### **Berbagi Ruang untuk Kepentingan Ekonomi**

Keberadaan Taman Lingsar dapat memberi kontribusi ekonomi bagi umat Hindu dan Muslim di Desa Lingsar. Mereka berbagi ruang dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Taman Lingsar. Sebagai contoh, hasil penjualan buah-buahan yang ada di kawasan Taman Lingsar dimanfaatkan bersama untuk membiayai pelaksanaan ritual di dalam kompleks Taman Lingsar. Nengah Kana (wawancara, 2019), yang bertugas sebagai penjaga kebun dan rumah penyimpanan perlengkapan upacara agama Hindu di Lingsar mengakui kalau dirinya dan suami selalu memanen buah mangga dan manggis serta buah lainnya yang ada di Taman Lingsar, kemudian menjualnya untuk keperluan acara atau ritual budaya dan agama di Taman Lingsar.

Pembagian tanah garapan antar Amangku (tokoh adat) Sasak dengan Mangku Hindu Bali juga telah menjadi kebijakan turun-temurun yang diperuntukkan bagi pengelola dan tokoh adat yang bertugas di Taman Lingsar. Amangku Lingsar, Suparman (wawancara, 2020) mengatakan bahwa meski hak kepemilikan kompleks Taman Lingsar atas nama Lembaga Krama Pura, namun sebagai Amangku Lingsar, ia mendapat hak garap atas tanah warisan kerajaan Karangasem yang dikelola oleh Lembaga Krama Pura Lingsar. Pengakuan yang sama disampaikan salah seorang tokoh agama Hindu di Lingsar, Mangku Putra (wawancara, 2020). Menurutnya, pemberian hak garap tanah pecatu untuk Amangku Kemaliq Lingsar telah menjadi komitmen sejak lama.

Pengelolaan Taman Lingsar yang menghasilkan uang pun dikelola secara adil oleh komunitas Muslim dan Hindu. Dalam pengelolaan parkir misalnya, secara bergantian petugas parkir yang beragama Hindu dan Islam bergantian. Kebersamaan juga terlihat pada sektor perdagangan, khususnya pedagang kaki lima yang berjualan di dalam Taman Lingsar. Pedagang kaki lima tidak hanya berasal dari warga Muslim tetapi juga dari warga Hindu yang ada di Lingsar. Mereka terlihat akur dan membaur seperti layaknya sesama pedagang serta bisa berbagi ruang yang ada di Taman Lingsar secara baik dan penuh pengertian.

Sumbangan sukarela dari wisatawan yang masuk ke dalam kompleks Kemaliq Lingsar juga menjadi penghasilan tersendiri bagi warga Muslim. Sumbangan tersebut diberikan wisatawan saat mengembalikan selendang kuning yang diikatkan di pinggang setiap pengunjung yang hendak masuk dalam Kemaliq Lingsar. Menurut penjaga Kemaliq, Bapak Sofi (wawancara, 2019) bahwa uang sumbangan wisatawan

tersebut tidak hanya untuk insentif petugas dan dana pemeliharaan Kemaliq tetapi juga disumbangkan untuk keperluan perayaan ritual *Perang Topat* setiap tahunnya.

Taman Lingsar telah menjadi ruang publik yang dimanfaatkan bersama untuk mendukung aktivitas keseharian warga Hindu dan Muslim di Desa Lingsar. Mereka mandi dan mencuci pada pancoran air yang sama layaknya satu keluarga besar. Intensitas pertemuan antara umat Muslim dan Hindu pada fasilitas dan ruang publik yang sama di kompleks Taman Lingsar semakin mempererat hubungan mereka. Bapak Gilang (wawancara, 2019), salah seorang warga Muslim di Lingsar mengakui kalau umat Hindu seperti saudara sendiri sehingga tidak ada jarak di antara mereka dalam berinteraksi sosial. Hal serupa diakui oleh Pak Wayan (wawancara, 2020), warga Hindu di Lingsar yang mengatakan bahwa sejak dirinya menjadi warga Lingsar tidak pernah memiliki persoalan dengan warga yang beragama Islam karena baginya, umat Islam seperti saudaranya sendiri sehingga ia selalu bersedia untuk berbagi dan hidup bersama dengan penuh toleransi bersama umat Islam di Lingsar.

### ***Taman Lingsar sebagai Ruang Ritual Bersama***

Berdasarkan sejarah pembangunannya, Taman Lingsar didesain untuk beberapa kepentingan seperti fungsi sosial sebagai tempat rekreasi dan interaksi sosial, fungsi ekonomi seperti perkebunan dan sumber air untuk kepentingan pertanian, dan fungsi ritual sebagai pusat ritual keagamaan dan ritual budaya. Keberadaan Kemaliq dan Pura Gaduh di dalam Taman Lingsar semakin mempertegas fungsi Taman Lingsar sebagai pusat ritual agama dan budaya.

Kemaliq adalah tempat yang menjadi sumber mata air yang dikeramatkan oleh sebagian warga Muslim di Lingsar dan daerah lainnya di Pulau Lombok. Dikeramatkannya Kemaliq oleh sebagian masyarakat Muslim Sasak karena diyakini sebagai tempat menghilangnya Datu Milir, wali pembawa Islam di wilayah Lombok. Oleh karena itu tidak heran bila Kemaliq juga dijadikan sebagai tempat ziarah dan memohon do'a kepada Tuhan. Kemaliq juga dikeramatkan oleh umat Hindu dengan melakukan ritual tertentu di tempat tersebut sebelum sembahyang di Pura Gaduh, yang ada di sebelah Utara Kemaliq. Menurut Sastrodiwiryo (1996), penataan Kemaliq Lingsar dan pembangunan Pura Gaduh dilakukan bersamaan dengan pembangunan Taman Lingsar pada tahun 1759 saat zaman Raja Anak Agung Gede Ngurah, keturunan Raja Karangasem Bali yang sempat berkuasa di sebagian pulau Lombok pada abad ke-17 silam. Keberadaan Pura Gaduh yang menjadi tempat ritual umat

Hindu, dan Kemaliq Lingsar yang dijadikan sebagai tempat ritual dan dikeramatkan oleh sebagian warga Sasak yang beragama Islam membuat nuansa toleransi di Taman Lingsar terlihat sangat jelas.

Karangasem dikenal sebagai kerajaan yang toleran terhadap persoalan agama dan budaya. Hal ini ditunjukkan ketika menduduki wilayah Lombok bagian Barat pada abad ke-17. Agama Islam yang dianut dan budaya yang dipegang teguh oleh warga setempat (Sasak) tidak dipersoalkan. Budiwanti (2000) menyebut bahwa pemerintahan orang-orang Bali di Mataram sebenarnya sudah memperlihatkan kearifan dan toleransi yang besar terhadap penduduk lokal, yang antara lain ditunjukkan dengan membiarkan penduduk setempat tetap memeluk dan mempraktikkan ajaran Islam. Oleh karena itu tidak salah bila dikatakan bahwa kerajaan Karangasem telah mewariskan sikap toleransi pada masyarakat Lingsar yang hingga saat ini tetap konsisten dijalankan oleh umat Islam dan Hindu di Desa Lingsar.

Taman Lingsar sebagai ruang ritual bersama antara umat Muslim dan Hindu setidaknya terlihat dalam tiga jenis ritual. *Pertama*, ibadah. Di saat umat Hindu melaksanakan sembahyang di Pura Gaduh, umat Islam yang sedang berkunjung di Kemaliq dan umat Muslim yang sedang berada di Taman Lingsar juga melaksanakan ibadah sholat. Di dalam Kemaliq Lingsar disediakan satu bangunan kecil dan sederhana yang diperuntukkan sebagai tempat sholat. Kedua umat beragama bisa berbagi ruang secara tertib dengan menjunjung tinggi toleransi tanpa saling mengganggu.

Suasana keragaman di Taman Lingsar sangat terlihat saat umat Hindu yang sedang sembahyang diiringi suara lonceng dan gamelan di Pura Gaduh, sementara di salah satu sudut kompleks Kemaliq beberapa orang umat Islam sedang melaksanakan sholat. Masing-masing umat beragama menunjukkan toleransi dan saling menghargai dengan cara tidak saling mengganggu saat beribadah. Salah seorang Mangku Putra (wawancara, 2019) mengakui adanya komitmen antara umat Islam dan Hindu di Lingsar untuk saling menghormati. Mangku Hindu ini mencontohkan, bila azan berkumandang maka suara gamelan dan lonceng diberhentikan, termasuk selama bulan Ramadhan bunyi gamelan juga dikurangi karena menghargai umat muslim yang sedang berpuasa.

*Kedua*, ritual *mekamit*. Ritual ini termasuk dalam kategori ritual budaya dengan cara menginap di kompleks Kemaliq Lingsar selama beberapa hari sesuai dengan *nazar* (niat) yang telah diikrarkan sebelumnya. ritual ini tidak hanya dilakukan oleh

umat Hindu tetapi juga umat Islam, baik yang berasal dari Lingsar maupun dari daerah lainnya. Suasana *mekamit* menjadi sisi lain keragaman ritual yang berlangsung di lingkungan Kemaliq khususnya dan Taman Lingsar pada umumnya. Interaksi antarumat beragama yang penuh toleransi terlihat jelas saat umat Hindu dan Islam sama-sama mengikuti ritual *mekamit*. Mereka juga saling berbagi kebutuhan makanan dan keperluan harian lainnya selama mejalani ritual *mekamit*.

Keterbatasan ruang di kompleks Kemaliq membuat setiap orang yang melaksanakan *mekamit* berkumpul dengan yang lainnya pada satu tempat yang tidak berjauhan. Dalam kondisi seperti ini terjadi interaksi antara pelaku *mekamit* Hindu dan Islam. Salah seorang pelaku mekamit dari umat Hindu, Ibu Ketut (wawancara, 2019) mengungkapkan bahwa dirinya selalu melakukan ritual mekamit untuk membayar utang janjinya bila usaha dagangnya sukses. Ibu Ketut sudah biasa bertemu dengan warga Muslim di Taman Lingsar sehingga aktivitas saling membantu dengan umat Islam sudah lumrah baginya.

Warga Muslim dan Hindu yang berziarah di Kemaliq Lingsar juga bersepakat tentang tempat penitipan dan pemanfaatan hewan nazar dari siapapun yang berziarah atau mekamit di Kemaliq Lingsar. Salah seorang Mangku Hindu, Pak Made (wawancara, 2019) mengatakan bahwa sudah menjadi kesepakatan antara tokoh adat Bali dan tokoh adat Sasak di Lingsar bahwa bila ada umat Hindu atau umat Islam yang membawar nazar berupa hewan piaraan seperti kambing dan ayam harus menyerahkannya ke Amangku Kemaliq. Hewan-hewan tersebut akan dipergunakan antara lain untuk kebutuhan pembiayaan ritual budaya *Perang Topat*.

*Ketiga*, ritual *Perang Topat*. Ritual tahunan ini sangat jelas menunjukkan pemanfaatan ruang bersama antara umat Islam dan Hindu. Kedua umat beragama tersebut juga memperlihatkan kearifan mereka dalam membagi peran saat menjalankan setiap prosesi ritual perang topat. *Perang Topat* merupakan ritual budaya yang telah menjadi tradisi turun temurun yang dilakukan satu kali dalam setiap tahun oleh masyarakat Muslim suku Sasak di Desa Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Biasanya ritual tersebut berlangsung pada hari ke-15 bulan ke tujuh pada penanggalan Sasak Lombok, yang disebut *purnama sasih kepitu* (*Purnama* bulan ketujuh), atau hari ke 15 bulan ke enam pada penanggalan Hindu Bali, yang disebut *purnama sasi kenem* (*Purnama* bulan keenam). Ritual budaya *Perang Topat* dilakukan dengan cara saling melempar menggunakan ketupat berukuran kecil dalam suasana riang gembira. *Perang Topat* yang dipusatkan di Taman Lingsar ini juga melibatkan umat Hindu

karena pada saat yang bersamaan mereka melaksanakan ritual *puja wali* dalam rangka ulang tahun Pura Gaduh. Kesamaan waktu ritual inilah yang membuat kedua warga berbeda etnik dan agama tersebut membaur dan terlibat dalam perang topat.

Kolaborasi juga mereka tunjukkan saat pelaksanaan ritual pra dan pasca *Perang Topat*. Sebulan sebelum *Perang Topat*, kedua etnik telah melakukan koordinasi untuk menyiapkan ritual *Perang Topat* secara maksimal. Sehari sebelum *Perang Topat*, ada ritual penjemputan air suci oleh umat Hindu. Dalam prosesi ini, belasan pemuda Muslim dengan pakaian seragam menyerupai pejuang kemerdekaan terlibat sebagai barisan pengawal di bagian terdepan. Salah seorang pasukan pengawal, Udin (wawancara, 2019) mengungkap pengalamannya yang setiap tahun menjadi pasukan pengawal saat *Perang Topat*. Menurutnya, orang Hindu tidak mau jalan untuk mengambil air suci sebelum pasukannya berada di barisan terdepan. Pak Udin dan kawan-kawannya terus bertugas mengawal ritual *Perang Topat* sampai selesai.

Prosesi dilanjutkan dengan ritual *keliling kaoq*, yakni prosesi mengarak kerbau untuk mengelilingi kompleks Pura dan Kemaliq Lingsar. Dua kerbau yang diarak keliling tersebut masing-masing milik umat Muslim dan umat Hindu yang akan disembelih keesokan harinya untuk kebutuhan konsumsi saat pelaksanaan ritual *Perang Topat*. Pilihan kerbau juga menjadi bentuk toleransi umat Islam terhadap umat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Dalam dua ritual pra *Perang Topat* ini kedua umat beragama berbagi peran dalam melaksanakan ritual budaya di Taman Lingsar.

Umat Islam dan Hindu di Lingsar juga sudah sepakat menunjuk penjegal (pemotong) kerbau dari Muslim. Kerbau milik umat Islam dan umat Hindu disembelih secara Islam oleh penjegal Muslim. Hal ini menurut Mangku Hindu, Pak Putra (wawancara, 2019) agar daging kerbau bisa dikonsumsi oleh semua orang, karena bila dipotong secara Islam oleh warga Muslim akan dijamin kehalalannya, dan tidak ada keraguan sedikitpun untuk memakannya. Sebagaimana biasa, daging kerbau dari umat Hindu sebagian dibagikan pada warga Muslim untuk dimakan bersama saat acara puncak ritual *Perang Topat*. Kolaborasi seperti ini tetap dipertahankan dalam setiap ritual *Perang Topat* sehingga ikatan kebersamaan antara umat Islam dan Hindu di Lingsar masih terus terpelihara.

Hari pelaksanaan ritual *Perang Topat* benar-benar dimanfaatkan oleh umat Islam dan Hindu untuk menunjukkan kekompakan dan toleransi. Meski mereka terlibat

saling melempar menggunakan ketupat kecil tetapi semangat toleransi tetap terjaga karena semua dilakukan dalam perasaan riang gembira. Lewat ritual *Perang Topat* kedua komunitas berbeda agama (Islam dan Hindu) menunjukkan kebersamaannya dalam menjalankan ritual bersama di ruang publik. Ritual tersebut tidak hanya disaksikan oleh masyarakat lokal, tetapi juga oleh wisatawan domestik (nasional) dan internasional. Kebersamaan juga masih diperlihatkan oleh Umat Islam dan Hindu saat melakukan ritual pasca *Perang Topat*, yaitu ritual *beteteh* (pembersihan dan pembuangan sisa sampah perang topat) ke Sarasuta (nama salah satu tempat yang ada di Lingsar). Kedua umat beragama menunjukkan kekompakannya saat berjalan sepanjang 700meter dari Taman Lingsar menuju kali Sarasuta.

#### 4. Pembahasan

Keberadaan umat Islam dan Hindu di Desa Lingsar saat ini merupakan produk sejarah karena mereka memiliki ikatan sejarah kebersamaan sejak hadirnya kerajaan Karangasem di pulau Lombok pada abad ketujuh belas. Mereka sadar dengan sejarah tersebut dan kesadaran sejarah itulah yang antara lain menjadi referensi mereka dalam berinteraksi dan berkomunikasi lintas agama di ruang publik seperti di Taman Lingsar. Pertimbangan-pertimbangan subjektif dalam berhubungan dengan orang lain merupakan salah satu ciri manusia sebagai makhluk sosial. Subjektifitas manusia dalam berkomunikasi disebut Weber (Schutz, 1972: 15) sebagai tindakan sosial, yaitu segala perilaku seseorang ketika dan sejauh yang bersangkutan memberi makna subjektif terhadap perlakunya tersebut.

Umat Islam dan Hindu di Lingsar senantiasa mengorientasikan setiap perlakunya terhadap individu lainnya yang berbeda agama dengannya atau sejalan dengan criteria dari Charon (1979: 127) yakni “*when the individual orients his or her acts to others besides self*”. Sebagai makhluk sosial yang memiliki kemauan bebas, warga Muslim dan Hindu di Lingsar juga melakukan aktivitas atas tafsiran-tafsiran subjektifnya. Hal ini sejalan dengan pemaknaan lain dari tindakan sosial manusia dari Weber (Mulyana, 2001: 61) dengan mengatakan bahwa tindakan manusia pada dasarnya bermakna, melibatkan penafsiran, berpikir, dan kesengajaan. Tindakan sosial adalah tindakan yang disengaja, yakni disengaja bagi orang lain dan bagi sang aktor sendiri, di mana pikiran-pikirannya aktif saling menafsirkan perilaku orang lainnya, berkomunikasi dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.

Kesadaran akan sejarah hidup membuat umat Islam dan Hindu di Lingsar mengetahui relasi di antara mereka. Sikap toleransi dan kebersamaan yang telah dicontohkan oleh raja Karangasem diasumsikan berkontribusi pada sikap toleransi dan kebersamaan yang ditunjukkan oleh umat Islam dan Hindu di Lingsar saat ini. Meski berbeda agama dan etnik tetapi mereka diikat oleh sejarah kebersamaan dibawah kepemimpinan Raja Karangasem. Ikatan ini menjadi irisan kebersamaan yang mengefektifkan komunikasi umat Islam dan Hindu saat ini di Taman Lingsar. Komunikasi yang efektif menurut Mulyana (2002) bila orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan latar dan kondisi sosial budaya.

Kesamaan latarbelakang sejarah sebagai warga Lingsar juga membuat umat Islam dan Hindu bisa saling menghargai sekaligus meminimalisir prasangka dan stereotip di antara mereka karena prasangka sebagai salah satu hambatan terwujudnya komunikasi efektif (Effendy, 2003) atau yang disebut oleh Purwasito (2015) sebagai penghambat potensial dalam komunikasi antarbudaya. Di antara masyarakat yang berbeda budaya cenderung ber-stereotip terhadap masyarakat yang berbudaya lain. Terkait dengan hal tersebut, Liliweri (2003) mempertegas bahwa ketidakefektifan hubungan (komunikasi) antaretnik antara lain disebabkan oleh adanya stereotip (prasangka). Keharmonisan antara umat Islam dan Hindu di Lingsar hingga saat ini menunjukkan tidak dominanya stereotip dalam pikiran mereka saat berkomunikasi antaragama di Desa Lingsar.

Efektifitas komunikasi umat Islam dan Hindu di Lingsar juga terkait dengan kondisi ruang taman Lingsar yang baik. Kondisi taman lingsar yang asri dengan ruang terbuka hijau yang luas dan suhu udara yang dingin diasumsikan berpengaruh bagi keharmonisan komunikasi antara umat Islam dan Hindu selama beraktivitas sosial dan spiritual di kompleks Taman Lingsar. Dalam kajian komunikasi ruang atau *proxemics*, antara lain dijelaskan adanya hubungan antara kondisi lingkungan dengan pikiran dan kenyamanan manusia dalam berkomunikasi. Eksperimen Maslow dan Mintz (dalam Rich, 1974) menunjukkan bahwa perbedaan persepsi setiap orang terhadap satu objek karena mereka berada pada suasana lingkungan yang berbeda. Konflik antara umat Islam dan Hindu di Kota Mataram menurut riset Suprapto (2013) antara lain disebabkan oleh makin berkurangnya ruang publik (*public spaces*) seperti ruang terbuka hijau, sarana olahraga dan kesenian yang menjadi tempat semua komunitas berinteraksi dan mempererat ikatan sosial tanpa dihalangi oleh unsur primordial seperti agama dan suku.

Umat Islam dan Hindu berbagi ruang di Taman Lingsar antara lain dengan cara merayakan ritual budaya bersama, seperti perang topat. Keterlibatan mereka dalam perang topat tidak hanya bermanfaat untuk memupuk atau memperkuat ikatan kebersamaan tetapi juga sebagai bentuk komunikasi kedua umat beragama dalam mempertahankan sekaligus mensosialisasikan ritual budaya nenek moyang mereka kepada generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu, semakin eksis masyarakat Lingsar menyelenggarakan ritual perang topat maka semakin konsisten mereka mentransfer budaya pada generasi baru yang ada di Lingsar. Kebudayaan menurut Sendjaja (1994) diciptakan dan dipertahankan melalui aktivitas komunikasi oleh seluruh anggota komunitas secara kolektif.

Adanya ritual budaya bersama dan tingginya tingkat toleransi antaragama yang dipraktekkan oleh umat Islam dan Hindu di Taman Lingsar menjadi landasan empirik untuk membangun argumentasi bahwa hubungan antaragama yang dipraktekkan dengan baik oleh pengikutnya sangat berkontribusi menghadirkan suasana harmoni dalam satu tempat sebagai ruang universal yang digunakan untuk berdiskusi, bermain, dan mengekspresikan banyak hal secara bersama, atau yang oleh Habermas (Wibowo, 2010) disebut sebagai ruang publik. Oleh karena itu, Taman Lingsar tidak hanya dimaknai sebagai ruang publik fisik tetapi juga ruang publik nonfisik yang diciptakan oleh dorongan sikap religiusitas yang inklusif dari pemeluk agama (dalam konteks studi ini adalah Islam dan Hindu).

Harmoni komunikasi antara warga Muslim dan Hindu di bidang ekonomi antara lain dapat dilihat dari geliat usaha pedagang kecil di kompleks Taman Lingsar yang makin hidup saat berlangsung ritual budaya *Perang Topat*. Ritual tahunan yang dipusatkan di Taman Lingsar ini memiliki banyak rangkaian acara pendukung yang dilaksanakan sebelum dan sesudah puncak ritual seperti pertandingan *presean* (olahraga bela diri tradisional suku Sasak), konser musik, wayang kulit suku Sasak, tarian Bali, dan beberapa acara hiburan lainnya. Acara hiburan yang berlangsung selama sepuluh hari ini telah menghadirkan banyak pedagang kecil musiman dari umat Muslim dan Hindu. Mereka mengambil keuntungan dari banyaknya penonton yang belanja sambil menikmati pelbagai hiburan yang disuguhkan di Taman Lingsar. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ritual budaya bersama seperti *Perang Topat* bisa mendorong spirit kerjasama di bidang ekonomi, sekaligus berkontribusi untuk peningkatan ekonomi para pedagang kecil, sebagaimana dampak ekonomi dari setiap penyelenggaraan ritual budaya lainnya (Bracalente dkk, 2011).

Harmoni antara warga Muslim dan Hindu yang berbasis sosial dan ekonomi sebagaimana yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa kepentingan yang sama dari masing-masing umat beragama terhadap mobilitas sosial dan akses ekonomi menjadi pengikat integrasi sosial dan harmoni yang tercipta dari mereka. Realitas ini meneguhkan pandangan teori integrasi sosial yang menyatakan *common norms*, *common interests*, dan *common values* adalah sesuatu yang sangat penting bagi integrasi sosial lebih lanjut (Bello, 2011). Asumsi tersebut diperkuat oleh temuan Wirata (2015) yang menyebut bahwa *Perang Topat* merupakan ritual bersama umat Islam dan Hindu yang menunjukkan nuansa kebersamaan secara simbolik yang dapat dijadikan sebagai kekuatan sosial dalam melanjutkan kehidupan sosial bersama antara warga Muslim dan Hindu.

Aspek komunikasi yang intens antara warga Muslim dan Hindu selama menjadi warga Lingsar dan saat ritual budaya *Perang Topat*, termasuk kala mereka berkolaborasi secara ekonomi menjadi perekat harmoni meskipun mereka berbeda agama dan etnik. Agama memang diakui sebagai suatu kekuatan penting bagi setiap orang dan selalu menjadi referensi dalam kehidupan sosial. Pertemuan antara orang-orang yang berbeda agama di ruang sosial adalah pertemuan yang menggunakan konsep agama masing-masing yang dalam konteks budaya terkadang berbeda. Kebersamaan orang-orang berbeda agama di ruang sosial dan bahkan di ruang ritual bersama bisa terawat oleh karena adanya komunikasi yang baik dan saling pengertian di antara mereka dalam semangat toleransi. Hal ini sejalan dengan pendapat Muhtadi (2019) yang menyebut bahwa komunikasi dapat berperan sebagai mesin pengelola pergaulan antaragama. Dalam konteks inilah, ritual budaya dan kolaborasi ekonomi dapat diklaim sebagai ajang komunikasi antarumat beragama yang berkontribusi bagi terciptanya harmoni lintas agama.

Keberadaan *Kemaliq* sebagai ruang ritual bersama telah merawat komunikasi antara umat Islam dan Hindu di Lingsar. *Kemaliq* sebagai ruang ritual bersama dan *Perang Topat* sebagai ritual budaya bersama menjadi wadah pertemuan koordinasi dan komunikasi antara tokoh agama Islam dan Hindu di Desa Lingsar khususnya dan umat Islam dan Hindu pada umumnya. Rutinitas pertemuan atau komunikasi antara warga berbeda agama dapat mengasah kepekaan dan saling pengertian di antara mereka karena mereka mengkomunikasikan hal-hal yang terkait dengan kendala atau hambatan yang mengganjal harmoni di antara mereka. Cara seperti ini berkontribusi untuk mengurangi ketegangan antaraagama. Hal ini diperkuat oleh pandangan

Muhtadi (2019) yang menyebut bahwa ketegangan antarumat beragama akan semakin sulit diurai ketika kebekuan komunikasi terus melilit para pemuka agama. Atau dengan kata lain, kebekuan komunikasi menjadi titik awal persoalan pecahnya ketegangan komunikasi sehingga berimplikasi pada semakin menegangnya relasi antarkomunitas.

Belajar dari fenomena harmoni komunikasi antarumat beragama (khususnya umat Islam dan Hindu) yang berlangsung selama ritual budaya *Perang Topat* di Taman Lingsar, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana yang ditemukan dalam riset ini, maka dapat dibangun premis bahwa harmoni komunikasi antarbudaya atau yang melibatkan orang-orang berbeda agama dapat diwujudkan bila mereka bisa menghadirkan ruang-ruang kesamaan, baik dalam bidang ekonomi maupun aspek ritual. Semakin besar ruang kesamaan yang terbangun atau semakin banyak unsur kesamaan yang mereka miliki maka akan semakin harmoni komunikasi yang mereka lakukan. Konsistensi mereka dalam merawat dan mempraktekkan nilai kebersamaan maka harmoni komunikasi di antara orang-orang berbeda budaya dan agama akan langgeng.

## 5. Simpulan

Taman Lingsar merupakan ruang bersama yang dimanfaatkan oleh umat Islam dan Hindu di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat untuk kebutuhan ekonomi dan ritual. Semangat pemanfaatan Taman Lingsar sebagai ruang bersama lintas agama sesuai dengan spirit pembangunannya tahun 1759 saat zaman Raja Anak Agung Gede Ngurah, keturunan Raja Karangasem, yang menghendaki terjadinya keharmonisan antara umat Islam dengan Hindu yang ada di Lingsar khususnya dan Lombok pada umumnya. Harmoni yang ditunjukkan oleh umat Islam dan Hindu di Desa Lingsar menjadi indikator ketaatan mereka terhadap keteladanan para leluhur, sekaligus menunjukkan bahwa proses pendidikan karakter, khususnya perilaku toleran berlangsung dengan baik.

Kepentingan pragmatis yang sama seperti usaha ekonomi dan aktivitas ritual dapat menjadi perekat harmoni antarumat beragama, khususnya Muslim dan Hindu. Komunikasi antaragama yang intens selama aktivitas ekonomi dan ritual telah menjadi instrument penting bagi warga berbeda agama dalam mewujudkan dan mempertahankan hubungan harmonis di antar mereka. Oleh karena itu, hasil riset ini merekomendasikan pentingnya memperbanyak ruang-ruang publik yang inklusif sebagai wadah komunikasi lintasagama untuk meminimalisir ketegangan dan konflik yang berlatarbelakang dan bermotif agama.

## Referensi

- Basrowi & Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia
- Bello, V. 2011. "Collective and Social Identity: A Theoretical Analysis of The Role of Civil Society in The Construction of Supra-National Societies" dalam David Armstrong, dkk.,ed., *Civil Society and International Governance The Role of on-State Actors in Global and Regional Regulatory Framework*. New York: Routledge
- Bracalente, B., Chirieleison, C., Cossignani, M., Ferrucci, L., Gigliotti, M., & Ranalli, M. G. (2011) 'The Economic Impact of Cultural Events: The Umbria Jazz Music Festival', *Tourism Economics*. Volume 17 Issue 6, pp. 1235–1255. <https://doi.org/10.5367%2Fte.2011.0096>
- Budiwanti, E. (2000). *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LKiS
- Charon, J. M. (1979). *Symbolic Interactionism, an introduction, an interpretation, an integration*. London: Prentice-Hall.Inc
- Effendy, O.U. (2003). *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Huberman, A.M & Miles B. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penj. Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Hutabarat. St. J.R.P. (2005). "Kerukunan Umat Beragama Harus menjadi Alat Pemersatu Dan Kekuatan Baru Dalam Membangun Indonesia". In Ridwan Lubis, *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (pp.136-137). Jakarta: Puslitbang Kemenag RI.
- Liliweri, A. (2003). *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Huda. Miftahul. (2018). *Konflik, Kekerasan, dan Ekstremisme: Melacak Akar Penyebab, Potensi & Resolusinya di Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Nusatengaa Centre
- Muhtadi, A.S. 2019. *Komunikasi Lintas Agama*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media
- Mulyana, Deddy. (2001). *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- , (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Rosdakarya
- Purwasito, A. 2015. *Komunikasi Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rich, A.L. (1974). *Interracial Communication*. New York: Harper & Row
- Sastrodiwiryo, S. (2010). *Perjalanan Danghyang Nirartha Sebuah Dharmayatra (1478-1560) Dari Daha Sampai Tambora*. Denpasar: BP

- Schutz, A. (1972). *The Phenomenology of the Social World*. London: Heinemann Educational Books
- Sendjaja. (1994). *Teori-Teori Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Suhadah (2022). "Harmoni Komunikasi Antara Warga Muslim dan Hindu dalam Ritual Budaya *Perang Topat* di Desa Lingsar, Kabupaten Lombok Barat (Studi Etnografi Komunikasi dalam Perspektif Komunikasi Antarbudaya)", *Disertasi*, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Suhadah, S., Mulyana, D., Yusup, P. M., & Sjafirah, N. A. (2021). A Shift in Information Dissemination Methods in a Cultural Ritual amid the COVID-19 Pandemic. *Journal of Information Science Theory and Practice*, 9(4), 50-62.
- Suprapto. (2013). *Seberbak Dupa di Pulau Seribu Masjid, Kontestasi, Integrasi, dan Resolusi Konflik Hindu-Muslim*. Jakarta: Kencana
- Wibowo, A. S. (2010). "Kepublikan dan Keprivatan di Dalam Polis Yunani Kuno". In F. B. Hardiman (ed.), *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis Dari Polis Sampai Cyberspace* (pp.25). Yogyakarta: Kanisius
- Wirata, I.W. 2015. Inter-cultural Communication between Lokal Hindu and Islamic Community in *Perang Topat* Ceremony in Lingsar Temple, Narmada District, Lombok. *Indian Journal of Art*, vol 5 No. 13



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

## KERUKUNAN DAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Derry Ahmad Rizal<sup>1\*</sup>, Ahmad Kharis<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; derry.rizal@uin-suka.ac.id

<sup>2</sup> IAIN Salatiga; ahmadkharis@iainsalatiga.ac.id

\* Correspondence: derry.rizal@uin-suka.ac.id

**Abstract:** *Harmony between religious people is a tradition of Indoensia society that existed since before independence. The composition of diverse communities is supported by a conducive atmosphere reflecting the values of tolerance through concrete actions. Diversity such as culture, ethnicity, race, religion and belief in Indonesia this value must be present in the community. This value of tolerance and harmony is the basis in this study, as well as with data from the Tolerant Cities Index published by SETARA Institute the city of Salatiga ranks first in the city that has the highest tolerance with a point of 6,617. More deep harmony and tolerance among religious people takes sampling of several small families with multi-religious lives. In order to achieve harmony and tolerance to mean well-being, it is necessary to build strong and good communication interactions. The other side of this good communication includes respect in worship and not considering choosing even with the assumption that one religion becomes the majority religion.*

**Abstrak:** Kerukunan antar umat beragama merupakan tradisi masyarakat Indoensia yang ada sejak sebelum kemerdekaan. Komposisi masyarakat beragam didukung suasana kondusif mencerminkan nilai-nilai toleransi melalui tindakan nyata. Keragaman seperti budaya, suku, ras, agama dan keyakinan yang ada di Indonesia nilai ini harus hadir pada masyarakat. Atas nilai toleransi dan kerukunan ini menjadi dasar dalam penelitian ini, serta dengan data Indeks Kota Toleran yang diterbitkan oleh SETARA Institute kota Salatiga menempati posisi pertama dalam Kota yang memiliki toleran tertinggi dengan *point* 6,617. Lebih mendalam toleransi dan kerukunan antar umat beragama ini mengambil sampling beberapa famili kecil dengan kehidupan multi-kepercayaan. Guna mencapai kerukunan dan toleransi untuk mewujudkan kesejahteraan perlu terbangunnya interaksi komunikasi yang kuat dan baik. Sisi lainnya dengan berkomunikasi yang baik ini meliputi menghargai dalam peribadahan serta tidak timbang pilih walaupun dengan anggapan salah satu agama menjadi agama yang mayoritas.

Kata Kunci: Toleransi, Kerukunan, Kesejahteraan Sosial, Kota Salatiga

---

### 1. Pendahuluan

Perbincangan mengenai toleransi yang ada di Indonesia tidak akan ada habisnya, sesuai falsafah Indonesia *Bhineka Tunggal Ika* berbeda-beda namun satu jua ini menunjukkan toleransi harus dijunjung tinggi. Latar belakang sebagai sebuah negara yang memiliki ragam budaya, suku, agama yang diyakini beserta penghayat atau

yang memiliki aliran kepercayaan selain enam agama besar.<sup>1</sup> Data yang didapat menyebutkan bahwa pemeluk agama Islam mayoritas di Indonesia, akan tetapi terdapat juga pengikut kepercayaan atau penghayat dengan jumlah 187 macam aliran.<sup>2</sup> Keberagaman ini yang menjadikan negara Indonesia menjadi unik dengan memiliki ciri khas masing-masing. Berbanding dengan negara Barat yang hanya memiliki beberapa keyakinan bahkan memilih untuk tidak beragama.

Melihat kondisi Indonesia dengan beragam kultur budaya dan agama, yang mengharuskan masyarakat untuk menjunjung nilai toleransi dan kerukunan antar sesama. Hal ini pula tertuliskan dalam Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Sila ketiga, *Persatuan Indonesia* ini menjadi induk dalam konsep kerukunan dan toleransi, mengharuskan menjaga keutuhan dan persatuan.<sup>3</sup> Meruntut kembali bahwa toleransi tidak hanya menerima perbedaan yang ada akan tetapi saling mengakui keberadaan dan tidak mempersoalkan perbedaan tersebut.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan negara multidimensi dengan berbagai suku, agama dan ras, namun juga dikenal sebagai negara yang ramah dan toleran dalam hal kehidupan beragama. Pluralisme agama telah ada di Indonesia sejak lama dan lebih awal dari negara-negara lain di dunia. Namun, pada beberapa tahun terakhir (terutama sebelum 2014), banyak insiden yang mengungkap sikap keagamaan sebagian masyarakat Indonesia yang intoleran atau intoleran. Hal ini masih diamati oleh berbagai organisasi internasional mirip Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC), Komisi Hak Asasi Manusia Asia (AHRC), dan Amerika Serikat. Komisi Amerika Serikat untuk Agama Internasional (USCIRF), dll.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara demokrasi lain, termasuk negara-negara Barat, yang penduduknya dikenal sangat toleran. Secara sosial, ini merupakan ekses mobilitas sosial yang sangat dinamis dalam proses

---

<sup>1</sup> Shofiah Fitriani, "Keberagaman Dan Toleransi Antar Umat Beragama," *Analisis : Jurnal Studi Keislaman*, 2020, 181.

<sup>2</sup> Prins David Saut, "Ada 187 Organisasi Dan 12 Juta Penghayat Kepercayaan Di Indonesia," *News.Detik.Com*, November 9, 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3720357/ada-187-organisasi-dan-12-juta-penghayat-kepercayaan-di-indonesia>.

<sup>3</sup> Sarah Nafisah, "Makna Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Ketahui Isi Dari Kelima Butirnya," *Bpip.Go.Id*, 2015, <https://bpip.go.id/bpip/berita/1035/256/makna-pancasila-sebagai-pandangan-hidup-ketahui-isi-dari-kelima-butirnya.html>.

<sup>4</sup> Henry Thomas Simarmata et al., *Indonesia: Zamrud Toleransi* (Jakarta: PSIK-Indonesia, 2017), 10–12.

globalisasi, di mana para pendatang dan masyarakat adat dengan latar belakang budaya dan kepercayaan yang berbeda berinteraksi di satu tempat. Interaksi ini dapat menimbulkan integrasi, perdamaian dan kerjasama, tetapi juga dapat menimbulkan stigma, ketegangan, persaingan, intoleransi, konflik dan bahkan keruntuhan. Yang terakhir terjadi ketika hanya politik identitas yang ditekankan dalam interaksi. Politik identitas ini dihadirkan sebagai perjuangan beberapa kelompok mainstream atau mayoritas untuk mempertahankan identitas yang mewarnai kehidupan masyarakat, serta jenis-jenis kelompok minoritas yang tercipta di awal 1970-an.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prosmala Hadisaputra mengenai *Implementasi Pendidikan Toleransi yang ada di Indonesia*.<sup>5</sup> Pada jurnal ini menyajikan bagaimana konsep toleransi sudah diberikan sejak dulu dengan bersamaan pembelajaran kewarganegaraan. Menghadirkan peta konsep pembelajaran mengenai Toleransi yang diberikan dengan berbagai macam latar belakang, seperti pada sekolah pada umumnya, pesantren, lingkungan sekitar hingga pada tahapan paling kecil yakni keluarga.<sup>6</sup> Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Prosmala Hadisaputra, artikel *Sikap Toleransi Antaretnis* yang ditulis oleh Erika Feri Susanto. Dalam tulisan ini bertujuan mencari hubungan nilai dari individu perorangan dengan sikap toleransi yang ada di Indonesia.<sup>7</sup>

Dengan variabel yang disajikan menunjukkan semakin tinggi nilai dasar individu, maka akan menunjukkan tinggi sikap toleransi antaretnis. Nilai dasar yang dimaksud yakni nilai-nilai yang mewakili seorang pribadi baik dalam berperilaku maupun bertindak.<sup>8</sup> Hal lain mengenai toleransi yang disajikan oleh Hermawati,dkk mengenai *Toleransi Antar Umat Bergama di Kota Bandung*, bahwa Indeks Toleransi yang ada di Kota Bandung mencapai 3,82.<sup>9</sup> Indeks capaian angka tersebut sudah mencakup kategori tinggi dalam ber-toleransi, namun ini tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik antar agama salah satunya pembangunan tempat ibadah.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Prosmala Hadisaputra, "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN TOLERANSI DI INDONESIA," *Dialog*, 2020, 75, <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.355>.

<sup>6</sup> Hadisaputra, "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN TOLERANSI DI INDONESIA."

<sup>7</sup> Erika Feri Susanto and Anisia Kumala, "Sikap Toleransi Antaretnis," *TAZKIYA: Journal of Psychology*, 2019, <https://doi.org/10.15408/tazkiya.v7i2.13462>.

<sup>8</sup> Susanto and Kumala.

<sup>9</sup> Rina Hermawati, Caroline Paskarina, and Nunung Runiawati, "Toleransi Antar Umat Beragama Di Kota Bandung," *Umbara*, 2017, 122, <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i2.10341>.

<sup>10</sup> Hermawati, Paskarina, and Runiawati, "Toleransi Antar Umat Beragama Di Kota Bandung."

Penelitian ini lebih terfokus pada mengenai toleransi dan kerukunan umat beragama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Lebih mendalam pembahasannya mengenai bagaimana nilai-nilai toleransi yang ada pada setiap individu ini mampu dituangkan dalam kehidupan bermasyarakat pada skala kecilnya yakni keluarga. Kota Salatiga yang menjadi subyek dalam penelitian ini atas dasar data indek kota toleran yang menduduki tingkat pertama.

Diskursus dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang difokuskan mengenai kerukunan dan toleransi beragama. Serta penelurusan dilapangan dengan mengambil *sampling* di wilayah Salatiga, Jawa Tengah perihal kesejahteraan sosial. Dalam rancangan penelitian ini menghadirkan nilai kerukunan dan toleransi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Toleransi adalah sikap berdasarkan aturan atau perilaku manusia yang memungkinkan seseorang untuk menghormati dan menghargai perilaku orang lain<sup>11</sup>.

## 2. Hasil dan Pembahasan

### Kerukunan Umat Beragama

Bangsa Indonesia dikenal dengan suku bangsanya yang beragam, yang dicirikan oleh banyak suku, suku, agama, bahasa, budaya dan adat istiadat. Dalam urusan agama, negara Indonesia bukanlah negara teokrasi, namun dalam konstitusi negara mewajibkan masyarakat negaranya buat menganut salah satu agama yang diatur dalam Pasal 29 (1) dan (2) UUD 1945. Masyarakat diberi kebebasan untuk memilih salah satu agama yang sudah ada di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Kenyataan ini dengan sendirinya memaksa negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan kehidupan beragama. Ketentuan Pasal 29 UUD 1945 sangat penting bagi agama dan pemeluknya karena memberikan jaminan dan kemudahan bagi umat untuk ikut serta dalam pengayaan dan pengayaan kehidupan nasional. Setiap pemeluk agama memiliki kesempatan untuk mengamalkan agama dan menciptakan kehidupan beragama yang sesuai dengan ajaran agama.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Fitriani, "Keberagaman Dan Toleransi Antar Umat Beragama."

<sup>12</sup> Achmad Nur Salim, "Penanaman Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman," *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta*, 2017.

Konflik antarumat beragama biasanya bukan semata-mata agama, melainkan faktor politik, ekonomi, atau faktor lain yang berkaitan dengan agama.<sup>13</sup> Terkait isu keagamaan, selain munculnya sentimen keagamaan yang radikal dan sempit di kalangan sejumlah kelompok agama, pendirian kapel, isu penyiaran agama, dan tuduhan penistaan agama juga berperan.<sup>14</sup> Pendirian kapel merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam perdebatan atau intoleransi.<sup>15</sup> Memang, pada tahun 2014, meskipun toleransi beragama lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, masih ada beberapa kasus penghentian atau penghentian pembangunan kapel, yang masih diizinkan secara hukum sejak awal tahun 1999 di Kota Ambon Provinsi Maluku.<sup>16</sup>

### **Nilai Toleransi**

Setiap orang dalam masyarakat memiliki karakteristik, latar belakang, agama, ras dan bahasa yang berbeda-beda. Jika tidak dapat diselesaikan dengan bijak, banyaknya perbedaan merupakan faktor potensial yang dapat memicu konflik dan perpecahan sosial. Contoh lain, banyak kerusuhan yg berbau SARA, perseteruan antar gerombolan masyarakat semakin banyak, kebencian terhadap ras eksklusif semakin kuat, serta sistem dan sistem program pemerintah yang diklaim sangat sentralistik dan otoriter. Kebencian yg dilakukan semakin kuat, serta geng motor anarkis dan berkelahi. Para siswa dengan kentara membuktikan bahwa rasa hormat dan penghargaan terhadap orang lain telah menjadi hal yg sangat langka di Indonesia. Pemberitaan media wacana tawuran antar pelajar Indonesia semakin tak jarang terjadi, terutama sepanjang tahun 2019.<sup>17</sup>

Toleransi mengandung pengertian adanya perilaku seorang buat mendapat perasaan, kebiasaan, pendapat atau agama yang tidak sama menggunakan yang dimilikinya.<sup>18</sup> Tetapi Susan Mendus pada bukunya, *Toleration and the Limit of Liberalism*

<sup>13</sup> Firdaus M Yunus, "Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya," *Substantia*, 2014.

<sup>14</sup> "Resolusi Konflik Agama Di Pulau Ambon," *Jurnal Ketahanan Nasional*, 2016, <https://doi.org/10.22146/jkn.22305>.

<sup>15</sup> Asep S. Muhtadi, "Komunikasi Lintas Agama: Mencari Solusi Konflik Agama," *Conference Proceeding ICONIMAD 2019*, 2019.

<sup>16</sup> Yunus Rahawarin, "KERJASAMA ANTAR UMAT BERAGAMA: Studi Rekonsiliasi Konflik Agama Di Maluku Dan Tual," *KALAM*, 2017, <https://doi.org/10.24042/klm.v7i1.451>.

<sup>17</sup> Zuly Qodir, "Kaum Muda, Intoleransi, Dan Radikalisme Agama," *Jurnal Studi Pemuda*, 2018, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>.

<sup>18</sup> Imam Hanafi, "REKONSTRUKSI MAKNA TOLERANSI," *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 2017, <https://doi.org/10.24014/trs.v9i1.4322>.

membagi toleransi sebagai 2 macam, yakni toleransi negatif (*negative interpretation of tolerance*) dan toleransi positif (*positive interpretation of tolerance*). Yang pertama menyatakan bahwa toleransi itu hanya mensyaratkan relatif menggunakan membiarkan & nir menyakiti orang/gerombolan lain. Yang ke 2 menyatakan bahwa toleransi itu membutuhkan lebih menurut sekedar ini, mencakup juga donasi dan kerjasama menggunakan gerombolan lain. Konsep toleransi positif inilah yg dikembangkan pada interaksi sosial pada negara ini menggunakan kata kerukunan (harmoni).<sup>19</sup>

Dalam pandangan Adney (1926) yang dikutip pada tulisan Khadijah Muda, mendefinisikan toleransi yakni tindakan yang dilakukan secara sukarela, serta kebebasan namun memiliki batasan-batasan tertentu ranah pribadi <sup>20</sup>. Pernyataan selaras juga menurut pandangan Umar Hasyim yang dikutip dalam tulisan Dewi Anggraeni, toleransi yakni pemberian kebebasan kepada setiap warga masyarakat dan berhak atas nasibnya masing-masing, serta menciptakan kedamaian dalam masyarakat <sup>21</sup>. Hal ini menjelaskan mengenai toleransi memiliki suatu sifat kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia atau masyarakat akan tetapi memiliki batasan-batasan tertentu yakni hak pribadi.

Jadi, kerukunan beragama merupakan keadaan interaksi antarumat beragama yg dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati pada pengamalan ajaran kepercayaan dan kerjasama pada kehidupan bermasyarakat.<sup>22</sup> Eksistensi kerukunan ini sangat penting, pada samping lantaran adalah keniscayaan pada konteks proteksi hak asasi manusia (HAM), jua lantaran kerukunan ini sebagai prasyarat bagi terwujudnya integrasi nasional, dan integrasi ini sebagai prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional.<sup>23</sup>

Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh 2 faktor, yakni perilaku umat beragama dan kebijakan negara atau pemerintah yang aman bagi kerukunan. semua

<sup>19</sup> Guido Vanheeswijck, "Tolerance from a Religious Perspective: A Response to Susan Mendus," *Bijdragen*, 2010, <https://doi.org/10.2143/BIJ.71.4.2064954>.

<sup>20</sup> Khadijah Muda and Siti Nor Azhani Mohd Tohar, "Definisi, Konsep Dan Teori Toleransi Beragama," *Sains Insani*, 2020, 195, <https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol5no1.179>.

<sup>21</sup> Dewi Anggraeni and Siti Suhartinah, "Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif KH. Ali Mustafa Yaqub," *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 2018, 65, <https://doi.org/10.21009/jsq.014.1.05>.

<sup>22</sup> Muh. Khoirul Rifa'i, "INTERNALISASI NILAI-NILAI RELIGIUS BERBASIS MULTIKULTURAL DALAM MEMBENTUK INSAN KAMIL," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 4, no. 1 (2016): 116, <https://doi.org/10.15642/pai.2016.4.1.116-133>.

<sup>23</sup> Susanto and Kumala, "Sikap Toleransi Antaretnis."

kepercayaan mengajarkan kerukunan ini, sebagai akibatnya agama idealnya berfungsi menjadi faktor integratif. Pada kenyataannya, interaksi antarpemeluk kepercayaan pada Indoensia selama ini sangat harmonis.<sup>24</sup> Hanya saja, pada era reformasi yang *notabene* mendukung kebebasan ini, ada banyak sekali aktualisasi diri kebebasan, baik pada bentuk pikiran, ideologi politik, faham keagamaan, juga di ekspresi hak-hak asasi. Pada iklim misalnya ini timbul aktualisasi diri kelompok yang berfaham radikal atau intoleran, walaupun jumlahnya sangat sedikit namun pada masalah-masalah eksklusif mengatasnamakan gerombolan mayoritas.<sup>25</sup>

Adapun kebijakan negara mengenai interaksi antaragama termasuk yang terbaik sebagai contoh pada tatanan dunia. Hanya saja, sebagian oknum pemerintah pada wilayah menggunakan pertimbangan politik kadang-kadang mendukung perilaku intoleran gerombolan eksklusif atas nama pemenuhan aspirasi gerombolan lebih banyak didominasi.<sup>26</sup> Klaim aspirasi gerombolan lebih banyak didominasi ini pun nir selalu sinkron kenyataan, lantaran suatu tindakan intoleran itu tak jarang hanya digerakkan sang gerombolan eksklusif menggunakan mengatasnamakan lebih banyak didominasi. Meski demikian, kebijakan Pemerintah Daerah yang relatif arif dan adil, termasuk pada konteks menjaga kerukunan umat beragama, jauh lebih beragam menurut dalam kebijakan yang dipercaya mendukung perilaku intoleran ini.<sup>27</sup>

## Kesejahteraan Sosial

Dari Kamus besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan merupakan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya. Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia angka 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial merupakan suatu rapikan kehidupan serta

<sup>24</sup> Doni Septian, "PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMPERKUAT KERUKUNAN UMAT," *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 2020, <https://doi.org/10.35961/tanjak.v1i2.147>.

<sup>25</sup> Ibnu Rusydi and Siti Zolehah, "Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian," *Journal for Islamic Studies*, 2018, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161580>.

<sup>26</sup> Alfina Prayogo, Esther Simamora, and Nita Kusuma, "Peran Pemerintah Dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia," *Jurist-Diction*, 2020, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17619>.

<sup>27</sup> Nimrod Frebdes Taapan, Petrus Ly, and Leonard Lobo, "PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SIKAP HIDUP TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA KUPANG," *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2020, <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i1.40086>.

penghidupan sosial baik material maupun spiritual yg diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir serta batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat negara buat mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yg sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, dan rakyat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi insan sesuai dengan pancasila. namun, menurut perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan buat membantu individu serta masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.<sup>28</sup>

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis.<sup>29</sup> Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan masyarakat.<sup>30</sup> Ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya. Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang terorganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan sebuah konsep yang relatif baru berkembang.<sup>31</sup> Kesejahteraan sosial memiliki arti kepada keadaan yang baik dan banyak orang yang menamainya sebagai kegiatan amal. Di negara Amerika Serikat kesejahteraan sosial juga diartikan sebagai bantuan publik yang dilakukan oleh pemerintah bagi keluarga miskin.<sup>32</sup>

Ilmuwan sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya kehidupan manusia. Menurut Adi, kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah: ilmu terapan yang mempelajari dan mengembangkan

<sup>28</sup> R. Bali Swain and F. Yang-Wallentin, "Achieving Sustainable Development Goals: Predicaments and Strategies," *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 2020, <https://doi.org/10.1080/13504509.2019.1692316>.

<sup>29</sup> Carlos Miguel Ferreira and Sandro Serpa, "Society 5.0 and Social Development," *Preprints*, 2018.

<sup>30</sup> Aqila Liyana Abdul Rauf and Kamariah Abu Bakar, "Effects of Play on the Social Development of Preschool Children," *Creative Education*, 2019.

<sup>31</sup> Jorge E. Martínez-Iñiguez, Sergio Tobón, and Jesús A. Soto-Curiel, "Key Axes of the Socioformative Educational Model for University Training in the Transformation Framework towards Sustainable Social Development," *Formacion Universitaria*, 2021, <https://doi.org/10.4067/S0718-50062021000100053>.

<sup>32</sup> Larry DeWitt, "The Development of Social Security in America," *Social Security Bulletin*, 2010.

kerangka ideologis dan metodologis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk melalui pengelolaan urusan sosial; memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan memaksimalkan peluang pengembangan bagi anggota masyarakat. Definisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pengelolaan masalah sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga masyarakat terdorong dan memiliki kehidupan yang baik..<sup>33</sup>

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang dikutip oleh Suharto, pengertian perlindungan sosial adalah sebagai berikut: "Perlindungan sosial adalah suatu keadaan yang memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. agar dapat menjalankan fungsi sosialnya". Adanya pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik material, spiritual maupun sosial dalam rangka mendorong masyarakat menuju kualitas hidup yang lebih baik. dengan baik dan memenuhi fungsi sosialnya.<sup>34</sup> Dalam hal ini, peran akuntabilitas pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warga harus ditingkatkan.<sup>35</sup> Ilmu Kesejahteraan Sosial merupakan kelanjutan dan peningkatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Oleh karena itu, konteks historis ilmu kesejahteraan sosial pada titik tolaknya sama dengan konteks pekerjaan sosial. Pengertian pekerjaan sosial menurut International Federation of Social Workers (IFSW) (2000) yang dikutip oleh Adi adalah *The social work profession promotes social change, solves problems in human relationships, and empowers and liberates people to improve well-being. Based on theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with the environment. The principles of human rights and social justice are the foundation of social work.*<sup>36</sup> Profesi pekerjaan sosial mendorong terciptanya perubahan sosial, membantu memecahkan masalah hubungan, dan

---

<sup>33</sup> Isbandi Rukminto Adi, "KEMISKINAN MULTIDIMENSI," *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 2005, <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i1.109>.

<sup>34</sup> Suradi Suradi, "PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL," *Sosio Informa*, 2012, <https://doi.org/10.33007/inf.v17i3.81>.

<sup>35</sup> Denis Bouget, "The Juppe Plan and the Future of the French Social Welfare System," *Journal of European Social Policy*, 1998, <https://doi.org/10.1177/095892879800800204>.

<sup>36</sup> Isbandi Rukminto Adi, "Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.

memberdayakan serta membebaskan orang untuk menjalani kehidupan yang lebih baik..<sup>37</sup>

Upaya yang dilakukan dilakukan dengan menggunakan teori perilaku manusia dan sistem sosial. Pekerjaan sosial mengintervensi ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Di sisi lain, prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerja sosial. Pekerjaan sosial adalah kegiatan yang memberikan kesejahteraan sosial agar individu dapat menjalankan fungsi sosialnya seperti biasa dalam masyarakat. Konsisten dengan ungkapan Zastrow yang Hurairah kutip bahwa definisi pekerjaan sosial adalah pekerjaan sosial, pekerjaan sosial meningkatkan atau meningkatkan kemampuan individu, kelompok dan masyarakat untuk melakukan fungsi sosial, dan masyarakat menetapkan tujuan tersebut. kondisi yang membantu untuk mencapainya.<sup>38</sup> Berdasarkan definisi tersebut, masalah pekerjaan sosial erat kaitannya dengan masalah sosial yang dihadapi oleh individu, kelompok dan masyarakat.<sup>39</sup> Peran pekerja sosial dapat mengatasi segala bentuk masalah dan fenomena sosial, merenungkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial, meningkatkan kualitas hidup dan mengembalikan fungsi sosial dalam masyarakat..<sup>40</sup>

Dalam hal ini yang dimaksud dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga negara dan swasta yang bertujuan untuk berkontribusi dalam pencegahan, penanggulangan, atau penyelesaian masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat. Kesejahteraan sosial disebut jaminan sosial di negara maju, seperti dukungan sosial dan asuransi sosial yang diselenggarakan oleh negara, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung (dis-advantageous groups)<sup>41</sup>. Di Indonesia, di sisi lain, bantuan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau syarat

---

<sup>37</sup> Lina Lisnawati, Santoso Tri Raharjo, and Muhammad Fedryansyah, "EKSISTENSI PROFESI PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2015, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13545>.

<sup>38</sup> Abu Huraerah, "Accessibility of the Poor in Healthcare Service in Bandung, West Java, Indonesia," *KnE Life Sciences*, 2019, <https://doi.org/10.18502/cls.v4i13.5324>.

<sup>39</sup> Yaya Mulyana, Abu Huraerah, and Rudi Martiawan, "Policy Strategy Development Tourism South Cianjur in Cianjur Regency, West Java," 2019, <https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.50>.

<sup>40</sup> Deborah Lynch, Catherine Forde, and Athena Lathouras, "Changing Contexts of Practice: Challenges for Social Work and Community Development," *Australian Social Work*, 2020, <https://doi.org/10.1080/0312407X.2019.1694047>.

<sup>41</sup> Myra Ferree and Silke Roth, "Collective Identity and Organizational Cultures- Theories of New Social Movements in American Perspective [in German: Kollektive Identität Und Organisationskulturen. Theorien Neuer Sozialer Bewegungen Aus Amerikanischer Perspektive]," *Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen*, 1998.

untuk hidup sukses, syarat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Namun dalam konteks yang sangat luas, bantuan sosial dimaknai secara berbeda<sup>42</sup>.

Perdebatan tentang bantuan sosial memiliki banyak bidang yang berbeda dari yang didefinisikan oleh "kondisi" Undang-Undang Organisasi Layanan Kemanusiaan menurut UU No.6 Tahun 1974 memuat inti kesejahteraan sosial, kata lain bahwa kesejahteraan sosial sebagai "sistem organisasi" yang beragam pelayanan kemanusiaan terwujud sistem, jadi kami tidak dapat menantang arti bantuan sosial yang lebih luas seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Panti-panti sosial, dan lain-lain.<sup>43</sup> Selain itu, sebagian orang mengartikan kesejahteraan sosial sebagai "olahraga/aktivitas", tetapi makna bahwa olahraga dan aktivitas manusia dapat meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan) agar dapat bersaing dan bertahan dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan.<sup>44</sup> Dari ketiga arti tersebut, makna kesejahteraan sosial tidak hilang begitu saja tetapi ada salah satu arti atau makna lain yang dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah keilmuan dan pembangunan bangsa saat ini.

Kesejahteraan sosial bisa diartikan sebagai sebuah ilmu karena dalam kajian ilmu kesejahteraan sosial mencakup konsep-konsep, teori, metode, dan paradigma.<sup>45</sup> Sebagai ilmu, ilmu kesejahteraan sosial adalah ilmu yang sangat muda di samping disiplin ilmu lain seperti psikologi, antropologi, ekonomi dan sosiologi. Dalam hal ini peran ilmu sosial adalah ilmu terapan dari ilmu sosial dan ilmu murni lainnya. Berdasarkan hal tersebut, ilmu-ilmu murni seperti sosiologi, psikologi, dan antropologi adalah bapak dan ibu, sedangkan ilmu-ilmu sosial adalah dua atau lebih ilmu murni yang dapat diterapkan pada penelitian lapangan untuk menunjang dan memecahkan masalah-masalah sosial masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Hari Harjanto Setiawan, "MERUMUSKAN INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL (IKS) DI INDONESIA," *Sosio Informa*, 2019, <https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1786>.

<sup>43</sup> Purwanto Purwanto, "PERWUJUDAN KEADILAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA: Perjuangan Yang Tidak Mudah Dioperasionalkan," *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 2020, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.2>.

<sup>44</sup> Tundzirawati Tundzirawati and Binahayati Rusyidi, "UPAYA PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK JALANAN," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2015, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13231>.

<sup>45</sup> Budi Muhammad Taftazani, Fitri Hajar Purnama, and Santoso Tri Raharjo, "PEKERJAAN SOSIAL UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA," *Share : Social Work Journal*, 2020, <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.25663>.

<sup>46</sup> Nurul Husna, "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial," *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 2014.

Akan tetapi, penelitian yang menjadi pokok bahasan ilmu-ilmu sosial harus dilakukan sesuai dengan sifat subyeknya, dan pendekatan yang digunakan harus bersifat holistik, sehingga semua ilmu-ilmu murni dapat diadopsi sebagai konsep, teori, dan metode ilmu-ilmu sosial. Tidak. Karena mereka mengetahui masalah yang sedang diselidiki dan memiliki tujuan yang cukup jelas.<sup>47</sup> Kesejahteraan sosial dapat dilihat sebagai ilmu atau disiplin yang mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, dan kesejahteraan sosial. Seperti sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, ilmu politik, demografi, dan pekerjaan sosial, ilmu-ilmu sosial memberikan dasar pengetahuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial, penyebabnya, dan strategi untuk mengatasinya mencoba kembangkan..<sup>48</sup>

Pada fokus penelitian ini mengenai kesejahteraan sosial yakni tidak berbasiskan pada ekonomi yang menyatakan jika kebutuhan terpenuhi maka masyarakat tersebut sudah sejahtera. Kesejahteraan sosial yang bersifat kehidupan yang dijalani oleh masyarakat tidak begitu banyak memiliki permasalahan hingga dalam taraf berkeyakinan atau beragama. Perceraian atau perpecahan dalam keluarga dengan mengatasnamakan berbeda keyakinan, ini dapat menunjukkan bahwa keluarga tersebut belum seutuhnya sejahtera.

### 3. Hasil Lapangan

Indonesia sebagai negara dan bangsa yang menjadi percontohan toleransi antarumat beragama di dunia, dikarenakan terdapatnya beragam agama dan suku hidup berdampingan<sup>49</sup>. Kajian-kajian yang memantau kondisi kehidupan masyarakat khususnya toleransi di Indonesia, memiliki kesamaan ciri yang menunjukkan kecenderungan toleransi, terutama di tingkat masyarakat sipil, dan hanya sedikit yang menemukan jalan keluarnya. Kesadaran dan penerimaan pluralisme antar dan di dalam agama masih kurang. Misalnya, *Legatum Institute* menempatkan Indonesia pada peringkat 100 dari 167 negara dalam kategori kebebasan individu dalam *Legatum Prosperity Index* tahun 2020.

---

<sup>47</sup> Husna.

<sup>48</sup> Watunglawar and Leba, "KESEJAHTERAAN SOSIAL: Sebuah Perspektif Dialektis."

<sup>49</sup> Suryan Suryan, "TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA: PERSPEKTIF ISLAM," *Jurnal Ushuluddin*, 2017, 193, <https://doi.org/10.24014/jush.v23i2.1201>.

Table 1 Kota dengan Indeks Toleransi Tertinggi 2020<sup>50</sup>

Peringkat	Nama Kota	Skor 2020	Skor 2018
1	Salatiga	6,717	6.447 (2)
2	Singkawang	6,450	6.513 (1)
3	Manado	6,200	6.030 (4)
4	Tomohon	6,183	5.833 (8)
5	Kupang	6,037	5.833 (7)
6	Surabaya	6,033	5.823 (10)
7	Ambon	5,733	5.960 (5)
8	Kediri	5,583	5.2909 (29)
9	Sukabumi	5,546	5.430 (20)
10	Bekasi	5,530	5.857 (6)

Tabel di atas memperlihatkan sebagian besar kota yang masuk 10 kota dengan indeks tertinggi pada 2018 masih bertahan meskipun terjadi pertukaran posisi. Seperti Kota Singkawang yang sebelumnya menempati posisi pertama turun ke posisi 2, digantikan Kota Salatiga yang pada IKT 2018 berada di posisi 2. Atau kota Ambon yang pada IKT 2018 berada di posisi 5 turun ke posisi 7, digantikan Kota Kupang yang pada IKT 2018 berada di posisi 7. Hal yang menarik adalah masuknya 2 kota baru ke grup 10 besar yakni Kediri dan Sukabumi. Yang lebih mengejutkan, kedua kota ini dapat dikatakan mengalami lonjakan peringkat. Pada IKT 2018 Kota Sukabumi berada pada posisi 20 dan Kediri pada posisi 29. Sementara pada IKT 2020 ini, Kediri berada di posisi 8 dan Sukabumi ada di posisi 9.

Di sisi lain, ukuran keberhasilan Kota Salatiga menjadi salah satu kota toleran di Indonesia adalah kota Salatiga itu sendiri, yaitu pemerintah dalam pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Salatiga atau FKUB Kota Salatiga. Pada peran memelihara dan menjaga kerukunan umat beragama di Kota Salatiga, Indonesia setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kewajiban Daerah tentang menjaga kerukunan umat beragama, memperkuat forum kerukunan umat beragama. Perlu membentuk dewan penasehat bagi Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam pendirian kapel khususnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan FKUB Kota Salatiga Keagamaan Pasal 8 (1) Kemudian pada tahun 2007, kepengurusan

---

<sup>50</sup> Halili Subhi Azhari, *Indeks Kota Toleran 2020*, Setara-Institute.Org (Jakarta: PUSTAKA MASYARAKAT SETARA, 2020), <https://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-2021/>.

FKUB Kota Salatiga berdiri sejak tahun 2007 dan kepengurusan sampai dengan tahun 2007-2012.

Pada salah satu kasus dalam penelitian ini menemukan hal menarik. Peneliti menemukan komposisi keluarga yang terdiri dari beberapa individu memiliki status keyakinan atau agama yang beragam. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu dan empat anak. Identifikasi keyakinan atau agama diperoleh dari informasi status agama di salah satu Kartu Keluarga anggota keluarga tersebut. Mereka tidak memeluk satu kepercayaan melainkan multi keyakinan, antara lain islam, katolik dan protestan. Kondisi ini tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan bagi masyarakat, bahkan bisa menyebabkan kekacauan sentralis religi jika tidak disikapi bijak dan arif dalam tatanan kehidupan rukun beragama. Secara normatif, pasangan yang terdiri dari suami-istri seyogyanya beragama sama dan tidak memiliki orientasi kelainan keyakinan. Sedangkan status anak biasanya akan mengikuti status agama orang tuanya berdasarkan pencantuman tertera administratif dan legal.

Keunikan dari keluarga multi-agama memiliki kekuatan fundamental mengelola perbedaan. Ketika salah satu anggota keluarga tidak melaksanakan tugas dan perintah agama. Maka anggota keluarga lain akan saling mengingatkan dalam mematuhi ajaran agama masing-masing. Perihal dalam agama Islam ada kewajiban bagi pemeluknya menyelenggarakan ibadah wajib umat islam (*Isya, Subuh, Luhur, Ashar dan Magrib*). Dia yang berkeyakinan non-Islam memberikan perhatian dalam wujud kasih sayang yang terintegrasi adab-tutur perilaku manusia seutuhnya. Bagi pemeluk agama Islam wajib melaksanakan perintah agamanya secara *default*, sedangkan bentuk kasih sayang atau perhatian saudaranya beda agama adalah bagian dari bentuk kasih sayang dalam keluarga. Disisi lain, peringatan hari besar agama yang mencerminkan toleransi dan kerukunan keluarga beda agama dirasakan khidmat dalam formasi kesetia-kekeluargaan. Biasanya setiap anggota keluarga merayakan hari raya dikeluarganya dengan adat-istiadat lokal serta saling memberikan ucapan dan keterbukaan perspektif.

Pendapat dari Salvacion dan Ara Celis menjelaskan keluarga adalah dua individu atau lebih yang mempunyai interaksi darah dan interaksi perkawinan hayati pada satu atap bingkai tempat tinggal tangga. Mereka saling berinteraksi menggunakan yang lain dan mereka saling membangun serta mempertahankan kebudayaan tertentu.<sup>51</sup> Maka

---

<sup>51</sup> Agung Eko Purnama, *Konsep Dasar Ilmu Sosial*, STAIN Ponorogo, 2019.

situasi keluarga beda agama bisa disebut sebagai keluarga konservatisme, dimana antar individu menggunakan kekuatan interaksi atau menjalankan proses komunikasi antar anggota keluarga. Pada praktik kerukunan umat beragama sudah usang ketika antar individu tidak mampu menampilkan nuansa komunikasi efektif. Sedangkan pada subjek penitian ini, justru menyajikan nuansa keindahan dan perdamaian serta saling mempertahankan kebudayaan religi masing-masing.

#### **4. Kesimpulan**

Pembahasan mengenai kerukunan dan toleransi dalam beragama, ini menjadi hal yang menarik untuk terus diteliti. Berdasarkan pada negara Indonesia yang memiliki ragam kebudayaan, suku dan agama menjadi hal yang menerapkan nilai toleransi ini. Perkembangan lebih mendalam bahwa sejauh mana pada toleransi dan kerukunan umat beragama ini memberikan dampak positif. Hal positif yang didapatkan oleh masyarakat yakni kesejahteraan sosial.

Kota Salatiga menjadi rujukan dalam penelitian ini atas dasar peringkat pertama sebagai kota toleran pada ranah nasional. Sisi lain yang didapatkan pada data lapangan yakni terdapatnya keluarga yang memiliki multi-agama, sehingga sebuah kerukunan dan toleransi ini menjadi hal yang wajib diterapkan. Komunikasi atau interaksi yang dibangun secara baik maka toleransi dan kerukunan yang dibangun pun bukan menjadi hal yang mustahil keluarga tersebut sejahtera dalam beragama.

## Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. "Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat." *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.
- . "KEMISKINAN MULTIDIMENSI." *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 2005. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i1.109>.
- Anggraeni, Dewi, and Siti Suhartinah. "Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif KH. Ali Mustafa Yaqub." *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 2018. <https://doi.org/10.21009/jsq.014.1.05>.
- Bali Swain, R., and F. Yang-Wallentin. "Achieving Sustainable Development Goals: Predicaments and Strategies." *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 2020. <https://doi.org/10.1080/13504509.2019.1692316>.
- Bouget, Denis. "The Juppe Plan and the Future of the French Social Welfare System." *Journal of European Social Policy*, 1998. <https://doi.org/10.1177/095892879800800204>.
- David Saut, Prins. "Ada 187 Organisasi Dan 12 Juta Penghayat Kepercayaan Di Indonesia." *News.Detik.Com*, November 9, 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3720357/ada-187-organisasi-dan-12-juta-penghayat-kepercayaan-di-indonesia>.
- DeWitt, Larry. "The Development of Social Security in America." *Social Security Bulletin*, 2010.
- Ferree, Myra, and Silke Roth. "Collective Identity and Organizational Cultures- Theories of New Social Movements in American Perspective [in German: Kollektive Identität Und Organisationskulturen. Theorien Neuer Sozialer Bewegungen Aus Amerikanischer Perspektive]." *Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen*, 1998.
- Ferreira, Carlos Miguel, and Sandro Serpa. "Society 5.0 and Social Development." *Preprints*, 2018.
- Fitriani, Shofiah. "Keberagaman Dan Toleransi Antar Umat Beragama." *Analisis : Jurnal Studi Keislaman*, 2020.
- Habibullah, Habibullah. "PERAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PELAYANAN SOSIAL TERINTEGRATIF." *Sosio Konsepsia*, 2020. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i3.2043>.
- Hadisaputra, Prosmala. "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN TOLERANSI DI INDONESIA." *Dialog*, 2020. <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.355>.
- Hanafi, Imam. "REKONSTRUKSI MAKNA TOLERANSI." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 2017. <https://doi.org/10.24014/trs.v9i1.4322>.
- Hermawati, Rina, Caroline Paskarina, and Nunung Runiawati. "Toleransi Antar Umat Beragama Di Kota Bandung." *Umbara*, 2017. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i2.10341>.
- Huraerah, Abu. "Accessibility of the Poor in Healthcare Service in Bandung, West Java, Indonesia." *KnE Life Sciences*, 2019. <https://doi.org/10.18502/kls.v4i13.5324>.

- Husna, Nurul. "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 2014.
- Lisnawati, Lina, Santoso Tri Raharjo, and Muhammad Fedryansyah. "EKSPORTASI PROFESI PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2015. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13545>.
- Liyana Abdul Rauf, Aqila, and Kamariah Abu Bakar. "Effects of Play on the Social Development of Preschool Children." *Creative Education*, 2019.
- Lynch, Deborah, Catherine Forde, and Athena Lathouras. "Changing Contexts of Practice: Challenges for Social Work and Community Development." *Australian Social Work*, 2020. <https://doi.org/10.1080/0312407X.2019.1694047>.
- Martínez-Iñiguez, Jorge E., Sergio Tobón, and Jesús A. Soto-Curiel. "Key Axes of the Socioformative Educational Model for University Training in the Transformation Framework towards Sustainable Social Development." *Formacion Universitaria*, 2021. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062021000100053>.
- Muda, Khadijah, and Siti Nor Azhani Mohd Tohar. "Definisi, Konsep Dan Teori Toleransi Beragama." *Sains Insani*, 2020. <https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol5no1.179>.
- Muhtadi, Asep S. "Komunikasi Lintas Agama: Mencari Solusi Konflik Agama." *Conference Proceeding ICONIMAD 2019*, 2019.
- Mulyana, Yaya, Abu Huraerah, and Rudi Martiawan. "Policy Strategy Development Tourism South Cianjur in Cianjur Regency, West Java," 2019. <https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.50>.
- Nafisah, Sarah. "Makna Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Ketahui Isi Dari Kelima Butirnya." *Bpip.Go.Id*, 2015. <https://bpip.go.id/bpip/berita/1035/256/makna-pancasila-sebagai-pandangan-hidup-ketahui-isi-dari-kelima-butirnya.html>.
- Prayogo, Alfina, Esther Simamora, and Nita Kusuma. "Peran Pemerintah Dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia." *Jurist-Diction*, 2020. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17619>.
- Purnama, Agung Eko. *Konsep Dasar Ilmu Sosial*. STAIN Ponorogo, 2019.
- Purwanto, Purwanto. "PERWUJUDAN KEADILAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA: Perjuangan Yang Tidak Mudah Dioperasionalkan." *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 2020. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.2>.
- Qodir, Zuly. "Kaum Muda, Intoleransi, Dan Radikalisme Agama." *Jurnal Studi Pemuda*, 2018. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>.
- Rahawarin, Yunus. "KERJASAMA ANTAR UMAT BERAGAMA: Studi Rekonsiliasi Konflik Agama Di Maluku Dan Tual." *KALAM*, 2017. <https://doi.org/10.24042/klm.v7i1.451>.
- "Resolusi Konflik Agama Di Pulau Ambon." *Jurnal Ketahanan Nasional*, 2016. <https://doi.org/10.22146/jkn.22305>.
- Rifa'i, Muh. Khoirul. "INTERNALISASI NILAI-NILAI RELIGIUS BERBASIS MULTIKULTURAL DALAM MEMBENTUK INSAN KAMIL." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 4, no. 1 (2016): 116.

- [https://doi.org/10.15642/pai.2016.4.1.116-133.](https://doi.org/10.15642/pai.2016.4.1.116-133)
- Rusydi, Ibnu, and Siti Zolehah. "Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian." *Journal for Islamic Studies*, 2018. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161580>.
- Salim, Achmad Nur. "Penanaman Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman." *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta*, 2017.
- Septian, Doni. "PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMPERKUAT KERUKUNAN UMAT." *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 2020. <https://doi.org/10.35961/tanjak.v1i2.147>.
- Setiawan, Hari Harjanto. "MERUMUSKAN INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL (IKS) DI INDONESIA." *Sosio Informa*, 2019. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1786>.
- Simarmata, Henry Thomas, Sunaryo, Arif Susanto, and Fachrerozi. *Indonesia: Zamrud Toleransi*. Jakarta: PSIK-Indonesia, 2017.
- Subhi Azhari, Halili. *Indeks Kota Toleran 2020. Setara-Institute.Org*. Jakarta: PUSTAKA MASYARAKAT SETARA, 2020. <https://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-2021/>.
- Suharto, E. "Konsep Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Pekerjaan Sosial." *Online*, <Http://Www. Policy. Hu>, 2006.
- Suradi, Suradi. "PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL." *Sosio Informa*, 2012. <https://doi.org/10.33007/inf.v17i3.81>.
- Suryan, Suryan. "TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA: PERSPEKTIF ISLAM." *Jurnal Ushuluddin*, 2017. <https://doi.org/10.24014/jush.v23i2.1201>.
- Susanto, Erika Feri, and Anisia Kumala. "Sikap Toleransi Antaretnis." *TAZKIYA: Journal of Psychology*, 2019. <https://doi.org/10.15408/tazkiya.v7i2.13462>.
- Taftazani, Budi Muhammad, Fitri Hajar Purnama, and Santoso Tri Raharjo. "PEKERJAAN SOSIAL UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA." *Share : Social Work Journal*, 2020. <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.25663>.
- Taopan, Nimrod Frebdes, Petrus Ly, and Leonard Lobo. "PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SIKAP HIDUP TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA KUPANG." *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2020. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i1.40086>.
- Tundzirawati, Tundzirawati, and Binahayati Rusyidi. "UPAYA PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK JALANAN." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2015. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13231>.
- Vanheeswijck, Guido. "Tolerance from a Religious Perspective: A Response to Susan Mendus." *Bijdragen*, 2010. <https://doi.org/10.2143/BIJ.71.4.2064954>.
- Watunglawar, Balthasar, and Katarina Leba. "KESEJAHTERAAN SOSIAL: Sebuah Pespektif Dialektis." *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2020. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i1.40127>.

Yunus, Firdaus M. "Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya." *Substantia*, 2014.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

## EKSISTENSI MAHASISWA MELALUI PEMBERDAYAAN BIDANG KEAGAMAAN DI NAGARI SIMANAU

Irwandi<sup>1\*</sup>, Romi Maimori<sup>2</sup>

<sup>1</sup> IAIN Batusangkar 1; irwandi@iainbatusangkar.ac.id

<sup>2</sup> IAIN Batusangkar 2; romimaimori@iainbatusangkar.ac.id

\* Correspondence

**Abstract:** Student involvement in religious activities is a must for students, especially students of the Department of Islamic Community Development (PMI) of the Faculty of Ushuluddin, Adab and Da'wah IAIN Batusangkar. This direct involvement is one form of applying science, especially in scientific studies of community development. Community service activities carried out by PMI students who are under the auspices of the PMI majors student association and their lecturers are carried out for one week located in Nagari Simanau Kab. solo. The research carried out in this activity is to see the extent to which students exist using a qualitative method with a descriptive approach. From the results of the research, it was found that the involvement of students in community service activities is very much needed because this involvement has a positive impact on the program and the actualization of activities in the future.

**Abstrak:** Keterlibatan Mahasiswa dalam kegiatan keagamaan sudah merupakan suatu keharusan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) FAkultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah IAIN Batusangkar. Keterlibatan secara langsung tersebut merupakan salah satu bentuk mengaplikasikan keilmuan, terutama dalam kajian keilmuan pengembangan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa PMI yang bernaung dalam himpunan mahasiswa jurusan PMI beserta para dosen dilaksanakan selama satu minggu berlokasi di nagari Simanau Kab. Solok. Penelitian yang dilaksanakan dalam kegiatan ini untuk melihat sejauhmana eksistensi mahasiswa dengan menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Dari hasil penelitian dimaksud didapatkan hasil bahwasanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian sangat diperlukan oleh masyarakat karena keterlibatan tersebut membawa kepada dampak positif terhadap program dan aktualisasi kegiatan dimasa yang akan datang

**Kata Kunci:** Mahasiswa, Dakwah, Pengabdian

---

### 1. Pendahuluan

Dakwah merupakan usaha membangun dan mengembangkan masyarakat. Menurut (M. Rosyid dkk, 2017) dakwah merupakan upaya mengembangkan potensi masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan agama adalah tanggungjawab manusia, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Karena itu dakwah harus bersifat integrative, menyatu dengan kehidupan masyarakat,

dan membangun kesadaran tunggal akan makna dan misi pembangunan dan perubahan sesuai dengan firman Allah Q.S Ali Imran Ayat 110

عَنِ الْمُنَكَّرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ حَيْرًا كُلُّهُمْ حَيْرٌ إِخْرَجُتُ لِلنَّاسِ ثَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ  
لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِيْلُونَ

Artinya: *Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*

Serta Q.S Ali Imran Ayat 104

وَيَنْهَايُونَ عَنِ الْمُنَكَّرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَكُنْ مَنْكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebijakan, menyeru (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*

Berlandaskan hal tersebut maka Dakwah harus mampu memanfaatkan celah guna menyatukan visi dan misi dakwah dengan kehidupan yang dialami masyarakat. Aplikasi pelaksanaan kegiatan dakwah merupakan tanggungjawab umat Islam, dakwah diartikan sebagai bentuk manifestasi wakil (khalifah) Allah SWT dipermukaan bumi, sesuai dengan makna dakwah secara terminologi menurut Toha Yahya Umar dalam (Samsul Munir Amin,2009) adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah tuhan untuk keselamatan dan kebahagian dunia dan akhirat. Pelaksanaan kegiatan dakwah ini berkaitan dengan motode-metode dakwah yang telah dilaksanakan selama ini. Menurut (Asmuni Syukir, 1983). Diantara metode tersebut menurut Asmuni Syukir diantaranya; metode ceramah (retorika), metode Tanya jawab, metode debat (Mujadalah), metode percakapan antar pribadi (percakapan bebas), metode Demonstrasi, metode mengunjungi rumah (Silaturrahmi).

Pelaksanaan metode dakwah diaplikasikan dalam bentuk kebebasan dalam berdakwah sesuai dengan kebutuhan masing-masing umat. Tanggungjawab Dakwah yang dibeankan kepada manusia dan dikhususkan untuk sebagian umat dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan dan dilaksanakan baik secara perorangan, kelompok atau organisasi, baik organisasi formal maupun non formal.

Berkenaan dengan hal tersebut maka mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar turut bertanggungjawab dalam mewujudkan makna sebagai Khalifah dipermukaan bumi, dengan memberikan kontribusi terhadap perkembangan kehidupan manusia untuk kebahagian mereka didunia maupun diakhirat, salah aplikasi keterlibatan mereka adalah dengan mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Nagari Simanau Kec. Tigo Lurah Kab. Solok Sumatera Barat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa PMI, merupakan salah satu bentuk aplikasi keilmuan di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar. Salah satu tujuan dari pendirian jurusan ini adalah untuk menumbuhkembangkan kader-kader professional dalam keilmuan Pengembangan masyarakat Islam. Berbagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah: kegiatan pengembangan Keilmuan keislaman melalui kegiatan Taman Pendidikan Al-quran, Rumah Tahfiz, dan kegiatan-kegiatan lain berhubungan dengan bidang ekonomi, sosial dan budaya



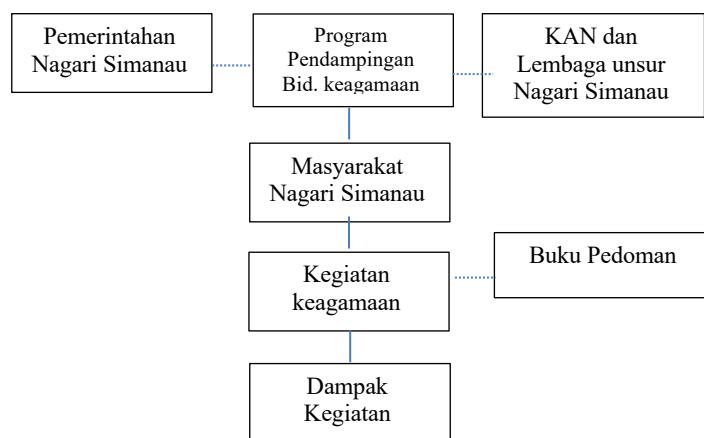
Gambar 1. Pelepasan secara resmi oleh Dekan FUAD IAIN Batusangkar

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Metode ini menurut (Creswell dalam Hasirs) bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, informan penelitian adalah; wali nagari, dosen pembimbing, lembaga unsur nagari, dan mahasiswa, dengan metode pengumpulan data adalah dengan metode wawancara, observasi lapangan, dengan teknik analisis

data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. kerangka konseptual pembinaan keagamaan yang akan dikembangkan adala sebagai berikut:

Tabel 1

Konsep Partisipasi Masyarakat Nagari Simanau  
(ini bagan iya bukan tabel, kalau tabel silahkan mengikuti template penulisan tabel)



## 2. Hasil Penelitian

### 2.1. Gambaran Umum

Secara monografis, Nagari Simanau berada di Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok. Luas Nagari 7,63 persen dari luas wilayah Kecamatan Tigo Lurah atau 46 kilometer persegi. Jarak tempuh dari nagari Simanau ke ibukota kecamatan adalah 13 KM, dan ke ibukota Kabupaten berjarak 82 KM. jumlah penduduk dari data tahun 2018 sebanyak 1626 jiwa terdiri dari 795 laki-laki dan 834 orang perempuan. Nagari Simanau terdiri dari 3 (tiga) jorong yaitu jorong Karang Putih, Jorong Parik Batu, dan Jorong Tanjuang Majulai. Dengan fasilitas kesehatan sebanyak 1 (satu) unit Pukesmas Pembantu, dengan fasilitas keagamaan terdiri dari dari 13 (tiga belas) unit masjid dan 9 (Sembilan) buah mushalla



Gambar 2, Peta Nagari Simanau Kec. Tigo Lurah

## 2.2. Perencanaan kegiatan

Taufiqurokhman (2008) mengungkapkan Perencanaan kegiatan perlu disusun sesuai dengan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan, menurut Taufiqurokhman perencanaan adalah cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama yang berorientasi pada masa mendatang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program. Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik, dalam menyusun sebuah rencana, hal pertama yang harus dilakukan adalah memusatkan pikiran kepada apa yang dikerjakan, dalam bentuk tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

Perencanaan pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan perencanaan pengembangan unsur-unsur yang berkaitan dengan bidang agama, pendidikan, sosial dan budaya. Pengembangan masyarakat kita kenal merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan belakang ini. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan kegiatan agama, sosial, ekonomi dan budaya (Harry Hikmat, 2013).

Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk offline dengan catatan peserta maupun jajaran kepanitiaan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dan menjaga jarak. Dilanjutkan dengan acara pembukaan oleh Dekan Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah di Auditorium FUAD, Kegiatan pembukaan Pengabdian di Nagari Simanau Oleh PJ Wali Nagari Simanau, Seminar mengenai UMKM dengan Masyarakat Nagari Simanau, Kunjungan ke sekolah yang ada di Nagari Simanau, Lomba cerdas cermat, lomba memasak antar ibu-ibu nagari simanau, lomba permainan anak-anak, pemberdayaan pada kegiatan keagamaan anak-anak MDA Nagari Simanau, pemberdayaan pada kegiatan keagamaan yasinan ibu-ibu Nagari Simanau, pemberdayaan pada kegiatan rumah literasi dan yayasan Fastabiqul Khairat, Outbon,

subuh berjama'ah, berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan masyarakat dan di tutup secara meriah dengan melibatkan sanggar kesenian Anak Nagari Simanau, Perangkat Nagari Simanau, Masyarakat Nagari Simanau dan tanpa ketinggalan juga partisipasi dari mahasiswa PMI. Berdasarkan hal tersebut maka dalam melaksanaan kegiatan kepada masyarakat di Nagari Simanau telah dilakukan beberapa langkah perencanaan untuk mengoptimalkan kegiatan tersebut dengan membentuk panitia pelaksana, tahapan perencanaan diantaranya:

Tabel 1  
Perencanaan Kegiatan

HARI	KEGIATAN	KET
I	FDG antara pihak kampus dengan masyarakat	
II	1. Eksploitasi ekonomi kreatif 2. Pelaksanaan program pendidikan di rumah pintar	
III	Pelaksanaan program pendidikan	
IV	Pelaksanaan kegiatan pengembangan kuliner khas nagari	
V	Pelaksanaan kegiatan Keagamaan	
VI	Pelaksanaan kegiatan pendirian rumah literasi	
VII	Outbound dan kegiatan kesenian anak nagari	

### 2.3. Pelaksanaan Kegiatan

Benjamin Bukit dkk (2017) mengatakan terwujudnya kegiatan yang akan dilaksanakan dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia Keberhasilan suatu organisasi baik besar maupun kecil bukan semata -mata ditentukan oleh seumber daya alam yang tersedia, akan tetapi banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berperan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan. pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan tersebut perlu strategi manajemen pengelolaan yang berorientasi pada pelaksanaan dan pengendalian secara baik dan benar. Dalam sistem pelaksanaan dan pengendalian dimaksud akan berhadapan dengan persoalan-persoalan sumber daya manusia yang terhimpun sebagai makhluk sosial dengan berbagai sifat kemajemukan yang dimiliki.

Mengelola kegiatan pengabdian tentunya berkaitan dengan sikap mental yang tangguh dan kuat. Menurut Rappaport dalam Harry mengemukakan bahwa, praktik dan kegiatan yang berbasis pemberdayaan adalah bahasa pertolongan yang diungkapkan dalam bentuk simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut kemudian

mengomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk mengubah hal-hal yang terkandung dalam diri kita (*inner-space*), orang-orang penting dan masyarakat sekitar.

Wisnu Indrajid mengatakan bahwa Keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan merupakan kunci utama dalam keberhasilan program yang dilaksanakan. Komitmen bersama antara panitia dan masyarakat akan mementuk sinergisitas yang baik. Daya sinergisitas akan terbentuk ketika tiap-tiap anggota sepakat untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

### 2.3.1 Pengembangan Bidang Agama

Pengembangan bidang keagamaan dalam konsep yang dilaksanakan adalah pengembangan sikap partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan agama baik dilihat dari pemahaman nilai-nilai ibadah maupun pemahaman dan kegiatan nilai-nilai sosial kemasyarakatan , persoalan-persoalan tentang pengembangan kegiatan bidang keagamaan akan dilihat dari dua aspek penting yang dikaitkan dengan hak azazi manusia diantaranya bagi sebagian orang ekspresi pengembangan kegiatan keagamaan dilihat dari wadah organisasi atau tereksperikan dalam agama yang terorganisir, sementara dipihak lain kegiatan keagamaan yang bersifat kerohanian adalah masalah individual yang mungkin dialami dalam bentuk music, pekerjaan fisik atau dalam bentuk kegiatan lainnya.

Pengembangan bidang keagamaan dalam aktifitas kegiatannya tidak terlepas dari pemahaman tentang kebudayaan, hal ini akan terlihat dari beberapa kegiatan kegiatan keagamaan dan spiritual sebagai bagian dari budaya. Tentunya pengembangan masyarakat dapat dipahami secara umum, perlu memberi ruang bagi ekspresi dan pengalaman spiritual dalam berbagai bentuk. Menurut (Agus Ahmad Safei dkk, 2020) Dalam hal ini penting diperhatikan bahwa persoalan-persoalan budaya dan agama serta pemahaman spiritual harus dilihat secara inklusif bukan ekslusif, karena salah satu bahayanya adalah bahwa penganut tradisi tertentu yang lebih fundamentalis akan mengklaim kebijakan superior dan tidak akan menerima atau bahkan menoleransi ekspresi alternatif spiritual.

Sementara komunitas yang berbasis di sekitar pemahaman yang ekslusif tetangn agama mungkin kuat, dan ulet akan mendorong dialog antar pemahaman spiritual yang telah terbukti sangat bermanfaat di banyak komunitas karena orang akan

belajar lebih banyak tentang pengalaman spiritual satu sama lain daripada tetap terkunci dalam diri mereka sendiri.

Landasan pengembangan bidang keagamaan dan pendalaman tentang spiritualisasi umat melalui dialog telah di nyatakan dalam Q.S. An-Nahl ayat 125

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ أَحْسَنَ دُرُجَاتُ الْحَسَنَةِ وَاجْدَلُهُمْ بِالْأَنْتِي  
هِيَ

Artinya: serulah (*manusia*) kepada jalan tuhanmu dengan *hikmah* dan *pengajaran yang baik*, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik". Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jaln-Nya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk

### 2.3.2. Konsep Partisipasi Masyarakat

Konsep Partisipasi dalam pembangunan yang mengarah kepada perencanaan berbasis akar rumput (*bottom up planning*) konsep ini muncul dari reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan pembangunan sosial dan ekonomi yang bersifat *top-down*. partisipasi dalam pembangunan bertujuan menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan dengan meningkatkan keterlibatan kelompok marginal secara ekonomi dan sosial dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pada titik akhir partisipasi merupakan sebuah trasformasi. tentunya salah satu teori yang digunakan adalah teori *Participatory Action Research* (PAR).

berdasarkan kepada teori dan perkembangan kegiatan sosial keagamaan di lapangan maka Sebagai mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam dan calon sarjana pengembangan Masyarakat Islam pemahaman tentang partisipasi masyarakat terhadap program kegiatan yang dilaksanakan harus dipahami secara baik. Partisipasi mempunyai arti dilihat dari pengertian sebagai berikut: *pertama* partisipasi diartikan sebagai pemekaan (membuat Peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemampuan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. *Kedua* partisipasi diartikan sebagai kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pemaknaan ini hampir sama dengan pemaknaan pertama yang membedakan adalah kontribusi sukarela masyarakat sehingga yang timbul adalah penghematan biaya, dan yang *ketiga* adalah partisipasi adalah proses pengambilan keputusan secara bersama

antara pemerintah dan masyarakat, hal ini berpengaruh kepada; keterlibatan dalam identifikasi masalah, proses perencanaan, pelaksanaan proyek, evaluasi, monitoring dan mitigasi (mengurangi) resiko. *Keempat*, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Inti dari partisipasi ini adalah sikap sukarela manusia masyarakat untuk membantu keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukannya sendiri. Dan *Kelima*, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

### **2.3.3 Partisipasi Mahasiswa Dalam Kegiatan Keagamaan**

Mahasiswa merupakan bagian terkecil dari kumpulan masyarakat yang terbilang unik. jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa tidak terlepas dari peran mahasiswa. gerakan-gerakan perjuangan mahasiswa yang terhimpun dalam organisasi-organisasi baik secara formal maupun non-formal telah terbukti menjadi cikal bakal penentuan nasib bangsa kedepan hal ini dibuktikan lahirnya semboyan “sumpah Pemuda”. Berdasarkan hal tersebut potensi yang dimiliki mahasiswa sebagai kaum intelektual tentunya harus diberdayakan sesuai keilmuan dan peran masing-masing, pemberdayaan itu tentunya harus menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dan pemerintahan, salah satu contoh peran mahasiswa tersebut adalah, mahasiswa sebagai penyambung lidah pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, karena kita yakin bahwa sanya program-program pemerintah yang sangat beragam tidak akan mudah cepat sampai ketengah-tengah masyarakat. oleh karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mahasiswa dalam menyampaikan informasi tersebut.

dilain sisi mahasiswa harus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat, karena secara tidak langsung mahasiswa adalah makhluk sosial yang datang dan akan berada ditengah-tengah masyarakat, oleh karena itu peran sebagai bagian mayarakat akan melekat pada diri mahasiswa baik sebagai pembela kepentingan masyarakat atau sebagai orang berpartisipasi aktif. oleh karenanya mahasiswa akan berada dua sisi tersebut sebagai sesuatu bagian dari kontrol sosial, apabila kebijakan pemerintah berada pada posisi yang benar maka mahasiswa harus menjadi pelopor utama dalam kemajuan, tetapi sebaliknya apabila ada kebijakan pemerintah yang tidak mewakili

kepentingan rakyat maka mahasiswa harus dapat menggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

secara mikro peran serta mahasiswa tentunya juga dilihat pada tingkat pendidikan dan program studi yang mereka jalani seperti adanya perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi keagamaan. Mahasiswa yang berpendidikan ke-keislaman secara *implisit* mempunyai tanggungjawab moral terhadap perkembangan kegiatan keagamaan di berbagai tempat baik dalam bentuk makro maupun mikro. sebagai generasi muda yang dididik di lembaga pendidikan yang profesional, pada dasarnya secara teori telah belajar tentang ilmu-ilmu sosial yang berorientasi kepada ilmu-ilmu kemasyarakatan, dan untuk meningkatkan kemampuan tersebut maka perlu praktik lapangan yang dilaksanakan baik secara formal maupun non-formal.

kemampuan akademisi yang dinilai di secara administratif pada setiap tingkatan dan akan lebih bermakna apabila para mahasiswa berpartisipasi langsung terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan keagamaan secara langsung bisa mewakili masyarakat secara umum sehingga kedudukan mahasiswa di tengah-tengah masyarakat dapat diartikan sebagai sebagian umat yang menyeru kepada kebijakan. hal ini tentunya dapat mewakili keterlibatan tersebut sesuai dengan ayat yang diturunkan oleh Allah SWT Q.S Surat al-A'raf ayat 159 menyebutkan

وَمِنْ قَوْمٍ مُّؤْسَىٰ أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَيَهُدَوْنَ

Artinya: *Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan (dasar) kebenaran dan dengan itu (pula) mereka berlaku adil menjalankan keadilan.*

Terdapat pula dalam Surat al-A'raf ayat 181 menyebutkan:

وَمِنْ خَلْقًا أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَيَهُدَوْنَ

Artinya: *Dan di antara orang-orang yang telah Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan (dasar) kebenaran, dan dengan itu (pula) mereka berlaku adil.*

Berdasarkan ayat tersebut maka terlihat jelas bahwa dakwah yang disampaikan kepada masyarakat dapat di laksanakan oleh siapapun baik secara pribadi, kelompok maupun organisasi yang bersifat formal dan informal. partisipasi mahasiswa dalam kegiatan keagamaan merupakan dampak positif dari pendidikan yang mereka jalani

selama diperguruan tinggi, hal ini juga mempermuda mereka berada ditengah-tengah masyarakat apabila mereka telah keluar dari penggembelengan “*kawacandradimuka*”

### **2.3.4 Partisipasi Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Dalam Kegiatan Keagamaan**

Mahasiswa jurusan pengembangan Masyarakat Islam yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Pengebangan Masyarakat Islam (HMJ PMI), berusaha untuk mengaktualisasi keilmuan yang mereka dapat kan khususnya ilmu-ilmu pemberdayaan. perwujudan aktualisasi keilmuan yang melibatkan partisipasi masyarakat dilaksanakan dengan beberapa langkah dengan pendekatan metode PRA (participatory rural appraisal). metode ini mengambarkan pendekatan yang memungkinkan masyarakat untuk berbagai, mengembangkan dan menaganalisa pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan aksi. pendekatan melalui metode ini dilaksanakan dalam bentuk Pemetaan masalah dan penyusunan konsep kegiatan-kegaitan keagamaan.

Dalam pemetaan masyarakat dapat menunjukkan sejumlah masalah baik secara internal maupun eksternal. pemetaan masalah terhadap kegiatan keagamaan dilaksanakan dalam bentuk pendampingan oleh dosen dan mahasiswa.. dalam pemetaan masalah ini mengajak partisipasi untuk mengenal konsep-konsep kegiatan keagamaan dengan baik. dalam pemetaan ini masyarakat berlatih untuk melakukan praktek nyata, sehingga memberikan perubahan terhadap pola fikir dan pola bertindak dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. sejumlah masalah yang dihasilkan dalam kegiatan pemetaan ini melahirkan beberapa konsep-konsep kegaitan keagamaan yang dilaksanakan dalam Penyusunan konsep Program kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dengan berbagai program baik program jangka pendek maupun jangka panjang dan penyusun bentuk kegiatan keagamaan dengan melibatkan lembaga unsur masing-masing yang ada di masyarakat.

penyusunan konsep kegiatan keagamaan dituangkan dalam program kerja dengan jenis kegiatan sebagai berikut: pembinaan remaja masjid, pembinaan wirid yasinan, pengelolaan Taman pendidikan al-Quran, pengelolaan rumah tahfidz,dan pendirian perpustakaan masjid

tabel: 2  
jenis kegiatan bidang agama

N o	Kegiatan	pengelola utama	media
1	pembinaan remaja masjid	1. pengurus remaja masjid 2. lembaga unsur alim ulama, unsur pemuda dan cadiak pandai	buku pedoman pengelolaan laboratorium Sosial keagamaan
2	pembinaan wirid yasinan	1. pengurus masjid dan mushalla 2. lembaga unsur alim ulama, bundo kanduang dan cadiak pandai	buku pedoman pengelolaan laboratorium Sosial keagamaan
3	pengelolaan Taman pendidikan al-Quran	1. pengurus masjid dan mushalla 2. lembaga unsur alim ulama, dan cadiak pandai	buku pedoman pengelolaan laboratorium Sosial keagamaan
4	pengelolaan rumah tahfidz	1. pengurus masjid dan mushalla 2. lembaga unsur	buku pedoman pengelolaan laboratorium Sosial keagamaan
5	pengelolaan perpustakaan masjid	1. pengurus masjid dan mushalla 2. lembaga unsur	buku pedoman pengelolaan laboratorium Sosial keagamaan

Penentuan kegiatan keagamaan yang diprogramkan dan direncanakan dituangkan dalam bentuk regulasi pengesahan oleh Walinagari, sebagai bentuk dukungan langsung pemerintah pada kegiatan keagamaan. dan untuk mendukung kegiatan tersebut sudah di rencanakan dalam bentuk program kerja yang di susun oleh masing-masing lembaga, seluruh kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa program studi pengembangan masyarakat Islam telah menyusun buku pedoman laboratorium sosial keagamaan.

### **2.3.5 Dampak Partisipasi Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Dalam Kegiatan Keagamaan**

Dalam kamus bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD) yaitu pengaruh kuat yang mendarangkan akibat (baik negatif maupun positif), Setiap individu bilamana saat membuat keputusan yang terjadi sudah dipikirkan secara matang-matang dan biasanya akan membawa dampak yang positif atau negatif. Dari beberapa penjabaran di atas dapat kita bagi menjadi dua pengertian: a). Pengertian Dampak Positif Pengertian dampak adalah sebuah keyakinan untuk mempengaruhi atau memberikan perubahan supaya dapat mengikuti alur jalannya. Sedangkan positif adalah sesuatu hal yang pasti dan dapat terurai dengan memperhatikan hal-hal yang baik. Didalam positif terdapat hasil perubahan yang membawa suasana jiwa yang tertuang didalam pelaksanaan kegiatan kegembiraan, optimis. Bagi individu yang mempunyai fikiran positif mengetahui bahwa dirinya dapat menangkal pikiran negatif. b). Pengertian Dampak Negatif Dampak negative memiliki arti yang sangat kuat yaitu pengaruh yang membawa aura negatif, dampak yakni suatu keyakinan untuk mempengaruhi seseorang tidak berbuat sesuai tujuan mereka atau menjauhi hal-hal yang baik. Hasil yang diperoleh dalam dampak negative tidak selalu mendarangkan suasana jiwa yang terbuang dalam kehidupan menjadi nyaman dan tentram.

berdasarkan pengertian di atas maka dampak dari kegiatan ini akan mempengaruhi proses partisipasi mahasiswa jurusan pengembangan masyarakat Islam IAIN Batusangkar di Nagari Simanau diselenggarakan lebih kurang satu minggu dan di dampingi oleh dosen pembimbing secara langsung dan tidak langsung memberikan dampak yang positif kepada kegiatan keagamaan. proses partisipasi yang dilaksanakan mulai dari perencanaan dan proses pelaksanaan dilaksanakan sepenuhnya dibantu oleh pemerintah nagari, lembaga unsur dan masyarakat secara keseluruhan. dukungan yang diberikan oleh pemerintah nagari berupa fasilitas umum dan fasilitas administrasi, dan dukungan masyarakat ditandai dengan, antusiasnya masyarakat dalam proses kegiatan dimaksud.



Gambar 3, Kegiatan keagamaan dan partisipasi masyarakat

### 3. Kesimpulan

Pengembangan bidang keagamaan dalam konsep yang dilaksanakan adalah pengembangan sikap partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan agama baik dilihat dari pemahaman nilai-nilai ibadah maupun pemahaman dan kegiatan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, persoalan-persoalan tentang pengembangan kegiatan bidang keagamaan akan dilihat dari dua aspek penting yang dikaitkan dengan hak azazi manusia diantaranya dilihat dari wadah organisasi atau terekspresikan dalam agama yang terorganisir, sementara dipihak lain kegiatan keagamaan yang bersifat kerohanian adalah masalah individual yang mungkin dialami dalam bentuk musik, pekerjaan fisik atau dalam bentuk kegiatan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut potensi yang dimiliki mahasiswa sebagai kaum intelektual tentunya harus diberdayakan sesuai keilmuan dan peran masing-masing, pemberdayaan itu tentunya harus menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dan pemerintahan, salah satu contoh peran mahasiswa tersebut adalah, mahasiswa sebagai penyambung lidah pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, karena kita yakin bahwa sanya program-program pemerintah yang sangat beragam tidak akan mudah cepat sampai ketengah-tengah masyarakat.

Sebagai generasi muda yang dididik di lembaga pendidikan yang profesional, pada dasarnya secara teori telah belajar tentang ilmu-ilmu sosial yang berorientasi kepada ilmu-ilmu kemasyarakatan, dan untuk meningkatkan kemampuan tersebut maka perlu praktik lapangan yang dilaksanakan baik secara formal maupun non-formal. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan keagamaan merupakan dampak positif dari pendidikan yang mereka jalani selama diperguruan tinggi, hal ini juga mempermudah mereka berada ditengah-tengah masyarakat apabila mereka telah keluar dari penggembelangan “kawacandradimuka” sejumlah masalah yang dihasilkan dalam kegiatan pemetaan ini melahirkan beberapa konsep-konsep kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dalam Penyusunan konsep Program kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dengan berbagai program baik program jangka pendek maupun jangka panjang dan penyusun bentuk kegiatan keagamaan dengan melibatkan lembaga unsur masing-masing yang ada di masyarakat.

Tanggungjawab Dakwah yang dibeankan kepada manusia dan dikhawasukan untuk sebagian umat dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan dan dilaksanakan baik secara perorangan, kelompok atau organisasi, baik organisasi formal maupun non formal.

Berkenaan dengan hal tersebut maka Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar turut bertanggungjawab dalam mewujudkan makna sebagai Khalifah dipermukaan bumi, dengan memberikan kontribusi terhadap perkembangan kehidupan manusia untuk kebahagian mereka didunia maupun diakhirat, salah aplikasi keterlibatan mereka adalah dengan mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Nagari Simanau

## **DAFTAR PUSTAKA**

**(gunakan istilah refrensi supaya sesuai dengan template)**

Agus Ahmad Safei dkk, *Pengembangan Masyarakat perspektif Islam dan Barat*, Simbiosa Rekatama Media, Bandung. Cetakan Pertama 2020

(penulisan refrensi mengikuti template, contohnya penulisan tahun terbit buku setelah nama penulis)

Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1983

Benjamin Bukit dkk , *PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*, Zahir Publishin, Cet. 1. Yogyakarta, 2017

Dokumentasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar tahun 2021

Haris herdiansyah, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, selemba humanika Jakarta selatan

Harry Hikmat, *Strtegi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung 2013

<https://kbpi.web.id/dampak>. Diakses tanggal 29 Maret 20022Langgam.Id. “Nagari

Simanau, Tigo Lurah, Kab. Solok” <https://langgam.id/nagari-simanau-tigo-lurah-kabupaten-solok/>

M. Rosyid dkk. *Pengantar Ilmu Dakwah*, Yokyakarta: Samudra Biru, 2017

Quran terjemahan “kementerian Agama RI”

Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Hamzah, 2009.

Taufiqurokhman, *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Prof Moestopo, Cet 1, Jakarta Pusat 2008

Wisnu Indrajid dkk. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*, Intrans Publishing, Jatim



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

## **Analisis Deskriptif Desa Wisata Religi Mlangi Berbasis Komponen 3A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas) Pariwisat**

Shofi'unnafi<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; shofiunnafi@uin-suka.ac.id

\* Correspondence: shofiunnafi@uin-suka.ac.id

**Abstract:** This study aims to explore and describe the components of tourism in the study of religious tourism in Mlangi Tourism Village. This study uses qualitative research methods with data collection techniques through respondent interviews, field observations and literature related to the research title. The results of this study indicate that by analyzing the 3A component, the Mlangi Religious Tourism Village has fulfilled as a tourist destination which can be seen from 1) Historical and cultural attractions in the form of relics of the Jami' Mlangi Mosque site, Kyai Noor Iman's Tomb site, and community life complete with traditions. traditions that are still preserved. 2) Accessibility, Mlangi Religious Tourism Village has easy access because it is quite close to the city center, other tourist destinations, major roads and public transportation nodes in Yogyakarta. In addition, tourists are also easy to get information related to destinations from social media. 3). Amenities, Mlangi Religious Tourism Village has various supporting facilities such as lodging, transportation, places to eat and drink, places of worship, parking lots and souvenir places.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan komponen-komponen pariwisata dalam studi wisata religi di Desa Wisata Mlangi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara responden, observasi dilapangan dan kepustakaan berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menganalisa komponen 3A, Desa Wisata Religi Mlangi telah memenuhi sebagai destinasi wisata yang nampak dari 1) Atraksi sejarah dan budaya dalam bentuk peninggalan situs Masjid Jami' Mlangi, situs Makam Kyai Noor Iman, serta kehidupan masyarakat lengkap dengan tradisi-tradisi yang masih dilestarikan. 2) Aksesibilitas, Desa Wisata Religi Mlangi memiliki kemudahan akses karena jarak yang cukup dekat dengan pusat kota, destinasi wisata lain, jalan besar dan simpul transportasi umum di Yogyakarta. Selain itu wisatawan juga mudah mendapatkan informasi terkait destinasi dari media sosial. 3). Amenitas, Desa Wisata Religi Mlangi terdapat berbagai fasilitas pendukung seperti penginapan, transportasi, tempat makan dan minum, tempat beribadah, lahan parkir dan tempat cenderamata.

**Kata Kunci:** Wisata Religi, Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, Desa Wisata Religi Mlangi

## 1. Pendahuluan

Indonesia mempunyai potensi wisata yang sangat besar dengan keindahan alam dan beragam budaya yang tersimpan didalamnya. Hal tersebut tentu menjadi dorongan bagi pemerintah hingga pelaku industri pariwisata untuk terus berinovasi dalam mengembangkan kepariwisataan Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), mengeluarkan Garapan prioritas hingga super prioritas bagi destinasi-destinasi wisata kovensional maupun halal (<https://kemenparekraf.go.id/>). Wisata religi di Indonesia telah lebih dulu eksis dalam perkembangan bisnis perjalanan wisata, salah satunya ialah perjalanan wisata ziarah walisongo. Selain itu, di Indonesia masih memiliki banyak situs bersejarah yang berwujud benda, bangunan, hingga aktivitas social kemasyarakatan yang kental nuansa Islam. Warisan agama dan budaya yang melahirkan berbagai keragaman yang memiliki karakteristik dan uniqueness yang dapat menjadi potensi pengembangan wisata secara umum dan secara khusus bagi wisata religi (Jaelani, et al, 2016).

Masifnya perkembangan industry pariwisata konvensional belum sepenuhnya dapat diikuti oleh perkembangan wisata religi. Pelaku-pelaku industry lebih banyak berkonsentrasi pada pembuatan dan pengembangan wisata konvensional yang dinilai lebih umum pasarnya. Salah satu penyebab kurang berkembangnya wisata religi ialah sempitnya pandangan tentang wisata religi itu sendiri, menganggap bahwa wisata religi hanya bisa dilakukan dengan mengunjungi makam atau kuburan semata (Widagdo dan Rokhlinasari, 2017). Padahal secara umum, wisata religi merupakan aktivitas perjalanan wisata yang tidak hanya mencari hiburan semata, melainkan bertujuan untuk mencari ibrah dengan mengunjungi tempat yang mempunyai makna khusus dan memiliki sejarah dalam ajaran dan keyakinan Islam. Dari penjelasan tersebut, maka wisata religi tidak hanya melakukan aktivitas ziarah kubur, melainkan dapat mengunjungi masjid dan tempat-tempat yang memiliki kaitan dengan penyebaran agama Islam.

Yogyakarta menjadi salah satu provinsi yang mempunyai banyak destinasi wisata, dari wisata alam, sejarah dan budaya. Yogyakarta mempunyai beragam budaya yang berbentuk fisik maupun non fisik. Potensi budaya berbentuk fisik meliputi Kawasan cagar budaya, sedangkan budaya non fisik berupa system nilai atau norma, system social dan perilaku social di masyarakat (Yulianto, 2017). Selain itu, Yogyakarta juga terdapat

banyak desa wisata yang menjadi salah satu penopang industry pariwisatanya (<https://visitingjogja.jogjaprov.go.id/>). Dalam sejarah, Yogyakarta mempunyai peranan penting dalam aktivitas penyebaran ajaran islam di pulau jawa. Hal itu nampak dari keberadaan Masjid Gede Kauman yang berdiri disekitar bangunan keraton dan pusat pemerintahan. Ditempat yang lain pula terdapat suatu Kawasan yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam di Desa Mlangi, hal ini juga dapat menjadi modal dalam mengembangkan wisata religi di daerah Yogyakarta. Desa wisata sendiri merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Chaerunissa dan Yuniningsih, 2020). Desa Mlangi sendiri sejatinya merupakan desa yang dibangun khusus untuk pusat Pendidikan agama islam dalam lingkungan keraton Yogyakarta, termasuk dibangunnya masjid dilokasi tersebut sebagai tempat ibadah dan pusat Pendidikan. Tentu hal tersebut membuat Desa Mlangi menyimpan berbagai cerita sejarah, tempat bersejarah, dan struktur sosial kemasyarakatan yang kental dengan agama islam.

Perkembangan sebuah destinasi wisata tidak bisa dilepaskan dengan berbagai potensi yang dimiliki dan dibarengi komponen pendukung dalam upaya mendatangkan pengunjung. Saat ini desa wisata bak jamur dimusim hujan, banyak sekali bermunculan desa wisata baru di Yogyakarta dengan mengusung konsep kearifan lokal. Harmonisasi kearifan lokal dan potensi pariwisata karya manusia yang memiliki nilai ekonomis (Sugiyarto dan Amaruli, 2018). Hal ini tentu menjadikan setiap desa wisata harus melakukan disertifikasi produk untuk mempertahankan eksistensi dan bersaing dalam menajaring pengunjung. Namun terkadang, para pengelola dilanda kebingungan dalam menggali potensi wisata yang dimiliki sehingga perlu betul-betul mengetahui apa yang dimiliki dan bisa dijadikan strategi unggulan dalam memberikan inovasi baru. Sebuah destinasi harus memiliki komponen 3A (Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas) untuk mendukung aktivitas kepariwisataan pengunjung, seperti yang diungkapkan oleh Holloway, bahwa setiap pariwisata harus mengandung komponen 3A antara lain *attraction, accessibility, and amenity* (Holloway, dkk, 2009).

Selain komponen diatas, wisata religi memiliki daya tarik potensi wisata, sebab menurut Inskeep, wisata religi termasuk kedalam kategori daya tarik *cultural attraction*,

dimana daya tarik budaya yang dimaksudkan yaitu berdasarkan pada aktivitas manusia, contohnya yang mencakup sejarah, arkeologi, religi dan kehidupan tradisional (Inskeep, 1992). Desa wisata Mlangi mempunyai banyak modal untuk dikembangkan sebagai salah satu destinasi unggulan di Yogyakarta. Pengelola perlu melakukan inovasi dan melengkapi sarana dan prasarana pendukung aktivitas wisata religi di desa wisata Mlangi. Pelaku perjalanan wisata berharap sebuah kenyamanan dan kemudahan dalam menjangkau tempat wisata, serta bertujuan mendapatkan sebuah kebahagiaan, ketenangan dan bahkan dapat meningkatkan keimanannya, maka sangat penting bagi pengelola wisata untuk memperhatikannya.

Setiap produk wisata harus memiliki sesuatu untuk menarik minat pengunjung wisata, sehingga setiap pelaku industry pariwisata harus mengetahui setiap potensi lokasi yang dikelola sebagai sebuah destinasi wisata. Pertunjukan dalam destinasi wisata hingga fasilitas-fasilitas pendukungnya harus tersedia untuk memberikan pelayanan dan pengalaman terbaik bagi pengunjung. Maka konsep 3A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas) dapat menjadi acuan tiap pengelola untuk terus menjaga eksistensi dan mengembangkan produk wisatanya (<https://kemenparekraf.go.id/>). Pengunjung biasanya akan mencari informasi berkaitan dengan hal-hal menarik hingga bagaimana fasilitas yang ada dalam destinasi sebelum menentukan untuk berkunjung ke destinasi tersebut. Seperti yang ditemukan dalam penelitiannya Ramadhani, dkk, menyatakan bahwa secara bersama-sama konsep 3A memberikan pengaruh signifikan kepada keputusan berkunjung wisatawan (Ramadhani, Rini, dan Setiawan, 2021).

Atraksi wisata sendiri merupakan daya tarik didestinasi untuk disuguhkan dan dipertunjukkan kepada pengunjung yang bertujuan menghibur dan memberikan pengalaman yang berkesan. Menurut Mill, atraksi sesuatu hal yang menarik wisatawan mengunjungi destinasi wisata (Mill, 2010). Atraksi yang dimaksud dapat berbentuk atraksi budaya, atraksi alam, event, rekreasi dan atraksi hiburan (Goeldner, dkk, 2009). Pengunjung yang memiliki rencana dan berkunjung tentu harus diberikan pelayanan dan kemudahan untuk menjangkau destinasi wisata, maka aksesibilitas destinasi wisata perlu dipenuhi sebaik mungkin. Aksesibilitas merupakan sarana dan prasarana untuk menuju destinasi wisata (Cooper, dkk, 2000) Aksesibilitas meliputi infrastruktur jalan dan sarana

transportasi menuju ke destinasi, serta informasi tentang destinasi (Suryadana dan Octavia, 2015).

Amenitas merupakan semua fasilitas pendukung yang disediakan dan diperuntukan bagi pengunjung destinasi untuk memenuhi kebutuhan aktivitas perjalanan wisatanya. Amenitas meliputi sarana akomodasi penginapan, restoran, toilet umum, *rest area*, *souvenir shop*, tempat parkir, tempat ibadah dan lain-lain yang sebaiknya harus ada di suatu destinasi wisata (Rusvitasisari dan Solihin (2014). Secara umum konsep 3A lebih banyak digunakan wisata konvensional dalam melahirkan dan mengembangkan destinasi. Namun belum banyak wisata religi yang benar-benar memperhatikan komponen produk wisata berbasis 3A untuk meningkatkan daya tarik wisata religi itu sendiri. Jika digali lebih dalam, wisata religi menjadi salah satu wisata dengan minat khusus yang berbasis pada keyakinan agama islam. Wisata religi seyogyanya telah dilakukan oleh masyarakat sudah sejak lama, dengan yang paling dikenal ialah ziarah wali songo, dimana para pelaku wisata mengunjungi makam-makam para wali dengan tujuan ngalap berkah Allah lantaran waliullah tersebut.

Wisata religi dapat menjadi sarana dakwah dalam penyebaran agama Islam melalui aktivitas wisata di destinasi, destinasi dapat menawarkan objek yang menarik serta dapat menggugah kesadaran tentang kebesaran Allah SWT. Perlu diingat bahwa, perkembangan teknologi dan serbuan modernitas menjadi tantangan bagi penyebaran agama Islam, kebutuhan hal religious bagi setiap individu diperlukan untuk memberikan benteng ditengah arus globalisasi agar tidak semakin jauh dengan Allah SWT. Dari berbagai alasan diatas, peneliti tertarik menelusuri lebih dalam berkaitan hal tersebut di desa wisata religi Mlangi. secara histori, desa mlangi memiliki sejarah yang kental dengan penyebaran agama islam yang masih dalam hubungan dengan keraton ngayogyakarta. Tentu hal tersebut memberikan pesona daya tarik tersendiri bagi pengunjung, mengingat wisata religi tidak hanya memberikan hiburan semata, melainkan dapat memberikan kenyamanan secara jasmani dan rohani serta sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. namun apakah hal tersebut sudah tereksplorasi dengan maksimal dan bagaimana fasilitas destinasi serta akses menuju lokasi, sehingga peneliti merasa sangat perlu mengeksplorasi konsep 3A pariwisata dalam wisata religi dengan obyek Desa Wisata Religi Mlangi, dimana tersimpan banyak sejarah penyebaran ajaran/Pendidikan

agama islam dikemas dengan kearifan lokal yang dapat memberikan pengaruh pada tatanan kehidupan sosial ekonomi dimasyarakat Desa Mlangi.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Metode kualitatif berupaya menghasilkan data secara deskriptif (Cresswell, 2013). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari informan secara langsung di lapangan dengan teknik *purposive sampling* supaya mendapatkan data-data yang valid terkait judul penelitian. Informannya adalah pengunjung (wisatawan), warga lokal, dan pengelola desa wisata Mlangi. Setelah data diperoleh, peneliti melakukan analisis data dengan dengan display data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Untuk pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan trianggulasi sumber.

Penelitian ini dilakukan di Desa Mlangi, salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Desa Mlangi menjadi salah satu desa wisata dengan minat khusus pada hal religi, sehingga desa Mlangi menjadi desa wisata religi yang yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan perjalanan wisata di Provinsi Yogyakarta. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui komponen wisata yang dapat menjadi daya tarik dan pengembangan destinasi di Desa Wisata Religi Mlangi.

## 2. Hasil Penelitian

Industri pariwisata di Indonesia menjadi salah satu industri yang dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi dalam negeri. Hal ini mendorong para pelaku industri pariwisata untuk membuat terobosan-terobosan untuk menjaga eksistensi destinasi wisata yang dikelolanya (Shofi'unnafi, 2020). Perkembangan dan kemajuan pariwisata di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan seluruh masyarakat sebagai pelaku bisnis dari level mikro hingga makro (<https://kemenparekraf.go.id/>). Fenomena desa wisata saat ini dapat dijumpai diberbagai daerah, seolah tiap hari terdapat destinasi-destinasi baru yang berbasis di sebuah desa dengan komoditas kearifan lokal sebagai daya tariknya. Dengan menjamurnya desa wisata, ini menjadi bukti bahwa peran level mikro sudah dimulai dengan banyaknya masyarakat yang sadar akan potensi industry pariwisata dapat memberikan kesempatan

kerja dan memperbaiki kesejahteraan ekonominya. Desa wisata sendiri memiliki daya tarik dalam bentuk fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya masyarakatnya yang dikemas secara alami yang dapat memobilisasi kedatangan wisatawan (Zakaria, 2014).

Sebuah desa wisata digawangi oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dalam hal ini adalah warga lokal atau masyarakat sekitar, mereka mereka menjadi salah satu pemangku kepentingan yang strategis dalam pengembangan desa wisata. Pokdarwis mengetahui berbagai potensi yang dapat di manfaatkan untuk wahana hiburan pengunjung. Setiap destinasi wisata mempunyai daya tarik yang digunakan sebagai pemikat pengunjung untuk dating berkunjung. Seperti dalam penelitian Putrawan dan Ardana (2019), ditemukan bahwa pokdarwis memiliki peran untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan daya tarik pariwisata setempat melalui perwujudan sampa pesona. Selain daya tarik itu sendiri, Pokdarwis juga memperhatikan komponen-komponen penunjang produk wisata sebagai bentuk layanan pada pengunjung supaya merasa nyaman dilokasi wisata. Komponen 3A yang harus menjadi perhatian Pokdarwis dalam menjaga eksistensi dan mengembangkan destinasi wisatanya. Tentu hal ini juga sangat penting bagi wisata yang mempunyai minat khusus, seperti pengembangan wisata religi, terlebih wisata religi ini berada ditengah-tengah komunitas masyarakat yang sudah sangat lekat dengan kehidupan sosial yang sesuai dengan ajaran agama islam. Saat ini, tujuan pelaku perjalanan wisata tidak hanya sekedar mencari kesenangan semata, melainkan juga ingin mendapatkan kenyamanan dan keamanan secara jasmani dan rohani. Pemenuhan fasilitas-fasilitas penunjang wisata mutlak diperlukan, seperti tersedianya akomodasi yang memadahi dan mudahnya mendapatkan informasi-informasi tentang destinasi wisata religi tersebut.

Keberadaan sebuah destinasi memang tidak lepas dari beberapa komponen wisata itu sendiri, termasuk didalamnya adalah wisata religi, komponen itu terdiri dari atraksi, aksesibilitas dan amenitas. Eksistensi Desa Wisata Religi Mlangi sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, Mlangi menjadi salah satu tujuan wisata religi berbasis komunitas masyarakat dalam sebuah desa yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat lokal.

## 2.1. Atraksi Wisata

Komponen wisata dapat dikategorikan kedalam atraksi budaya, atraksi alam dan atraksi buatan. Atraksi yang dimiliki oleh Desa wisata religi Mlangi dapat dikategorikan pada atraksi budaya dan sejarah. Atraksi budaya merupakan daya tarik yang melekat pada hal-hal bersejarah, keagamaan, aktivitas masyarakat, dan tradisi-tradisi masyarakat baik dimasa lampau maupun dimasa sekarang (Inskeep, 1991). Desa Mlangi merupakan salah satu desa wisata dengan minat khusus pada religi, sehingga desa wisata ini masuk dalam kategori atraksi budaya, karena salah satunya memiliki daya tarik dengan keberadaan masjid Jami' yang identik dengan pusat peribadatan, peradaban dan penyebarluasan agama islam.

Dalam konteks wisata religi, masjid menjadi salah satu daya tarik wisata termasuk muatan sejarah dan arsitektur bangunannya yang memiliki makna khusus. Seperti yang disampaikan Nuril Anwar (2017), bahwa masjid merupakan pusat aktivitas ritual keagamaan bagi pemeluk agama Islam yang dapat memberikan kemaslahatan umat serta dapat sebagai arena kegiatan dakwah, dengan kata lain masjid dapat memberikan makna dan peran khusus dalam peningkatan spiritualitas seseorang (Anwar, jateng.kemenag.go.id, 2017). Masjid Jami' An-Nur Mlangi dibangun sekitar tahun 1760-an oleh Kyai Nur Iman atau Pangeran Hangabehi Sandiyo yang masih menjadi salah satu kerabat Sri Sultan Hamengku Buwono I, Masjid ini sekaligus menjadi salah satu dari lima Masjid Pathok Negara Kesultanan Ngayogyakarta sebagai simbol batas negara disisi barat. Pembangunan Masjid ini bebarengan dengan pembukaan Kawasan Desa Mlangi sebagai pusat Pendidikan dan pengajaran agama Islam di kerajaan Ngayogyakarta. Tentu terdapat banyak cerita bersejarah yang memiliki penuh makna yang dilekatkan pada masjid Jami' Mlangi, hal tersebut nampak dari arsitektur bangunan masjid khas keislaman jawa hindu. Nuansa klasik jawa kuno masih dipertahankan hingga saat ini, meskipun sudah melalui berbagai proses renovasi. Masjid jami ini memiliki beberapa sentuhan bangunan khas keraton yang diharmonisasikan dengan akulturasi gaya hindu jawa yang terlihat dari adanya gapura lengkap dengan limasan berundak dan Menara yang menjulang tinggi.

Keberadaan masjid jami' ini tentu merefleksikan penduduk desa mlangi memeluk agama islam yang sangat kuat. Dalam kepariwisataan, pengunjung bisa mendapatkan banyak pengalaman dari aktivitas wisatanya, seperti pengalaman spiritual serta

mendapatkan hiburan untuk menghilangkan perasaan jemu maupun stress dari rutinitasnya. Pengunjung dapat melakukan aktivitas wisata sekaligus mendekatkan diri pada Allah SWT dengan menyaksikan keunikan masjid Jami' beserta peninggalan-peninggalan kuno yang mempunyai sejarah Panjang seperti: Bedug dan mimbar kayu yang digunakan oleh Kyai Nur Iman memberikan ceramah keagamaannya dan mengajarkan ajaran agama Islam pada masanya. Selain menyaksikan hal tersebut, pengunjung juga akan jauh lebih mudah melaksanakan ibadah wajib maupun sunnahnya selama melakukan aktivitas wisata, hal itu karena terdapat fasilitas peribadahan yang lengkap dari akses tempat ibadah, air bersih untuk wudlu, serta toiletnya.

Selain masjid Jami' Mlangi, di Mlangi juga berdiri pesantren - pesantren sebagai pusat Pendidikan agama Islam. Berkaitan dengan tersebut, desa Mlangi disebut-sebut sebagai desa para santri yang terlihat dari banyaknya pesantren yang berdiri dan dari kehidupan sosial kemasyarakatannya yang religius. Adanya interaksi dan hubungan sosial telah membentuk sistem sosial yang terjadi dari rentetan hubungan bertahun-tahun (Axiaverona dan Soemanto, 2018). Hal ini terefrleksikan pesantren yang ada di Desa Mlangi dulunya hanya sebuah komunitas atau kelompok orang yang belajar ilmu agama Islam disebuah musolla kecil hingga berkembang menjadi pesantren dengan jumlah santri hingga ratusan. Hal ini membuat interaksi sosial warga di lingkungan Desa Mlangi sangat mencerminkan ajaran-ajaran Islam lengkap dengan kebudayaan dan tradisi yang dipegang erat secara turun temurun yang dapat menjadi daya tarik bagi pelaku perjalanan wisata.

Tradisi yang masih dilestarikan ialah tradisi Slametan (istilah Jawa) dan beberapa kesenian rakyat seperti Sholawatan Jawa, Kojan, Seni Rodad, Rengeng-Rengeng, Berjanjen dan Hadrah. Tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mlangi merupakan sebuah harmonisasi antara ajaran agama Islam dengan kebudayaan lokal (*local culture*) sebagai bentuk puji-pujian dan rasa syukur kepada Allah SWT. Budaya menjadi salah satu daya tarik wisata religi, biasanya budaya lokal termanifestasikan dalam bentuk Bahasa, kesenian, dan upacara-upacara adat (Setiyawan, 2012). Hal ini tentu menarik, sebab ditengah serbuan modernisasi masyarakat Desa Mlangi masih melestarikan tradisi dan belum tentu didapat pertunjukan tradisi serupa ditempat lain. Pada setiap bulan Ramadhan, ritual keagamaan di Desa Mlangi semakin meriah dengan

banyaknya pengunjung dari luar Desa Mlangi yang mengikuti pembelajaran di pesantren-pesantren, mengikuti pengajian-pengajian, atau hanya sekedar mengunjungi untuk berekreasi. Hal tersebut membuat Desa Mlangi menyediakan produk wisata dalam bentuk paket *live-in*, pengunjung dapat paket menginap dan merasakan hidup sosial berdampingan dengan masyarakat dan akan berinteraksi langsung. Meskipun Desa Mlangi menjadi pusat Pendidikan dan penyebaran agama Islam, mereka menerima pengunjung yang berasal dari keyakinan atau beragama yang berbeda, seperti pastor hingga dosen dan mahasiswa asing untuk mempelajari agama Islam maupun metode pembelajaran madrasah di pesantren yang ada di Desa Mlangi, tentu hal tersebut sebagai bentuk nilai-nilai toleransi antar umat beragama yang ditunjukkan warga masyarakat Desa Mlangi.

Dari menyaksikan keindahan arsitektur bangunan Masjid Jami' Mlangi yang bernuansa Islam, Hindu, serta Khas Keraton Jawa dan dibarengi merasakan interaksi sosial khas kehidupan Desa Santri, pengunjung Desa Wisata banyak mendapatkan nilai kehidupan sosial dan cerita sejarah yang dapat menunjukkan sikap saling menghormati dan keagungan Allah SWT. Selain itu, masih ada yang menarik dan tidak bisa dilewatkan ketika mengunjungi Desa Wisata Mlangi, terdapat situs makam Kyai Nur Iman atau Pangeran Hangabehi Sandiyo. Kyai Nur Iman masih kerabat tua Keraton Ngayogyokarto dan seorang yang ahli dalam pengajaran agama Islam dan menjadi orang yang menahkodai dan mengawali pembukaan desa Mlangi sebagai pusat Pendidikan dan penyebaran agama Islam.

Ziarah seyogyanya telah dilakukan dari masa Rasulullah, yang mana dulu sempat dilarang hingga diperbolehkan kembali dengan tujuan menjadi sebuah pengingat kepada seluruh umat manusia bahwasanya kematian dan kebesaran Allah adalah mutlak. Di Indonesia sendiri, ziarah walisongo sudah menjadi tren bagi umat muslim di jawa, hal tersebut tidak hanya dilakukan untuk meningkatkan keimanan, melainkan sebagai bentuk aktivitas wisata sehingga lebih familiar sebagai wisata religi. Daya tarik yang terkandung dalam aktivitas ziarah ini berbentuk daya tarik budaya dalam konteks kepariwisataan (Salmon, dkk, 2020). Sesuai yang disampaikan oleh beberapa ahli, wisata religi dapat dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat yang dianggap suci berupa makam orang-orang terkemuka maupun masjid yang diyakini dalam keyakinannya. Tentu keberadaan

situs makam Kyai Nur Iman memberikan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung Desa Wisata Religi Mlangi. Pengunjung yang melakukan aktivitas perjalanan wisata ke Desa Mlangi dapat berziarah ke makam tersebut dengan tujuan mengingat akan kematian, meningkatkan spiritualitas dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta mengirimkan doa kepada yang sudah meninggal dunia.

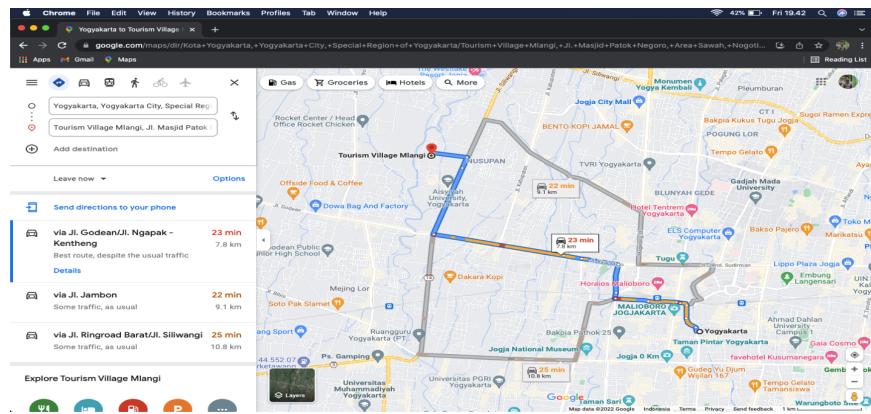
Dari aspek kepariwisataan, Desa Wisata Religi Mlangi memenui komponen daya tarik sebuah destinasi wsiata, sesuatu yang dapat menarik minat pengunjung mendatangi Desa Mlangi dengan keunikan yang tidak ditemukan didaerah lain. Pengunjung mendapatkan hiburan dengan rekreasi menyaksikan keindahan bangunan masjid, keindahan kehidupan sosail ala pesantren serta dapat mendekatkan diri pada Allah SWT yang memberikan dampak pada suasana batin yang lebih tenang secara duniawi dan ukhrowi.

## 2.2. Aksesibilitas Destinasi

Aksesibilitas merupakan sarana dan prasarana infrastruktur untuk menuju destinasi. Akses ini untuk memberikan kemudahan pada setiap pengunjung untuk mencapai tujuan destinasi wisata dengan mengedepankan kenyamanan, keamanan, dan jarak tempuh yang relatif cepat. Perkembangan industri pariwisata tidak bisa dilepaskan dari pembangunan akses jalan menuju destinasi wisata maupun dari destinasi wisata ke destinasi lain atau lokasi pendukung destinasi wisata. Aksesibilitas dapat membuka dan mendorong pasar potensial menjadi pasar nyata, hal ini mencakup transportasi masuk ke negara, inter dan intra region didalam suatu Kawasan (Suryadana dan Octavia, 2015).

Keberadaan infrastruktur jalan yang memadai menjadi salah satu pertimbangan pengunjung untuk mengunjungi sebuah destinasi wisata, hal ini berarti keputusan untuk berkunjung terpengaruhi oleh kondisi akses yang akan dilalui. Dalam penelitian Ramadhani, dkk menyatakan bahwa aksesibilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan (Ramadhani, dkk, 2021). Semakin baik kondisi aksesibilitas yang dimiliki oleh destinasi wisata, maka akan semakin tinggi pula keputusan wisatawan untuk akan dating berkunjung. Namun konsep pengelola destinasi wisata terhadap kemudahan menjangkau lokasi tidak hanya pada pembangunan jalan, melainkan papan petunjuk jalan juga akan sangat membantu pengunjung menemukan sebuah destinasi wsiata. Akses menuju Desa Wisata Religi Mlangi tergolong sudah terbangun

dengan sangat baik, mengingat lokasi desa ini juga tidak jauh dari pusat Kota Yogyakarta dan jalan-jalan besar (Ringroad Barat) yang ada di wilayah Yogyakarta.



Gambar 1: Jarak Desa Wisata Religi Mlangi Dari Pusat Kota Yogyakarta

Sumber: Dokumentasi, (2022).

Desa Wisata Religi Mlangi hanya berjarak -/+ 10 Kilometer dari pusat kota Yogyakarta, tentu hal ini memberikan fleksibilitas pemilihan transportasi untuk menjangkaunya. Selain kemudahan akses menuju destinasi tersebut, konektivitas dengan berbagai destinasi wisata lain juga sangat terjangkau. Dengan berkembangnya teknologi saat ini sudah tentu membuat lebih mudah pengunjung untuk menemukan suatu destinasi wisata, salah satunya menemukannya melalui google maps. Penting bagi pengelola wisata memastikan keberadaan destinasi wisatanya tersedia di aplikasi google maps tersebut.

Kemudahan menjangkau lokasi wisata tidak hanya bergantung pada infrastruktur jalan menuju lokasi wisata, namun kemudahan mendapatkan informasi terkait destinasi wisata juga sangat penting. Informasi terkait daya tarik wisatanya, bagaimana fasilitas-fasilitas produk wisata yang tersedia, informasi perjalanan wisata, termasuk informasi aksesibilitas tersebut. Tersedianya informasinya terkait Desa Wisata Religi Mlangi sangat diperlukan oleh calon wisatawan. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam mengakses informasi apapun, termasuk menemukan informasi terkait Desa Wisata Religi Mlangi. Pengelola dapat menyebarkan informasi dari mulut ke mulut dan memanfaatkan perkembangan teknologi melalui media sosial. Kecepatan pertukaran informasi saat ini sangat massif sekali, maka dengan bantuan media internet membuat pengunjung sangat

mudah untuk mendapatkan informasi terkait daya tarik wisata dan fasilitas pendukung wisata di Desa Wisata Religi Mlangi.

### 2.3. Amenitas Wisata

Selain kebutuhan akan atraksi yang menarik dan akses yang memudahkan pengunjung, masih terdapat komponen lain yang sangat penting untuk mendukung perkembangan sebuah destinasi wisata. Komponen lain itu adalah amenitas. Amenitas sendiri merupakan semua fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada disekitar destinasi wisata (Chaerunissa dan Yuniningsih, 2020) yang dapat dipergunakan oleh pengunjung untuk memenuhi aktivitas wisatanya dari mulai perjalanan, dilokasi wisata, hingga pengunjung meninggalkan destinasi wisata. Fasilitas-fasilitas pendukung yang diperlukan oleh pengunjung seperti: sarana transportasi, akomodasi penginapan, tempat beribadah, tempat makan, lahan parkir, pusat oleh-oleh, dan tempat istirahat (ruang terbuka). Pelaku perjalanan wisata religi yang banyak dilakukan oleh masyarakat sejak dulu ialah perjalanan wisata religi ziarah walisongo. Perjalanan tersebut biasanya memakan waktu beberapa hari sehingga kebutuhan pendukung selain aktivitas di destinasi wisata sangat diperlukan, seperti tempat beristirahat, tempat makan dan beribadah selama diperjalanan. Pengunjung suatu destinasi wisata bahkan tidak hanya sekedar memburu daya tarik wisatanya, melainkan juga akan memburu berbagai souvenir ataupun oleh-oleh untuk dibawa pulang sebagai bauh tangan maupun cenderamata sanak keluarganya.

Desa Mlangi dengan segudang cerita sejarahnya telah menobatkan diri sebagai desa wisata, yang mana perkembangan desa wisata di wilayah Yogyakarta sudah seperti jamur yang tumbuh subur dimusim hujan. Desa wisata baru yang ada di wilayah Yogyakarta terus bermunculan, sehingga Desa Mlangi juga harus terus melakukan inovasi untuk menjaga eksistensi destinasi wisatanya. Sebagai pusat Pendidikan dan penyebarluasan ajaran agama Islam, desa wisata Mlangi memiliki disertifikasi produk wisata dengan desa wisata lain. Tentu dengan melekatnya nilai religius agama Islam menobatkan desa wisata Mlangi sebagai Desa Wisata Religi yang berbasis komunitas. Selain memiliki unique selling, pemenuhan fasilitas pendukung wisata harus diperhatikan. Ketersediaan amenitas bagi pengunjung di Desa Wisata Religi Mlangi terbilang lengkap. Kemudahan akses jalan darat, membuat ketersediaan akses transportasi dapat ditunjang dengan transportasi online, umum, maupun kendaraan pribadi motor dan mobil. Jarak yang tidak terlalu jauh

dengan pusat kota Yogyakarta membuat simpul transportasi menuju desa wisata religi Mlangi sangat mudah dengan berbagai pilihan jenis kendaraan. Selain itu, pengunjung desa wisata religi mlangi juga dapat meneruskan perjalanannya ke desa wisata lain yang ada disekitarnya yang memiliki jarak yang terjangkau.

Selain akomodasi transportasi, akomodasi lain berupa penginapan, tempat makan dan beribadah juga tersedia didalam dan disekitar lingkungan Desa Mlangi. Desa Wisata Religi Mlangi bahkan memiliki paket *live-in* bagi para pengunjung, paket ini membuat pengunjung dapat tinggal atau menginap di Kawasan masjid dan pesantren yang ada di Mlangi. Akomodasi ini bisa terdiri dari sebagian tempat tinggal penduduk setempat dan unit lain yang bisa ditinggali (Hadiwijoyo, 2012). Destinasi wisata yang kental nuansa Islam membuat pengunjung mudah mendapatkan akses dan fasilitas beribadah. Demikian halnya keberadaan tempat makan, warga Mlangi juga banyak yang berwirausaha dengan membuka warung makan maupun camilan untuk memenuhi kebutuhan kuliner setiap pengunjung yang datang. Di Mlangi memiliki kuliner-kuliner yang khas yang tidak dijumpai di daerah lain, seperti: Selain berwiraswasta sebagai penjual makanan dan minuman, warga desa Mlangi juga terkenal akan pengusaha konveksi. Tentu hal tersebut dapat menjadikan keberadaan pusat oleh-oleh dan cenderamata di Mlangi terpenuhi. Secara garis besar perekonomian warga Mlangi ditopang oleh industry rumah tangga, seperti konveksi, kuliner, jamu-jamuan maupun bidang lainnya. Secara langsung keberadaan pengunjung wisata membuat perkembangan usaha warga mlangi dapat meningkat, dengan kata lain semakin banyak pengunjung memungkinkan semakin banyak pembeli.

Berburu kuliner juga sudah menjadi bagian berwisata, bahkan kurang lengkap jika berwisata tanpa mencicipi kuliner khasnya. Di desa Mlangi dapat dijumpai makanan maupun camilan khas tradisional yang diolah oleh santri dan warga Mlangi, salah satu yang khas adalah opor bebek. Selain itu, akan banyak dijumpai makanan tradisional lain seperti jangan bobor, angan bobor, sego tumpeng sambel pitu, jangan kelontoko, jangan urip-urip, jangan kothok, jangan besengkek, uyah salam, brambang salam. Pengunjung juga dapat membawa oleh-oleh makanan ringan berupa janagel, trasikan, legondo, lemper, mendut, jadah, wajik, jenang Mlangi, rambak, tetel gedang, carang gesing, krekes, klepon-puthu.

### 3. Kesimpulan

Keberadaan wisata religi memberikan suntikan spiritualitas bagi pelaku wisata, kebutuhan akan hiburan duniawi dan ukhrowi menjadi seimbang. Tren desa wisata saat ini terus bermunculan, sehingga memberikan peluang pada industry pariwisata religi untuk berkembang melalui merebaknya desa wisata. potensi ini dapat ditangkap oleh Desa Wisata Mlangi sebagai destinasi wisata religi berbasis komunitas dan dinobatkan sebagai Desa Wisata Religi Mlangi. Dengan segala aspek atau komponen yang dimiliki, Desa Wisata Religi Mlangi memberikan daya tarik yang tidak dimiliki oleh desa wisata lain.

Perhatian untuk komponen produk wisata sangat perlu diperhatikan dan dikembangkan untuk menjaga eksistensi serta mengembangkan destinasi wisata, terkhusus untuk Desa Wisata Religi Mlangi. Dalam kajian ini, aspek daya tarik budaya dan sejarah yang dimiliki oleh Desa Wisata Religi Mlangi berupa situs bersejarah dalam Masjid Jami' Mlangi yang berusia ratusan tahun disertai arsitektur bangunan dengan nuansa Islam, Hindu, dan Keraton Jawa. Selain masjid, di Mlangi juga terdapat situs makam Kyai Nur Iman dan dapat ditemukan banyak pesantren yang membuat kehidupan sosial kemasyarakatan kental ajaran agama Islam. Aksesibilitas Desa Wisata Religi Mlangi mempunyai letak geografis yang sangat strategis tidak jauh dari pusat kota, pusat transportasi. Selain itu untuk mendapatkan informasi terkait Desa Wisata Religi Mlangi masih perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan media sosial berbasis pada teknologi internet. Sedangkan fasilitas pendukung lain berupa amenitas juga telah tersedia untuk menunjang pengembangan destinasi wisata di Desa Mlangi seperti tersedianya sarana dan prasarana akomodasi penginapan dan transportasi, tempat ibadah dan pusat oleh-oleh. Komponen produk wisata untuk pengembangan wisata religi memberikan peluang yang sangat bagus, sehingga perhatian dan pemenuhannya sangat penting, keterlibatan antara pengelola, warga masyarakat serta dinas pemerintah terkait mutlak diperlukan untuk meningkatkan aspek aksesibilitas yang memudahkan pengunjung menjangkau Desa Wisata Religi Mlangi.

### Referensi

- Axiaverona, Reizya G dan RB. Soemanto. (2018). Nilai Sosial Budaya dalam Upacara Adat Tetaken (studi Deskriptif Upacara Adat Tetaken di Desa Mantren, Kecamatan

- Kebonagung, Kabupaten Pacitan). *Journal of Development and Social Change*, Vol.1, No. 1.
- Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., & Wanhill, S. (1996). *Tourism Principle & Practice*. London: Longman Group Limited.
- Chaerunissa, Safira Fatma dan Yuniningsih, Tri. (2020). Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang, *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 9 No. 4.
- Goeldner, Charles R., dan Ritchie, J. R. Brent. (2009). *Tourism, Principles, Practices, Philosophies*, Eleventh Edition. United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
- Hadiwijoyo, Surya Sakti. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Holloway, J., Humphreys, C., dan Davidson, R. (2009). *The Business of Tourism*, 8th Edition, England: Pearson Education Limited.
- Inskeep, Edward. (1991). *Tourism Planning : An Integrated and Sustainable Development Approach*. New York :Van Nostrand Reinhold
- Mill, Robert Christie. (2010). *Tourism, The International Business*. <http://docs.globaltext.terry.uga.edu:8095/> anonymous/webdav/Tourism%20the%20International%20Business/Tourism%20The%20International%20Business.pdf
- Miles and Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis*, USA: Sage Publication.
- Natasha Dessy Putri Ramadhani, Rini dan Heri Setiawan. (2021). Pengaruh 3A Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan Pada Objek Wisata Air Terjun Temam, *Jurnal Terapan Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, Vol. No. 3.
- Nuril Anwar. (2017). *Jadikan Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Keagamaan*. <https://jateng.kemenag.go.id/2017/05/jadikan-masjid-sebagai-pusat-kegiatan-keagamaan/>
- Putrawan, Putu Edi dan Ardana, Dewa Made Joni. (2019). Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Munduk Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. *Locus: Majalah Ilmiah FISIP*. Vol. 11, No. 2.
- Ramdhani, Natasha Dessy Putri, RIni, dan Setiawan, Heri. (2021). Pengaruh 3A Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan pada Objek Wisata Air Terjun Temam. *Jurnal Terapan Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, No. 3.

- Rusvitasisari, Evi dan Solikhin, Agus. (2014). Strategi Pengembangan Wisata Alam Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Objek Wisata Umbul Sidomukti Bandungan Semarang. *Jurnal Pariwisata Indonesia*. Vol 10. No 1.
- Salmon, Indra PP, Ismail, Wahyu E Pujianto dan Fitroh nadyah. (2020). Embrio Destinasi Wisata Religi Baru: Identifikasi Komponen 3A Berbasis Wisata Ziarah Desa Balun, Lamongan. *Jurnal Ilmiah Syiar*, Vol. 20, No. 01.
- Setiyawan, Agung. (2012). Budaya Lokal Dalam Perespektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam. *ESENSIA*, Vol.XIII, No. 2.
- Shofi'unnafi. (2020). Muslim Milenial Sebagai Katalisator Indsutri Pariwisata Halal: Mencari Titik Temu Potensi dan Atensi. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*. Vol. 20, No. 1.
- Sugiyarto dan Amaruli, Rabith Jihan. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 7, No. 1.
- Suryadana, M. Liga dan Vanny, Octavia. (2015). *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung:Alfabeta.
- Yulianto, Atun. (2017). Analisis Objek Daya Tarik Wisata Favorit Berdasarkan Jumlah Pengunjung Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Media Wisata*, Vol. 15. No. 2.
- Zakaria, dan Suprihardjo. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Teknik Pomits*. Vol. 3, No.2.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

## Panduan Template Artikel

Berikut ini adalah panduan dalam menulis artikel yang akan disubmit ke ***Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam***. Dengan mengikuti template ini dan aturan yang ada di dalamnya. Penulis dapat salin tempel artikelnya jika sudah menyiapkan artikel sebelum menerima panduan ini.

**Judul: Tulis judul artikel secara ringkas, jelas, dan informatif menggambarkan isi penelitian. Jumlah kata dalam judul maksimal 20 kata**

**Nama Penulis<sup>1\*</sup>, Nama Penulis<sup>2</sup> and Nama Penulis<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Afiliasi Penulis 1; e-mail@e-mail.com

<sup>2</sup> Afiliasi Penulis 2; e-mail@e-mail.com

<sup>2</sup> Afiliasi Penulis 3; e-mail@e-mail.com

\* Correspondence: e-mail@e-mail.com; Tel.: (optional; include country code; if there are multiple corresponding authors, add author initials) +xx-xxxx-xxx-xxxx (F.L.)

Received: date; Accepted: date; Published: date

**Abstrak:** Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan menggunakan dua Bahasa: Inggris dan Indonesia. Jumlah kata dalam abstrak maksimal 150 kata. Struktur penulisan abstrak dapat mengandung beberapa aspek seperti: 1. Latar belakang masalah; 2. Tujuan penelitian; 3. Metode; 4. Hasil; 5. Kesimpulan.

**Kata Kunci:** kata kunci 1, keyword 2, keyword 3 (Tuliskan 3 sampai 5 kata konsep khusus dari artikel dan disusun sesuai abjad).

### 1. Pendahuluan

Di dalam pendahuluan penulis menguraikan inti masalah yang akan dikaji, menguraikan latar belakangnya, dan menguraikan posisi artikel penulis di tengah kajian-kajian yang terkait. Penulis dapat menguraikan keterkaitan artikelnya dengan artikel-artikel atau karya ilmiah lainnya yang sudah dipublikasikan, kemudian melakukan penelaahan secara singkat terhadap artikel-artikel atau karya-karya ilmiah tersebut, kemudian akan lebih bagus jika penulis juga mampu menunjukkan originalitas dari artikel penulis. Selanjutnya, penulis menguraikan aspek-aspek penting terkait masalah yang sedang dikaji. Penulis dapat menunjukkan alasan dan tujuan pembahasan masalah dalam artikel yang dimaksud. Selanjutnya, penulis menguraikan metodologi atau pendekatan atau perspektif yang digunakan dalam membahas kajian yang disusun.

Penulisan kutipan menggunakan in text citation (body note) sebagai berikut: (Abdullah, 1987) atau (Hidayat & Khalika, 2019) atau (Cichocka, 2016; Hidayat & Khalika, 2019; Ikhwan, 2019; Madjid, 2002) atau (Miller & Josephs, 2009, p. 12) atau Rakhmat (1989). Perhatikan pada bagian akhir panduan ini untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai penulisan referensi. Adapun simbol-simbol dan singkatan-singkatan yang dipergunakan dalam artikel dijelaskan terlebih dahulu pada saat pertama kali disebutkan, kemudian pada saat berikutnya diperkenankan menggunakan simbol atau singkatan.

## 2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian harus didukung oleh data yang valid. Hasil penelitian harus menjawab permasalahan penelitian yang sudah ditetapkan. Sub judul hasil penelitian dituliskan dengan ketentuan berikut:

### 2.1. Subbagian

**Sub-judul 1: gunakan style ini untuk heading satu**

*Sub-judul 2: gunakan style ini untuk heading dua*

*Sub-judul 3: gunakan style ini untuk heading tiga*

#### 2.1.1. Sub Sub Bagian

Untuk poin-poin pernyataan dituliskan sebagai berikut:

- Poin pertama
- Poin kedua
- Poin ketiga
- Dan seterusnya

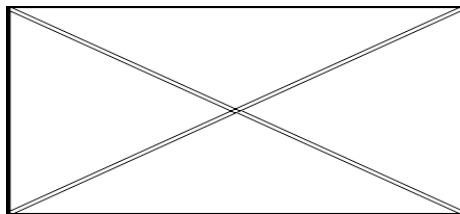
Daftar bernomor dapat ditambahkan seperti berikut:

1. Item pertama
2. Item kedua
3. Item ketiga

Tulisan selanjutnya dituliskan di sini.

### 2.2. Gambar dan Tabel

Penggunaan gambar dan tabel harus disebutkan di dalam teks dengan menyebutkan gambar 1; tabel 1 dan seterusnya.



Gambar 1 deskripsi gambar di sini [JW\_3.8\_figure\_caption]

**Table 1.** Tuliskan deskripsi tabel

Title 1	Title 2	Title 3
entry 1	data	data
entry 2	data	data <sup>1</sup>

<sup>1</sup>dapat menambahkan penjelasan di footnote.

#### 2.3. Apabila menggunakan format matematis dapat dituliskan seperti di bawah ini:

$$a = 1, \quad (1)$$

Penjelasan dari rumus matematis tersebut dapat dituliskan di sini.

Untuk pengutipan secara langsung dapat dituliskan seperti di bawah ini (indent):

Isi kutipan secara langsung. Quote quote quote quote quote quote quote quote quote  
 quote quote quote quote quote quote quote quote quote quote quote quote quote  
 quote quote. quote The text continues here. Proofs must be formatted as follows: quote quote  
 quote quote quote quote quote quote quote quote ,

Tulisan selanjutnya ditempatkan di sini

*Penjelasan Data/analisis: Penjelasan data/analisis dapat dituliskan dengan membuat sub-judul sesuai dengan kebutuhan kajian*

Penulis dapat menjelaskan lebih lanjut atas data yang dipaparkan di hasil temuan dengan menggunakan perspektif tertentu dari penelitian sebelumnya, atau teori yang relevan dengan kajian yang sedang dibahas. Komponen yang perlu diperhatikan pada bagian ini adalah: bagaimana hasil temuan harus mampu menjelaskan permasalahan yang disebutkan di awal studi; bagaimana interpretasi atas data tersebut dilakukan; dan bagaimana hasil yang didapat dari studi yang dilakukan berbeda atau sama dari hasil penelitian sebelumnya?

### 3. Kesimpulan

Kesimpulan harus menjawab permasalahan penelitian dan temuan dari penelitian yang dilakukan. Dapat juga memberikan saran atau rekomendasi untuk proyek riset berikutnya.

**Penghargaan:** Penulis juga bisa memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi pada penelitian yang dilakukan..

**Konflik Kepentingan:** Penulis dapat mendeklarasikan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan bebas dari konflik kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang mungkin mengklaim hasil dari penelitiannya..

### Referensi

Literatur yang dituliskan di referensi hanya yang dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan. Kami menyarankan untuk penulisan referensi menggunakan software seperti Mendeley, EndNote, Reference Manager atau Zotero. Persentasi bahan rujukan yang dipergunakan adalah 80 % dari jurnal artikel, prosiding konferensi atau hasil penelitian dari lima (5) tahun terakhir. Penulisan referensi menggunakan model sistem dari APA (American Psychological Association) , edisi ke-6.)

Contoh penulisan Referensi:

#### **Artikel Jurnal**

Cichocka, A. (2016). Understanding defensive and secure in-group positivity: The role of collective narcissism. *European Review of Social Psychology*, 27(1), 283–317.  
 Marchlewska, M., Cichocka, A., Łozowski, F., Górska, P., & Winiewski, M. (2019). In search of an imaginary enemy: Catholic collective narcissism and the endorsement of gender conspiracy beliefs. *The Journal of Social Psychology*, 159(6), 766--779.

#### **Internet Website**

Hidayat, R., & Khalika, N. N. (2019). Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Retrieved October 17, 2019, from tirto.id website: <https://tirto.id/bisnis-dan-kontroversi-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-cK25>

#### **Buku**

Kamba, M. N. (2018). *Kids Zaman Now Menemukan Kembali Islam*. Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN.  
 Madjid, N. (2002). *Manusia Modern Mendamba Allah: Renungan Tasawuf Positif*. Jakarta: IIMaN & Hikmah.

#### **Bagian Buku atau Book Section**

Ikhwan, M. (2019). Ulama dan Konservatism Islam Publik di Bandung: Islam, Politik Identitas, dan Tantangan Relasi Horizontal. In I. Burdah, N. Kailani, & M. Ikhwan (Eds.), *Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan*. Yogyakarta: PusPIDeP.

### Referensi

- Abdullah, T. (1987). *Islam dan Masyarakat*. Jakarta: LP3ES.
- Cichońka, A. (2016). Understanding defensive and secure in-group positivity: The role of collective narcissism. *European Review of Social Psychology*, 27(1), 283–317.
- Hidayat, R., & Khalika, N. N. (2019). Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran.
- Ikhwan, M. (2019). Ulama dan Konservatism Islam Publik di Bandung: Islam, Politik Identitas, dan Tantangan Relasi Horizontal,” in , ed. by , ), 35–63. In I. Burdah, N. Kailani, & M. Ikhwan (Eds.), *Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan*. Yogyakarta: PusPIDeP.
- Madjid, N. (2002). *Manusia Modern Mendamba Allah: Renungan Tasawuf Positif*. Jakarta: IIMaN & Hikmah.
- Marchlewska, M., Cichońka, A., Łozowski, F., Górska, P., & Winiewski, M. (2019). In search of an imaginary enemy: Catholic collective narcissism and the endorsement of gender conspiracy beliefs. *The Journal of Social Psychology*, 159(6), 766–779.
- Miller, A. E., & Josephs, L. (2009). Whiteness as pathological narcissism. *Contemporary Psychoanalysis*, 45(1), 93–119.
- Rakhmat, J. (1989). *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).